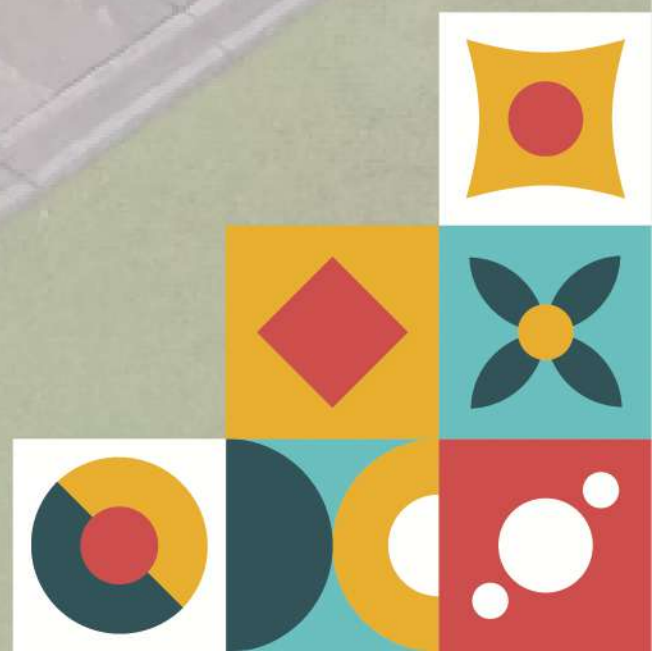




# LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

T A H U N 2 0 2 2

PEMERINTAH  
KOTA TASIKMALAYA  
T A H U N 2 0 2 3



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita sampaikan ke kehadiran Allah SWT, atas limpahan nikmat dan karunia, sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2022 dapat disusun dan disampaikan kepada Pemerintah Pusat melalui Gubernur Jawa Barat sesuai waktu yang ditetapkan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat, dan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menyampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada masyarakat.

Kewajiban penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) secara lebih rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat melalui Gubernur yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

Penyusunan LPPD bertujuan untuk meningkatkan citra Pemerintahan Daerah yang semakin transparan, akuntabel dan berorientasi pelayanan, sesuai dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan ini telah disusun dengan semaksimal mungkin, baik dalam penyajian Indikator Makro, Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome maupun IKK Output setiap



Urusan Pemerintahan, termasuk laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), laporan tugas pembantuan dan laporan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2022 ini disusun. Saran serta kritik yang membangun diperlukan demi tercapainya penyelenggaraan Pemerintahan yang baik. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk serta bimbingan-Nya kepada kita semua.

Tasikmalaya, Maret 2023

**PJ. WALI KOTA TASIKMALAYA,**



**Dr. CHEKA VIRGOWANSYAH, S.STP, ME**



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>I-1</b>
1.1 LATAR BELAKANG.....	I-1
1.1.1. Penjelasan Umum .....	I-1
a. Undang-Undang Pembentukan Kota Tasikmalaya.....	I-1
b. Data Geografis Wilayah.....	I-2
c. Jumlah Penduduk.....	I-6
d. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan.....	I-7
e. Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah..	I-10
f. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah .....	I-14
1) Pendapatan .....	I-14
2) Belanja.....	I-19
3) Realisasi Anggaran Berdasarkan Urusan .....	I-25
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah .....	I-25
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah .....	I-29
1. Kemiskinan dan permasalahan sosial.....	I-29
2. Kualitas Sumber Daya Manusia.....	I-30
3. Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi .....	I-31
4. Infrastruktur dan penataan ruang.....	I-32
5. Reformasi Birokrasi.....	I-33
b. Visi Dan Misi Kepala Daerah.....	I-34
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah.....	I-40
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan .....	I-47
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal .....	I-170
<b>BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH..</b>	<b>II-1</b>
2.1 Capaian Kinerja Makro .....	II-1
2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	II-1
2.1.2 Angka Kemiskinan.....	II-2
2.1.3 Angka Pengangguran.....	II-4



2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi .....	II-5
2.1.5 Pendapatan Per kapita (PDRB Perkapita) .....	II-5
2.1.6 Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini) .....	II-6
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan .....	II-6
a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran .....	II-6
b. Indikator Kinerja Kunci Hasil .....	II-12
c. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan .....	II-39
2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH .....	II-45
A. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja .....	II-45
B. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja .....	II-47
C. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun 2021 .....	II-51
D. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah .....	II-58
E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai .....	II-63
F. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja .....	II-73
<b>BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN .....</b>	<b>III-1</b>
3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota .....	III-1
3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota ..	III-2
3.3. Hambatan / Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian .....	III-3
3.4. Saran dan Tindak Lanjut .....	III-4
<b>BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL ....</b>	<b>IV-1</b>
4.1. Urusan Pendidikan .....	IV-1
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar .....	IV-1
4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah .....	IV-2
4.1.3 Realisasi .....	IV-2
4.1.4 Alokasi Anggaran .....	IV-3
4.1.5 Dukungan Personil .....	IV-3
4.1.6 Permasalahan Dan Solusi .....	IV-4
4.2. Urusan Kesehatan .....	IV-4
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar .....	IV-4
4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah .....	IV-5
4.2.3 Realisasi .....	IV-6



4.2.4 Alokasi Anggaran.....	IV-7
4.2.5 Dukungan Personil .....	IV-8
4.2.6 Permasalahan Dan Solusi .....	IV-8
4.3. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.....	IV-11
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-11
4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah .....	IV-12
4.3.3 Realisasi .....	IV-12
4.3.4 Alokasi Anggaran.....	IV-12
4.3.5 Dukungan Personil .....	IV-13
4.3.6 Permasalahan Dan Solusi .....	IV-13
4.4. Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman .....	IV-14
4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-14
4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah .....	IV-15
4.4.3 Realisasi .....	IV-15
4.4.4 Alokasi Anggaran.....	IV-16
4.4.5 Dukungan Personil .....	IV-16
4.4.6 Permasalahan Dan Solusi .....	IV-16
4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat .....	IV-17
4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-17
4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah .....	IV-18
4.5.3 Realisasi .....	IV-19
4.5.4 Alokasi Anggaran.....	IV-19
4.5.5 Dukungan Personil .....	IV-20
4.5.6 Permasalahan Dan Solusi .....	IV-20
4.6. Urusan Sosial.....	IV-23
4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-23
4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah .....	IV-23
4.6.3 Realisasi .....	IV-24
4.6.4 Alokasi Anggaran.....	IV-25
4.6.5 Dukungan Personil .....	IV-25
4.6.6 Permasalahan Dan Solusi .....	IV-26
4.7 Program Dan Kegiatan .....	IV-28
1. Urusan Pendidikan .....	IV-28
2. Urusan Kesehatan.....	IV-29
3. Urusan Pekerjaan Umum .....	IV-31



4. Urusan Urusan Perumahan Rakyat.....	IV-34
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.....	IV-35
1) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya.....	IV-36
2) BPBD Kota Tasikmalaya.....	IV-37
6. Urusan Sosial .....	IV-38
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>V-1</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

- **LATAR BELAKANG**
- **PENJELASAN UMUM**
- **PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
- **PENETAPAN STANDAR SPM**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

#### **1.1.1. Penjelasan Umum**

##### **a. Undang-Undang Pembentukan Kota Tasikmalaya**

Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai Daerah Otonom tidak terlepas dari Sejarah Berdirinya Kabupaten Tasikmalaya sebagai Daerah Kabupaten Induknya. Pada Tahun 1976 dapat dianggap sebagai tonggak mulanya lahir Kota Tasikmalaya dengan diresmikannya Kota Administratif Tasikmalaya Melalui PP No. 22 Tahun 1976 pada tanggal 3 Nopember 1976 oleh Menteri Dalam Negeri H. Amir Machmud. Peristiwa ini ditandai dengan penandatanganan prasasti yang sekarang terletak di Halaman Gedung DPRD Kab. Tasikmalaya. Pada Waktu yang sama dilantik pula Wali Kota Administratif pertama yaitu Drs. Oman Roosman Oleh Gubernur KDH Tk. I Jawa Barat H. Aang Kunaefi. Pada awal pembentukan, wilayah Kota Administratif Tasikmalaya meliputi 3 Kecamatan: Cipedes, Cihideung dan Tawang, dengan jumlah desa sebanyak 13 desa, kemudian 2 desa dimekarkan dan tingkatan statusnya sehingga menjadi 15 kelurahan.

Undang- undang No. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dalam ketentuan peralihan pasal 125 ayat 2 mengamanatkan bahwa selambat- lambatnya dua tahun setelah tanggal ditetapkannya undang- undang tersebut semua kota Administratif bilamana memenuhi ketentuan, sudah harus berubah statusnya menjadi Kota. Aspirasi tersebut terkabul dengan dikeluarkan Undang-Undang No. 10 tahun 2001 tentang pembentukan kota Tasikmalaya, pada tanggal 17 Oktober 2001 Pemerintah Kota Tasikmalaya diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno atas nama Presiden RI di Jakarta. Prasasti Penandatanganan sekarang diletakan di lobi Balekota Jalan Letnan Harun Nomor 1 Kota Tasikmalaya. Tanggal 18 oktober 2001 Pelantikan Drs. H. Wahyu Suradiharja sebagai Penjabat Wali Kota Tasikmalaya oleh Gubernur Jawa Barat R. Nuriana dilaksanakan di Gedung Sate Bandung.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2001 Pemerintah Kota Tasikmalaya pada awal terbentuknya mempunyai 8 Wilayah Kecamatan dengan 15 Kelurahan di wilayah 3 Kecamatan eks Kotif dan 54 Desa di 5 wilayah Kecamatan, sedangkan ketentuan peralihan pasal 126 ayat 2 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 mengamanatkan bahwa desa- desa yang ada dalam wilayah Kotamadya, Kotamadya administratif pada saat mulai berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 ditetapkan sebagai kelurahan. Dalam upaya meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, maka desa-desa yang ada di Kota Tasikmalaya dilakukan penataan dengan cara mengubah status desa menjadi Kelurahan.

Penetapan perubahan status desa menjadi Kelurahan dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 30 tahun 2003 yang ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2003. Dengan Peraturan Daerah tersebut maka Kota Tasikmalaya memiliki wilayah dengan jumlah Kelurahan 69 Kelurahan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Purbaratu yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Indihiang dan Kecamatan Cibeureum, dengan demikian jumlah Kecamatan di Wilayah Pemerintah Kota Tasikmalaya menjadi 10 Kecamatan dan 69 Kelurahan.

#### **b. Data Geografis Wilayah**

Kota Tasikmalaya terletak antara 108008'38" BT-108024'02" BT dan antara 7010' LS-7026'32" LS, berada di bagian tenggara Provinsi Jawa Barat, berjarak  $\pm$  105 km dari Kota Bandung dan  $\pm$  255 km dari Kota Jakarta. Batas wilayah administrasi Kota Tasikmalaya diatur ber Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya pasal 6 ayat (1) bahwa Kota Tasikmalaya mempunyai batas-batas wilayah :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Cisayong dan Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Cihaurbeuti dan Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis;

- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jatiwaras dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya; dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Singaparna, Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya.

Luas wilayah administrasi Kota Tasikmalaya menurut Undang-Undang seluas 17.156,20 hektar dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, terdeliniasi wilayah administrasi Kota Tasikmalaya seluas 18.422 hektar (sumber Badan Informasi Geospasial, 2017). Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 29 tahun 2021 Tentang Peta Batas Kelurahan di Wilayah Kota Tasikmalaya, wilayah administrasi Kota Tasikmalaya terdeliniasi seluas 18.159 hektar. Secara administratif, Kota Tasikmalaya terbagi atas 10 kecamatan dan 69 kelurahan. Untuk lebih jelasnya mengenai letak orientasi dan batas administrasi dapat dilihat pada tabel 1.1.

**Tabel 1. 1**  
**Luas Wilayah Administratif Kecamatan dan Kelurahan**

NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN / KELURAHAN	HA	KM <sup>2</sup>
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>32.78.01.</b>	<b>CIHIDEUNG</b>	<b>544,670</b>	<b>5,447</b>
1.	32.78.01.1001	Yudanagara	42,217	0,422
2.	32.78.01.1002	Nagarawangi	55,532	0,555
3.	32.78.01.1003	Cilembang	78,515	0,785
4.	32.78.01.1004	Argasari	71,671	0,717
5.	32.78.01.1005	Tugujaya	158,252	1,583
6.	32.78.01.1006	Tuguraja	138,483	1,385
<b>II</b>	<b>32.78.02.</b>	<b>CIPEDES</b>	<b>903,438</b>	<b>9,034</b>
7.	32.78.02.1001	Panglayungan	170,817	1,708
8.	32.78.02.1002	Cipedes	126,844	1,268
9.	32.78.02.1003	Nagarasari	263,992	2,640
10.	32.78.02.1004	Sukamanah	341,785	3,418



NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN / KELURAHAN	HA	KM <sup>2</sup>
1	2	3	4	5
<b>III</b>	<b>32.78.03.</b>	<b>TAWANG</b>	<b>690,825</b>	<b>6,908</b>
11.	32.78.03.1001	Tawang Sari	45,961	0,460
12.	32.78.03.1002	Empangsari	57,054	0,571
13.	32.78.03.1003	Lengkongsari	117,037	1,170
14.	32.78.03.1004	Cikalang	145,459	1,455
15.	32.78.03.1005	Kahuripan	325,315	3,253
<b>IV</b>	<b>32.78.04.</b>	<b>INDIHIANG</b>	<b>1089,073</b>	<b>10,891</b>
16.	32.78.04.1003	Indihiang	157,972	1,580
17.	32.78.04.1004	Sir nagalih	110,284	1,103
18.	32.78.04.1005	Parakannyasag	223,628	2,236
19.	32.78.04.1006	Panyingkiran	72,558	0,726
20.	32.78.04.1007	Sukamaju Kaler	272,166	2,722
21.	32.78.04.1008	Sukamaju Kidul	252,465	2,525
<b>V</b>	<b>32.78.05.</b>	<b>KAWALU</b>	<b>4159,922</b>	<b>41,599</b>
22.	32.78.05.1001	Karsamenak	314,459	3,145
23.	32.78.05.1002	Cilamajang	178,799	1,788
24.	32.78.05.1003	Gunung Tandala	461,169	4,612
25.	32.78.05.1004	Urug	1149,392	11,494
26.	32.78.05.1005	Tanjung	312,489	3,125
27.	32.78.05.1006	Cibeuti	297,101	2,971
28.	32.78.05.1007	Karang anyar	358,656	3,587
29.	32.78.05.1008	Talagasari	271,574	2,716
30.	32.78.05.1009	Leuwiliang	417,193	4,172
31.	32.78.05.1010	Gununggede	399,089	3,991
<b>VI</b>	<b>32.78.06.</b>	<b>CIBEUREUM</b>	<b>1860,848</b>	<b>18,608</b>
32.	32.78.06.1005	Setiaratu	123,238	1,232
33.	32.78.06.1007	Kersanagara	254,487	2,545
34.	32.78.06.1008	Kota Baru	287,709	2,877
35.	32.78.06.1009	Awipari	165,659	1,657
36.	32.78.06.1010	Setianagara	143,690	1,437
37.	32.78.06.1011	Ciherang	189,114	1,891
38.	32.78.06.1012	Ciakar	263,161	2,632
39.	32.78.06.1013	Margabakti	161,883	1,619
40.	32.78.06.1014	Setiajaya	271,907	2,719
<b>VII</b>	<b>32.78.07.</b>	<b>TAMANSARI</b>	<b>3676,994</b>	<b>36,770</b>
41.	32.78.07.1001	Tamansari	1003,366	10,034
42.	32.78.07.1002	Mugarsari	292,401	2,924
43.	32.78.07.1003	Tamanjaya	455,396	4,554



NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN / KELURAHAN	HA	KM <sup>2</sup>
1	2	3	4	5
44.	32.78.07.1004	Sumelap	219,128	2,191
45.	32.78.07.1005	Setiawargi	949,713	9,497
46.	32.78.07.1006	Mulyasari	283,896	2,839
47.	32.78.07.1007	Sukahurip	203,765	2,038
48.	32.78.07.1008	Setiamulya	269,329	2,693
<b>VIII</b>	<b>32.78.08.</b>	<b>MANGKUBUMI</b>	<b>2415,073</b>	<b>24,151</b>
49.	32.78.08.1001	Mangkubumi	335,573	3,356
50.	32.78.08.1002	Cigantang	308,536	3,085
51.	32.78.08.1003	Karikil	277,005	2,770
52.	32.78.08.1004	Linggajaya	464,828	4,648
53.	32.78.08.1005	Cipawitra	323,513	3,235
54.	32.78.08.1006	Sambongpari	182,982	1,830
55.	32.78.08.1007	Sambongjaya	232,627	2,326
56.	32.78.08.1008	Cipari	290,008	2,900
<b>IX</b>	<b>32.78.09.</b>	<b>BUNGURSARI</b>	<b>1758,215</b>	<b>17,582</b>
57.	32.78.09.1001	Sukamulya	136,179	1,362
58.	32.78.09.1002	Sukarindik	215,361	2,154
59.	32.78.09.1003	Bungursari	277,468	2,775
60.	32.78.09.1004	Sukajaya	236,895	2,369
61.	32.78.09.1005	Cibunigeulis	363,387	3,634
62.	32.78.09.1006	Bantarsari	204,567	2,046
63.	32.78.09.1007	Sukalaksana	324,360	3,244
<b>X</b>	<b>32.78.10.</b>	<b>PURBARATU</b>	<b>1216,836</b>	<b>12,168</b>
64.	32.78.10.1001	Sukanagara	164,262	1,643
65.	32.78.10.1002	Sukamenak	144,426	1,444
66.	32.78.10.1003	Purbaratu	177,721	1,777
67.	32.78.10.1004	Sukaasih	161,660	1,617
68.	32.78.10.1005	Sukajaya	200,270	2,003
69.	32.78.10.1006	Singkup	368,497	3,685
<b>LUAS KOTA TASIKMALAYA</b>			<b>18315,894</b>	<b>183,159</b>

Sumber : Peraraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2021

Untuk lebih jelasnya mengenai letak orientasi dan batas administrasi dapat dilihat pada gambar 1.1. sebagai berikut :

**Gambar 1. 1**  
**Peta Orientasi dan Administrasi Kota Tasikmalaya**



Sumber : Peta citra hasil pemetaan sebagai dasar Perwalkot Tasikmalaya No 29 Tahun 2021

### **c. Jumlah Penduduk**

Kota Tasikmalaya dengan luas wilayah 183,16 km<sup>2</sup> didiami oleh penduduk sebanyak 737.244 jiwa, yang tersebar di 10 kecamatan. Jumlah penduduk terbanyak yaitu di Kecamatan Kawalu sebanyak 99.949 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil yaitu di Kecamatan Purbaratu sebanyak 45.720 jiwa. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel 1.2.

**Tabel 1.2.**  
**Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK			
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	CIHIDEUNG	36,859	36,329	73,188	9,92
2	CIPEDES	42,168	40,798	82,966	11,25
3	TAWANG	31,802	31,866	63,668	8,63
4	INDIHIANG	30,055	29,421	59,476	8,06
5	KAWALU	51,299	48,650	99,949	13,55
6	CIBEUREUM	35,858	34,991	70,849	9,6
7	TAMANSARI	40,983	39,209	80,192	10,87
8	MANGKUBUMI	50,487	48,889	99,376	13,47
9	BUNGURSARI	31,451	30,409	61,860	8,39
10	PURBARATU	23,327	22,393	45,720	6,2
<b>JUMLAH</b>		<b>374,289</b>	<b>362,955</b>	<b>737,244</b>	<b>100</b>

Sumber : DKB Semester I Tahun 2022

#### **d. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 2001 Pemerintah Kota Tasikmalaya pada awal terbentuknya mempunyai 8 Wilayah Kecamatan dengan 15 Kelurahan di wilayah 3 Kecamatan eks Kotif dan 54 Desa di 5 wilayah Kecamatan, sedangkan ketentuan peralihan pasal 126 ayat 2 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 mengamanatkan bahwa desa- desa yang ada dalam wilayah Kotamadya, Kotamadya administratif pada saat mulai berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 ditetapkan sebagai kelurahan. Dalam upaya meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, maka desa-desa yang ada di Kota Tasikmalaya dilakukan penataan dengan cara mengubah status desa menjadi Kelurahan.

Penetapan perubahan status desa menjadi Kelurahan dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 30 tahun 2003 yang ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2003. Dengan Peraturan Daerah tersebut maka Kota Tasikmalaya memiliki wilayah dengan jumlah Kelurahan 69 Kelurahan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Purbaratu yang merupakan pemekaran dari

Kecamatan Indihiang dan Kecamatan Cibeureum, dengan demikian jumlah Kecamatan di Wilayah Pemerintah Kota Tasikmalaya menjadi 10 Kecamatan dan 69 kelurahan. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah kecamatan dan kelurahan dapat dilihat pada tabel 1.3.

**Tabel 1. 3.**  
**Luas Wilayah Administratif Kecamatan dan Kelurahan**

<b>NO</b>	<b>KODE WILAYAH</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I</b>	<b>32.78.01.</b>	<b>CIHIDEUNG</b>	
1.	32.78.01.1001		Yudanagara
2.	32.78.01.1002		Nagarawangi
3.	32.78.01.1003		Cilembang
4.	32.78.01.1004		Argasari
5.	32.78.01.1005		Tugujaya
6.	32.78.01.1006		Tuguraja
<b>II</b>	<b>32.78.02.</b>	<b>CIPEDES</b>	
7.	32.78.02.1001		Panglayungan
8.	32.78.02.1002		Cipedes
9.	32.78.02.1003		Nagarasari
10.	32.78.02.1004		Sukamanah
<b>III</b>	<b>32.78.03.</b>	<b>TAWANG</b>	
11.	32.78.03.1001		Tawang Sari
12.	32.78.03.1002		Empangsari
13.	32.78.03.1003		Lengkongsari
14.	32.78.03.1004		Cikalang
15.	32.78.03.1005		Kahuripan
<b>IV</b>	<b>32.78. 04.</b>	<b>INDIHIANG</b>	
16.	32.78.04. 1003		Indihiang
17.	32.78.04. 1004		Sirnagalih
18.	32.78.04. 1005		Parakannyasag
19.	32.78.04. 1006		Panyingkiran
20.	32.78.04. 1007		Sukamaju Kaler
21.	32.78.04. 1008		Sukamaju Kidul
<b>V</b>	<b>32.78.05.</b>	<b>KAWALU</b>	
22.	32.78.05.1001		Karsamenak
23.	32.78.05.1002		Cilamajang
24.	32.78.05.1003		Gunung Tandala
25.	32.78.05.1004		Urug
26.	32.78.05.1005		Tanjung
27.	32.78.05.1006		Cibeuti





<b>NO</b>	<b>KODE WILAYAH</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
28.	32.78.05.1007		Karang anyar
29	32.78.05.1008		Talagasari
30	32.78.05.1009		Leuwiliang
31	32.78.05.1010		Gununggede
<b>VI</b>	<b>32.78.06.</b>	<b>CIBEUREUM</b>	
32.	32.78.06. 1005		Setiaratu
33.	32.78.06. 1007		Kersanagara
34.	32.78.06. 1008		Kota Baru
35.	32.78.06. 1009		Awipari
36.	32.78.06. 1010		Setianagara
37.	32.78.06. 1011		Ciherang
38.	32.78.06. 1012		Ciakar
39	32.78.06. 1013		Margabakti
40	32.78.06. 1014		Setiajaya
<b>VII</b>	<b>32.78.07.</b>	<b>TAMANSARI</b>	
41.	32.78.07.1001		Tamansari
42.	32.78.07.1002		Mugarsari
43.	32.78.07.1003		Tamanjaya
44.	32.78.07.1004		Sumelap
45.	32.78.07.1005		Setiawargi
46.	32.78.07.1006		Mulyasari
47	32.78.07.1007		Sukahurip
48	32.78.07.1008		Setiamulya
<b>VIII</b>	<b>32.78.08.</b>	<b>MANGKUBUMI</b>	
49	32.78.08.1001		Mangkubumi
50	32.78.08.1002		Cigantang
51	32.78.08.1003		Karikil
52	32.78.08.1004		Linggajaya
53	32.78.08.1005		Cipawitra
54	32.78.08.1006		Sambongpari
55	32.78.08.1007		Sambongjaya
56	32.78.08.1008		Cipari
<b>IX</b>	<b>32.78.09.</b>	<b>BUNGURSARI</b>	
57	32.78.09.1001		Sukamulya
58	32.78.09.1002		Sukarindik
59	32.78.09.1003		Bungursari
60	32.78.09.1004		Sukajaya
61	32.78.09.1005		Cibunigeulis
62	32.78.09.1006		Bantarsari
63	32.78.09.1007		Sukalaksana

NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	KELURAHAN
1	2	3	4
X	32.78.10.	PURBARATU	
64	32.78.10.1001		Sukanagara
65	32.78.10.1002		Sukamenak
66	32.78.10.1003		Purbaratu
67	32.78.10.1004		Sukaasih
68	32.78.10.1005		Sukajaya
69	32.78.10.1006		Singkup

Sumber : Bagian Pemerintahan, Setda Kota Tasikmalaya, 2022

#### e. Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditetapkan pada tanggal 27 Oktober 2020. Susunan Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan jenis, tipologi dan tugas atau Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah dengan tipe B yang melaksanakan tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
- b. Sekretariat DPRD dengan tipe A yang melaksanakan tugas pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
- c. Inspektorat Daerah dengan tipe B yang melaksanakan tugas pengawas penyelenggaraan Pemerintahan;
- d. Dinas yang meliputi :
  1. Dinas Pendidikan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pendidikan;
  2. Dinas Kesehatan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan kesehatan;
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan pertanahan;



4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
6. Dinas Perhubungan dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan perhubungan;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil;
8. Dinas Sosial dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan sosial;
9. Dinas Tenaga Kerja dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan tenaga kerja dan transmigrasi;
10. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pangan, pertanian dan sebagian urusan kelautan dan perikanan;
11. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
13. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
14. Dinas Lingkungan Hidup dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup;
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan perpustakaan dan kearsipan;

16. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
  17. Satuan Polisi Pamong Praja dengan tipe A yang menyelenggarakan sebagian urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yaitu sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Badan yang meliputi :
1. Badan Pendapatan Daerah dengan tipe A yang menyelenggarakan sebagian tugas pengelolaan keuangan Daerah di bidang pajak dan retribusi;
  2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan tipe A yang melaksanakan tugas perencanaan, penelitian dan pengembangan;
  3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan tipe B yang melaksanakan tugas administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
  4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan tipe A yang melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan tipe C yang melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik;
  6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan unsur pelaksana klasifikasi A yang menyelenggarakan sebagian urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yaitu sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.
- f. Kecamatan dengan tipe A yang melaksanakan tugas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan di wilayahnya, meliputi :
1. Kecamatan Cihideung;
  2. Kecamatan Cipedes;
  3. Kecamatan Tawang;
  4. Kecamatan Indihiang;

5. Kecamatan Kawalu;
6. Kecamatan Cibeureum;
7. Kecamatan Tamansari;
8. Kecamatan Mangkubumi;
9. Kecamatan Bungursari;
10. Kecamatan Purbaratu.
11. Unit kerja

Adapun jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sampai dengan 31 Desember 2022 sebanyak 6,005 orang dengan rincian ASN laki-laki berjumlah 2,552 dan ASN perempuan berjumlah 3,453. Adapun rekapitulasi data jumlah ASN per-perangkat daerah berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut :

**Tabel 1. 4.**  
**Rekapitulasi Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) Perjenis Kelamin**

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Sekretariat Daerah	114	48	162
2	Sekretariat DPRD	33	12	45
3	Inspektorat Daerah	39	24	63
4	Dinas Pendidikan	765	1.788	2.553
5	Dinas Kesehatan	197	663	860
	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo	245	367	612
6	Dinas Koperasi, Umkm, Perindustrian Dan Perdagangan	37	22	59
7	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	72	17	89
8	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	17	11	28
9	Satuan Polisi Pamong Praja	81	5	86
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	37	10	47
11	Dinas Sosial	12	16	28
12	Dinas Tenaga Kerja	16	12	28
13	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	57	30	87
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata	25	11	36
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15	14	29
16	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	6	17	23
17	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	28	20	48
18	Dinas Lingkungan Hidup	123	19	142
19	Dinas Perhubungan	72	9	81
20	Dinas Komunikasi Dan Informatika	25	10	35

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
21	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	12	15	27
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	25	21	46
23	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	27	26	53
24	Badan Pendapatan Daerah	56	22	78
25	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	33	28	61
26	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	10	5	15
27	Kecamatan Cihideung	26	26	52
28	Kecamatan Tawang	26	22	48
29	Kecamatan Cipedes	23	17	40
30	Kecamatan Cibeureum	45	30	75
31	Kecamatan Kawalu	57	20	77
32	Kecamatan Indihiang	32	19	51
33	Kecamatan Tamansari	41	19	60
34	Kecamatan Mangkubumi	46	20	66
35	Kecamatan Bungursari	41	21	62
36	Kecamatan Purbaratu	36	17	53
<b>JUMLAH</b>		<b>2.552</b>	<b>3.453</b>	<b>6.005</b>

Sumber : BKPSDM Kota Tasikmalaya, Tahun 2022

## f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

### 1) Pendapatan

Jumlah Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1.971.069.862.672,- dan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.902.443.766.698,- dengan persentase sebesar 96,52 %. Komposisi anggaran dan realisasi Pendapatan Tahun 2022 per 31 Desember 2022 serta realisasi Tahun 2021 disajikan pada tabel 1.5. sebagai berikut :

Tabel 1. 5.  
Komposisi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2022

PENDAPATAN DAERAH	TAHUN 2022		
	ANGGARAN	REALISASI	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	377.696.438.409	341.362.213.700	90,38
Pendapatan Transfer	1.504.619.524.263	1.475.175.680.746	98,04
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	88.753.900.000	85.905.872.252	96,79
<b>JUMLAH</b>	<b>1.971.069.862.672</b>	<b>1.902.443.766.698</b>	<b>96,52</b>

Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, Tahun 2022

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, realisasi dan pencapaian target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

**(a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah. Anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah untuk periode Tahun Anggaran 2022, disajikan pada tabel 1.6.sebagai berikut :

**Tabel 1. 6.**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah**  
**Periode Tahun Anggaran 2022**

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tahun 2022		
	Anggaran	Realisasi	%
Pajak Daerah	168.313.162.072	159.043.569.254	94,49
Retribusi Daerah	17.440.517.000	11.877.941.377	68,11
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.867.043.837	6.867.125.110	100,00
Lain-Lain PAD yang Sah	185.075.715.500	163.573.577.959	88,38
<b>Jumlah</b>	<b>377.696.438.409</b>	<b>341.362.213.700</b>	<b>90,38</b>

Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, Tahun 2022

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2022, dapat dirinci sebagai berikut :

**a. Pajak Daerah**

Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pendapatan Pajak Daerah Kota Tasikmalaya dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 159.043.569.254,- atau 94,49 % dari anggaran sebesar Rp.168.313.162.072,-

Pajak Daerah ini terdiri dari 11 jenis pajak yaitu :

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Parkir;
- 7) Pajak Air Tanah;
- 8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- 10) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

**b. Pendapatan Retribusi Daerah**

Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh masing-masing Satuan Kerja penghasil.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.11.877.941.377,- atau 68,11 % dari anggaran sebesar Rp.17.440.517.000,-

Retribusi Daerah ini terdiri dari :

- 1) Retribusi Jasa Umum, meliputi :
  - a) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - c) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - d) Retribusi Pelayanan Pasar;
  - e) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - f) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
  - g) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
  - h) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- 2) Retribusi Jasa Usaha, meliputi :
  - a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
  - c) Retribusi Tempat Pelelangan;



- d) Retribusi Terminal;
- e) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- g) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- h) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3) Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi :

- a) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum;
- b) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

**c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.6.867.125.110,- atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp.6.867.043.837,-

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah ini terdiri dari :

- 1) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bank BJB);
- 2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (BPRS Al Madinah).

**d. Lain-lain PAD yang Sah**

Lain-lain PAD yang Sah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap.

Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 163.573.577.959,- atau 88,38 % dari anggaran sebesar Rp.185.075.715.500,-

Lain-lain PAD yang Sah ini terdiri dari :

- 1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
- 2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;

- 3) Hasil Kerja Sama Daerah;
- 4) Jasa Giro;
- 5) Pendapatan Bunga;
- 6) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
- 7) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
- 8) Pendapatan Denda Pajak Daerah;
- 9) Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
- 10) Pendapatan dari Pengembalian;
- 11) Pendapatan BLUD;
- 12) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
- 13) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah; dan
- 14) Lain-lain PAD yang Sah Lainnya.

**(b) Pendapatan Transfer**

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang bersumber dari dana APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Tasikmalaya TA 2022, disajikan pada tabel 1.7. sebagai berikut :

**Tabel 1. 7.**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer**  
**Tahun Anggaran 2022**

PENDAPATAN TRANSFER	TAHUN 2022		
	ANGGARAN	REALISASI	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.089.000.999.537	1.063.555.008.009	97,66
Pendapatan Transfer Antar Daerah	415.618.524.726	411.620.672.737	99,04
<b>JUMLAH</b>	<b>1.504.619.524.263</b>	<b>1.475.175.680.746</b>	<b>98,04</b>

Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, Tahun 2022

**a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2022 adalah sebesar Rp. 1.063.555.008.009,- atau 97,66% dari anggaran sebesar Rp. 1.089.000.999.537,-

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan ini terdiri dari :

- 1) Dana Bagi Hasil (DBH);
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU);
- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
- 4) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

#### **b. Pendapatan Transfer Antar Daerah**

Penerimaan yang berasal dari Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2022 terealisasi sebesar Rp. 411.620.672.737,- atau 99,04% dari anggaran sebesar Rp.415.618.524.726,-. Pendapatan Transfer Antar Daerah ini terdiri dari :

- 1) Pendapatan Bagi Hasil; dan
- 2) Bantuan Keuangan.

#### **(c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Anggaran dan realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2022, disajikan pada tabel 1.8. sebagai berikut :

**Tabel 1. 8.**  
**Anggaran dan Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2022 dan 2021**

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Tahun 2022		
	ANGGARAN	REALISASI	%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	88.753.900.000	85.905.872.252	96,79

Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, Tahun 2022

Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada TA 2022 adalah sebesar Rp.85.905.872.252,- atau 96,79% dari anggaran sebesar Rp. 85.905.872.252,00,-.

## **2) Belanja**

Realisasi Belanja Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat di Kota Tasikmalaya mencapai sebesar Rp. 1.912.315.283.427,- atau 95,45 % dari anggaran sebesar

Rp.2.003.436.764.110,- Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer, dengan rincian anggaran dan realisasi TA 2022, disajikan pada tabel 1.9. sebagai berikut :

**Tabel 1. 9.**  
**Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022**

No	Belanja Daerah	Tahun 2022		
		Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasi	1.586.445.659.277	1.530.804.877.753	96,49
2	Belanja Modal	412.221.459.753	378.644.240.783	91,85
3	Belanja Tak Terduga	4.769.645.080	2.866.164.891	60,09
4	Belanja Transfer	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>2.003.436.764.110</b>	<b>1.912.315.283.427</b>	<b>95,45</b>

Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, Tahun 2022

### (a) Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi antara lain meliputi belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial, dengan rincian anggaran dan realisasi TA 2022 disajikan pada tabel 1.10. sebagai berikut :

**Tabel 1. 10.**  
**Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022**

No	Belanja Operasi	Tahun 2022		
		Anggaran	Realisasi	%
1	Pegawai	810.238.561.916	789.777.565.972	97,47
2	Barang dan Jasa	677.028.383.305	648.185.414.975	95,74
3	Bunga	1.000.000.000	20.996.182	2,10
4	Subsidi	385.000.000	142.670.000	37,06
5	Hibah	97.079.714.056	91.980.930.624	94,75
6	Bantuan Sosial	714.000.000	697.300.000	97,66
<b>Jumlah</b>		<b>1.586.445.659.277</b>	<b>1.530.804.877.753</b>	<b>96,49</b>

Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, Tahun 2022

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.1.530.804.877.753,- dengan anggaran sebesar Rp.1.586.445.659.277,- mencapai 96,49 %. Rincian Belanja Operasi disajikan sebagai berikut :

**a. Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.789.777.565.972,- dari anggaran sebesar Rp.810.238.561.916,- atau mencapai 97,47 %.

Belanja Pegawai ini terdiri dari :

- 1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
- 2) Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
- 3) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
- 4) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
- 5) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
- 6) Belanja Pegawai BLUD.

**b. Belanja Barang dan Jasa**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 adalah sebesar Rp.648.185.414.975,- dari anggaran sebesar Rp.677.028.383.305,- atau mencapai 95,74 %.

Belanja Barang dan Jasa ini terdiri dari :

- 1) Belanja Barang;
- 2) Belanja Jasa;
- 3) Belanja Pemeliharaan;
- 4) Belanja Perjalanan Dinas;
- 5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat;
- 6) Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
- 7) Belanja Barang dan Jasa BLUD.

**c. Belanja Bunga**

Belanja bunga merupakan pembayaran atas bunga pinjaman RSUD dr. Soekardjo. Realisasi Belanja Bunga TA 2022 adalah sebesar Rp.20.996.181,- dari anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,- atau mencapai 2,10%.

**d. Belanja Subsidi**

Belanja subsidi merupakan pembayaran subsidi bunga kredit wira usaha baru melalui pembiayaan dari BPRS Al Madinah. Realisasi Belanja

Subsidi TA 2022 adalah sebesar Rp.142.670.000,- dari anggaran sebesar Rp.385.000.000,- atau mencapai 37,06%.

**e. Belanja Hibah**

Belanja Hibah terdiri dari Hibah kepada Pemerintah Pusat, Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, dan Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Realisasi Belanja Hibah TA 2022 adalah sebesar Rp. 91.980.930.624,- dari anggaran sebesar Rp.97.079.714.056,- atau mencapai 94,75 %.

**f. Belanja Bantuan Sosial**

Belanja Bantuan Sosial terdiri dari Bantuan Sosial kepada Individu dan Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 adalah sebesar Rp.697.300.000,- dari anggaran sebesar Rp.714.000.000,- atau mencapai 97,66%.

**(b) Belanja Modal**

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Anggaran dan realisasi Belanja Modal TA 2022 disajikan pada tabel 1.11. sebagai berikut :

**Tabel 1.11.**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022**

No	Belanja Modal	Tahun 2022		
		Anggaran	Realisasi	%
1	Tanah	5.421.120.000	5.317.869.890	98,10
2	Peralatan dan Mesin	137.925.532.001	137.898.409.970	99,98
3	Gedung dan Bangunan	61.660.402.844	49.533.882.034	80,33
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	206.558.419.108	184.606.475.689	89,37
5	Aset Tetap Lainnya	655.985.800	1.287.603.200	196,29
<b>Jumlah</b>		<b>412.221.459.753</b>	<b>378.644.240.783</b>	<b>91,85</b>

Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, Tahun 2022

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.378.644.240.783,- atau mencapai 91,85 % dari anggaran sebesar Rp.412.221.459.753,-

Rincian Belanja Modal disajikan sebagai berikut :

**a. Belanja Modal Tanah**

Realisasi belanja modal Tanah TA 2022 adalah sebesar Rp.5.317.869.890,- atau mencapai 98,10 % dari anggaran sebesar Rp.5.421.120.000,-

**b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin TA 2022 adalah sebesar Rp.137.898.409.970,- atau mencapai 99,98 % dari anggaran sebesar Rp.137.925.532.001,-

Belanja modal Peralatan dan Mesin terdiri dari :

- 1) Belanja Modal Alat Besar;
- 2) Belanja Modal Alat Angkutan;
- 3) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
- 4) Belanja Modal Alat Pertanian;
- 5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
- 6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
- 7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
- 8) Belanja Modal Alat Laboratorium;
- 9) Belanja Modal Komputer;
- 10) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
- 11) Belanja Modal Rambu-rambu
- 12) Belanja Modal Peralatan Olahraga
- 13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS
- 14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD

**c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan TA 2022 adalah sebesar Rp.49.533.882.034,- atau mencapai 80,33 % dari anggaran sebesar Rp.61.660.402.844,-

Belanja modal Gedung dan Bangunan terdiri dari :

- 1) Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
- 2) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD

**d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi**

Realisasi belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2022 adalah sebesar Rp.184.606.475.689,- atau mencapai 89,37 % dari anggaran sebesar Rp.206.558.419.108,-

Belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi terdiri dari :

- 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
- 2) Belanja Modal Bangunan Air;
- 3) Belanja Modal Instalasi; dan
- 4) Belanja Modal Jaringan.

**e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

Realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya TA 2022 adalah sebesar Rp.1.287.603.200,- atau mencapai 196,29 % dari anggaran sebesar Rp.655.985.800,-

Belanja modal Aset Tetap Lainnya ini terdiri dari :

- 1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
- 2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
- 3) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
- 4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; dan
- 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.

**(c) Belanja Tak Terduga**

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Anggaran dan realisasi Belanja Tak Terduga TA 2022 disajikan pada tabel 1.12. sebagai berikut :

**Tabel 1.12.**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 dan 2021**

Belanja Tak Terduga	Tahun 2022		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Tak Terduga	4.769.645.080	2.866.164.891	60,09

Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, Tahun 2022



Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.2.866.164.891,- atau 60,09% dari anggaran sebesar Rp.4.769.645.080,-.

### 3) Realisasi Anggaran Berdasarkan Urusan

#### (a) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

Penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 6 (enam) urusan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.13.**  
**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

NO	URUSAN PERANGKAT DAERAH	KEUANGAN		
		PAGU	REALISASI	
			(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5
	<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>	<b>1.372.434.547.701,00</b>	<b>1.300.725.882.758,00</b>	<b>94,78</b>
<b>1</b>	<b>Urusan Pendidikan</b>	<b>624.303.093.464,00</b>	<b>602.137.276.499,00</b>	<b>96,45</b>
	Dinas Pendidikan	624.303.093.464,00	602.137.276.499,00	96,45
<b>2</b>	<b>Urusan Kesehatan</b>	<b>401.225.297.153,00</b>	<b>380.020.900.501,00</b>	<b>94,72</b>
	Dinas Kesehatan	401.225.297.153,00	380.020.900.501,00	94,72
<b>3</b>	<b>Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</b>	<b>278.635.852.371</b>	<b>251.263.462.987</b>	<b>90,18</b>
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	278.635.852.371	251.263.462.987	90,18
<b>4</b>	<b>Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman</b>	<b>19.668.232.698</b>	<b>19.138.262.634</b>	<b>97,31</b>
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	19.668.232.698	19.138.262.634	97,31
<b>5</b>	<b>Urusan Ketentraman, Ketertiban umum, dan Pelindungan Masyarakat</b>	<b>22.187.627.003</b>	<b>21.879.534.633</b>	<b>98,61</b>
	Satuan Polisi Pamong Praja	13.339.631.794	13.250.318.633	99,33
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.847.995.209	8.629.216.000	97,53
<b>6</b>	<b>Urusan Sosial</b>	<b>26.414.445.012</b>	<b>26.286.445.504</b>	<b>99,52</b>
	Dinas Sosial	26.414.445.012	26.286.445.504	99,52

Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, 2023.

#### (b) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

Penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 17 (tujuh belas) urusan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.14.**  
**Pagu Dan Realisasi Anggaran Penyelenggaraan Urusan Wajib**  
**Yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

No	Urusan / Perangkat Daerah	Alokasi Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5
	<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>	<b>200,497,755,696</b>	<b>195,765,139,543</b>	<b>97,64</b>
1	<b>Urusan Tenaga Kerja</b>	<b>7.076.324.837</b>	<b>6.894.345.106</b>	<b>97,43</b>
	Dinas Tenaga Kerja	7.076.324.837	6.894.345.106	97,43
2	<b>Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak</b>	<b>1.490.440.000</b>	<b>1.467.342.765</b>	<b>98,45</b>
	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.490.440.000	1.467.342.765	98,45
3	<b>Urusan Pangan</b>	<b>15.936.691.102</b>	<b>15.834.404.297</b>	<b>99,36</b>
	Dinas Ketahanan Pangan	5.936.691.102	15.834.404.297	99,36
4	<b>Urusan Pertanahan</b>	<b>61.340.100</b>	<b>57.793.350</b>	<b>94,22</b>
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	61.340.100	57.793.350	94,22
5	<b>Urusan Lingkungan Hidup</b>	<b>37.018.512.546</b>	<b>36.633.164.497</b>	<b>98,96</b>
	Dinas Lingkungan Hidup	37.018.512.546	36.633.164.497	98,96
6	<b>Urusan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil</b>	<b>10.342.821.434</b>	<b>10.219.033.366</b>	<b>98,80</b>
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.342.821.434	10.219.033.366	98,80
7	<b>Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana</b>	<b>15.739.329.498</b>	<b>13.682.825.229</b>	<b>86,93</b>
	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	15.739.329.498	13.682.825.229	86,93
8	<b>Urusan Perhubungan</b>	<b>45.923.556.600</b>	<b>45.355.594.640</b>	<b>98,76</b>
	Dinas Perhubungan	45.923.556.600	45.355.594.640	98,76
9	<b>Urusan komunikasi dan informatika</b>	<b>17.224.072.440</b>	<b>17.126.218.249</b>	<b>99,43</b>
	Dinas Komunikasi dan Informatika	17.224.072.440	17.126.218.249	99,43
10	<b>Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah;</b>	<b>12.876.129.410</b>	<b>12.750.154.701</b>	<b>99,02</b>
	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,	12.876.129.410	12.750.154.701	99,02
11	<b>Urusan Penanaman Modal</b>	<b>8,372,817,183</b>	<b>7,985,727,834</b>	<b>95,38</b>
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	8,372,817,183	7,985,727,834	95,38
12	<b>Urusan kepemudaan dan olah raga</b>	<b>19.996.758.380</b>	<b>19.435.250.309</b>	<b>97,19</b>
	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	19.996.758.380	19.435.250.309	97,19
13	<b>Urusan Statistik</b>	<b>200.000.000</b>	<b>192.984.071</b>	<b>96,49</b>
	Dinas Komunikasi dan Informatika	200.000.000	192.984.071	96,49
14	<b>Urusan Persandian</b>	<b>293.999.900</b>	<b>290.420.784</b>	<b>98,78</b>
	Dinas Komunikasi dan Informatika	293.999.900	290.420.784	98,78
15	<b>Urusan kebudayaan</b>	<b>1.412.095.000</b>	<b>1.407.374.072</b>	<b>99,67</b>



No	Urusan / Perangkat Daerah	Alokasi Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5
	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	1.412.095.000	1.407.374.072	99,67
<b>16</b>	<b>Urusan perpustakaan</b>	<b>6.161.993.266</b>	<b>6.089.265.336</b>	<b>98,82</b>
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	6.161.993.266	6.089.265.336	98,82
<b>17</b>	<b>Urusan Kearsipan</b>	<b>370.874.000</b>	<b>343.240.937</b>	<b>92,55</b>
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	370.874.000	343.240.937	92,55

Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, 2023

### (c) Urusan Pilihan

**Tabel 1.15.**  
**Pagu Dan Realisasi Anggaran Penyelenggaraan Urusan Pilihan**

No	Urusan	Pagu Anggaran	Realisasi	
		(Rp.)	Keu (Rp)	%
1	2	3	4	
	<b>URUSAN PILIHAN</b>	<b>42.544.353.566</b>	<b>40.328.413.186</b>	<b>94,79</b>
<b>1</b>	<b>Urusan KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>6.481.500.000</b>	<b>6.349.895.486</b>	<b>97,97</b>
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	6.481.500.000	6.349.895.486	97,97
<b>2</b>	<b>Urusan Pariwisata</b>	<b>4.430.001.000</b>	<b>4.298.929.672</b>	<b>97,04</b>
	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	4.430.001.000	4.298.929.672	97,04
<b>3</b>	<b>Urusan Pertanian</b>	<b>19.440.899.616</b>	<b>18.936.972.507</b>	<b>97,41</b>
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	19.440.899.616	18.936.972.507	97,41
<b>4</b>	<b>Urusan Perdagangan</b>	<b>6.483.847.950</b>	<b>5.413.887.587</b>	<b>83,50</b>
	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	6.483.847.950	5.413.887.587	83,50
<b>5</b>	<b>Urusan Perindustrian</b>	<b>5.708.105.000</b>	<b>5.328.727.934</b>	<b>93,35</b>
	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	5.708.105.000	5.328.727.934	93,35

Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, 2023

**(d) Pelaksanaan Urusan Fungsi Penunjang Pemerintahan**

**Tabel 1.17**  
**Pagu Dan Realisasi Anggaran Penyelenggaraan Urusan Fungsi Penunjang Pemerintahan**

No	Urusan	Pagu Anggaran	Realisasi	
		(Rp.)	(Rp)	%
1	2	3	4	5
	<b>Urusan Fungsi Penunjang Pemerintahan</b>	<b>97.973.127.513</b>	<b>92.265.824.648</b>	<b>94,17</b>
1	<b>Perencanaan</b>	<b>14.038.004.685</b>	<b>13.648.476.146</b>	<b>97,23</b>
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	14.038.004.685	13.648.476.146	97,23
2	<b>Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	<b>900.000.000</b>	<b>881.712.867</b>	<b>97,97</b>
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	900.000.000	881.712.867	97,97
3	<b>Keuangan</b>	<b>50.371.759.443</b>	<b>45.967.949.115</b>	<b>91,26</b>
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	29.400.275.428	26.603.469.058	90,49
	Badan Pendapatan Daerah	20.971.484.015	19.364.480.057	92,34
4	<b>Pengawasan</b>	<b>15.814.046.043</b>	<b>15.570.245.257</b>	<b>98,46</b>
	Inspektorat Daerah	15.814.046.043	15.570.245.257	98,46
5	<b>Kepegawaian</b>	<b>16.849.317.342</b>	<b>16.197.441.263</b>	<b>96,13</b>
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	16.849.317.342	16.197.441.263	96,13

Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, 2023

**(e) Urusan Fungsi Penunjang Pemerintahan**

**Tabel 1.18**  
**Pagu Dan Realisasi Anggaran Penyelenggaraan Urusan Fungsi Penunjang Pemerintahan**

NO	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Rp	Rp	%
1	2	3	4	5
	<b>Urusan Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan</b>	<b>270.514.329.241</b>	<b>265.773.545.767</b>	<b>98,25</b>
1	Sekretariat Daerah	85.212.236.054	83.731.501.247	98,26
2	Sekretariat DPRD	71341284280	68807725561	96,45
3	Kecamatan Cihideung	9.784.523.538	9.720.628.200	99,35
4	Kecamatan Cipedes	8.926.453.750	8.856.834.625	99,22
5	Kecamatan Tawang	9276475636	9222485231	99,42
6	Kecamatan Indihiang	10.522.254.522	10.432.384.706	99,15
7	Kecamatan Kawalu	14.090.716.464	13.988.356.646,00	99,27

NO	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Rp	Rp	%
1	2	3	4	5
8	Kecamatan Cibeureum	14.085.002.534	14.009.925.657,00	99,47
9	Kecamatan Tamansari	12.224.060.809	12.158.300.030	99,46
10	Kecamatan Mangkubumi	12.359.318.600	12.288.600.736	99,43
11	Kecamatan Bungursari	12503879118	12426496601	99,38
12	Kecamatan Purbaratu	10.188.123.936	10.130.306.527	99,43

Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, 2023

## 1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

### a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah dan stakeholder lainnya.

Secara umum permasalahan pembangunan daerah dapat dikelompokkan pada :

#### 1. Kemiskinan dan permasalahan sosial

Angka Kemiskinan pada tahun 2018-2021 di Kota Tasikmalaya menunjukkan penurunan sampai dengan tahun 2019. Namun memasuki tahun 2020, kondisi memburuk dengan adanya pandemi COVID-19 yang berkepanjangan sehingga pada tahun 2020 dan tahun 2021 kemiskinan mengalami kenaikan yaitu pada angka 12,97 persen dan 13,13 persen.

Kemiskinan ini disebabkan diantaranya oleh masih rendahnya akses terhadap pelayanan dasar, akses ekonomi, sanitasi dan pola hidup masyarakat serta rendahnya daya beli masyarakat sehingga

tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Kemiskinan berkaitan erat dengan kesempatan kerja dan berusaha serta tingkat pengangguran terbuka yang mengalami kenaikan sebagai dampak dari pandemi Covid 19.

Selain kemiskinan, permasalahan sosial lainnya diantaranya masih banyaknya anak jalanan, wanita rawan sosial ekonomi, lanjut usia terlantar, korban penyalahgunaan Napza, dan keluarga berumah tak layak huni.

## **2. Kualitas Sumber Daya Manusia**

Jumlah penduduk Kota Tasikmalaya yang mencapai 716.155 jiwa menunjukkan adanya potensi yang besar dalam pengembangan SDM. Peningkatan kualitas manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat Kota Tasikmalaya mampu bersaing secara regional, dan nasional. Namun saat ini masih terkendala dengan beberapa permasalahan terkait perkembangan SDM antara lain belum optimalnya pelayanan pendidikan yang ditunjukkan oleh capaian rata-rata lama sekolah yang baru mencapai 9,52 tahun dan harapan lama sekolah yang baru mencapai 13,46 tahun.

Selain permasalahan pelayanan pendidikan, permasalahan pelayanan kesehatan di Kota Tasikmalaya pada saat ini menunjukkan belum optimalnya pelayanan kesehatan yang ditandai dengan indeks kesehatan yang masih perlu ditingkatkan, masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang masih tinggi. Hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi yang tidak merata, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat, serta kinerja pelayanan kesehatan yang rendah. Disamping itu, permasalahan gizi kurang di masyarakat cenderung masih tinggi yang ditunjukkan dengan masih tingginya prevalensi stunting.

Pemberdayaan perempuan di Kota Tasikmalaya saat ini masih perlu ditingkatkan. Peran aktif perempuan dalam sektor ekonomi,

politik, hukum, dan sosial diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan. Penguatan industri rumahan dan UKM bagi perempuan memiliki peran positif terhadap perbaikan indikator ketenagakerjaan perempuan. Dari perspektif pembangunan, strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan berkelanjutan perlu dioptimalisasi guna mengetahui permasalahan kesenjangan di Kota Tasikmalaya sebagai landasan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan daya saing perempuan Kota Tasikmalaya.

Pembangunan dalam bidang kepemudaan, olahraga dan kebudayaan masih kurang optimal. Prestasi bidang kepemudaan dan olahraga baik ditingkat Provinsi maupun nasional masih kurang optimal, selain itu ketersediaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga yang masih kurang serta sarana dan prasarana kebudayaan seperti gedung kesenian dan kegiatan seni budaya masih sedikit.

Sebagai sebuah kota yang cukup heterogen, kerukunan hidup masyarakat menjadi permasalahan yang harus diperhatikan sehingga tercipta masyarakat yang dapat hidup berdampingan dengan damai yang ditunjang oleh keamanan dan keteriban umum sehingga dapat tercipta masyarakat yang aman dan tertib.

### **3. Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya mengalami perlambatan selama beberapa tahun terakhir. Dengan adanya pandemi COVID-19, maka semakin berdampak terhadap perekonomian Kota Tasikmalaya. Hal ini ditandai dengan terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yaitu sebesar -2,01 persen.

Beberapa permasalahan perekonomian Kota Tasikmalaya diantaranya belum optimalnya perkembangan UMKM, khususnya pada akses permodalan, pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi berbasis digital literacy, belum meratanya penerapan standar produk usaha mikro dan kecil. Belum optimalnya

fungsi dan kelembagaan koperasi yang ditunjukkan dengan masih cukup tingginya persentase jumlah koperasi tidak aktif.

Belum optimalnya iklim penanaman modal yang disebabkan oleh belum optimalnya pelayanan perijinan, ketersediaan dan kualitas infrastruktur penunjang investasi belum merata, dinamika sosial mempengaruhi kepastian dan keamanan berusaha, belum optimalnya serapan tenaga kerja lokal.

Pada sektor pertanian terjadi beberapa permasalahan yang ditandai dengan masih rendahnya produktivitas komoditas pertanian, terganggunya ekosistem pertanian dan menurunnya luas lahan pertanian. Hal tersebut disebabkan oleh intensitas pembangunan sektor non-pertanian sangat tinggi, rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian, serta rendahnya regenerasi petani dan rendahnya akses permodalan dan akses pasar, SDM petani masih terbatas, teknologi digital belum banyak digunakan di sektor pertanian kota Tasikmalaya.

Sementara pada sektor perdagangan terdapat beberapa permasalahan yang ditandai oleh kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok, distribusi dan sarana prasarana perdagangan.

Lebih lanjut, pada sektor industri ditemui masalah pokok yaitu masih rendahnya pertumbuhan sektor industri. Hal tersebut disebabkan oleh produk industri memiliki daya saing rendah akibat biaya ekonomi tinggi. Kondisi ini dipicu oleh infrastruktur kawasan industri belum terintegrasi yang mengakibatkan tingginya biaya logistik, peranan IKM masih kecil dalam rantai pasok industri, dan belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan bersertifikasi.

#### **4. Infrastruktur dan penataan ruang**

Meskipun pembangunan infrastruktur di Kota Tasikmalaya pada periode sebelumnya telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, namun pembangunan infrastruktur masih perlu dilaksanakan terutama dalam mendukung infrastruktur sanitasi, air minum, pengelolaan limbah



dan pengelolaan sampah dari hulu sampai ke hilir secara komprehensif. Selain itu, pembangunan infrastruktur lanjutan periode sebelumnya mendapatkan prioritas untuk dilaksanakan seperti penyelesaian lingkaran utara Kota Tasikmalaya.

Penataan ruang di Kota Tasikmalaya untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang telah sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan perencanaan penataan ruang. Seiring dengan perkembangan pembangunan dan penyesuaian regulasi penataan ruang, perlu adanya penyesuaian rencana tata ruang dan wilayah yang saat ini sedang dalam tahap penyusunan.

Dalam proses pembangunan, lingkungan hidup berperan sangat penting dalam kelangsungan kehidupan manusia dan pemanfaatannya seharusnya berjalan dengan seimbang dengan pembangunan, sehingga pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah pengendalian pencemaran dan penanganan kerusakan lingkungan, masih terbatasnya taman kehati dan perlindungan kawasan lindung serta proposi Ruang Terbuka Hijau di Kota Tasikmalaya.

## **5. Reformasi Birokrasi**

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Tasikmalaya masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian terutama dalam pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi yaitu : manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan organisasi, penataan SDM aparatur, Deregulasi kebijakan, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, dan peningkatan pelayanan publik.

Beberapa permasalahan yang dihadapi antarlain masih perlu ditingkatkan profesionalisme aparatur, dan belum optimalnya pengelolaan aset/kekayaan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain itu dengan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi memberikan dampak dalam pengelolaan kepegawaian baik pengembangan karir maupun pembiayaannya.

## **b. Visi Dan Misi Kepala Daerah**

Mengacu kepada visi misi serta program prioritas yang dikampanyekan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih periode 2017-2022 dan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran untuk pembangunan jangka menengah daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 -2022.

### **1) VISI**

Visi dapat diartikan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus mampu menjawab permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Visi yang dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun kedepan untuk periode tahun 2017-2022 adalah :

#### ***“KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI”***

Visi tersebut mengandung makna :

**Religius** : suatu kondisi, sikap dan perilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang mempunyai kedalaman penghayatan, pengamalan keagamaan dan keyakinannya terhadap Allah, Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangan-Nya dengan keikhlasan hati dan dengan seluruh jiwa raga serta memperhatikan tata nilai dan norma serta kearifan lokal.

**Maju** : suatu kondisi, sikap dan perilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang kreatif, produktif, inovatif, dan berdaya saing, disiplin, berpendidikan tinggi, sehat lahir dan batin, dapat menjaga tatanan sosial masyarakat dengan toleran, bergotong royong, rasional, arif, adaptif dan responsif terhadap

dinamika perubahan serta ditunjang oleh infrastruktur dasar perkotaan yang memadai, nyaman, bersih dan berwawasan lingkungan

Madani : suatu kondisi, sikap dan prilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang sejahtera, maju, beradab dalam membangun, menjalani, dan mamaknai kehidupannya, menjunjung tinggi etika dan moralitas, taat hukum dan demokratis.

Dari penjabaran makna visi di atas, secara umum visi tersebut mengandung makna bahwa seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya berkeinginan untuk mencapai suatu kondisi, sikap dan prilaku yang mempunyai kedalaman penghayatan, pengamalan keagamaan dan keyakinannya terhadap Alloh SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang diwujudkan dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangan-Nya, dengan keikhlasan hati dan seluruh jiwa raga serta memperhatikan tata nilai, norma dan kearifan lokal, mempunyai sikap disiplin, produktif, inovatif, dan berdaya saing, berpendidikan tinggi, sehat, dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, bergotong royong, rasional, arif, adaptif dan responsif terhadap dinamika perubahan, beradab dalam membangun, menjunjung tinggi etika dan moralitas, taat hukum dan demokratis. Sehingga terwujud kehidupan yang sejahtera secara lahir dan batin, memperoleh ketenangan, aman, damai dan makmur dalam menjalani kehidupannya yang ditunjang oleh pelayanan dan infrastruktur dasar perkotaan yang baik, memadai, nyaman, bersih dan berwawasan lingkungan.

Dengan adanya penetapan visi ini, diharapkan seluruh stakeholder dan komponen yang ada di Kota Tasikmalaya dapat bekerja sama bahu-membahu untuk memaksimalkan seluruh potensi dan kapasitas yang dimilikinya, agar visi tersebut dapat kita capai dan wujudkan.

## 2) MISI

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Rumusan misi dapat memberikan gambaran dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi melalui penetapan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai.

Adapun misi dalam upaya pencapaian visi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal;
2. Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat;
3. Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
4. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Penjelasan dari misi tersebut adalah sebagai berikut :

**Misi ke-1 : Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal**

Misi ini dimaksudkan bahwa masyarakat Kota Tasikmalaya adalah masyarakat religius yang senantiasa menjunjung tinggi harkat, martabat dan kemuliaan serta berpegang teguh pada tata nilai, norma, moral dan agama serta memiliki akhlak dan karakter yang baik dan mulia. Menjaga dan memelihara kearifan lokal dan kebudayaan daerah yang baik dan luhur.

**Misi ke-2 : Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat**

Misi ini dimaksudkan untuk terus mendorong upaya penanggulangan kemiskinan dengan memberikan fasilitasi, pendampingan dan penguatan yang terus menerus kepada

masyarakat miskin, meningkatkan jaminan dan perlindungan sosial sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Memperkuat kondisi perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, mengendalikan inflasi dan mengurangi kesenjangan, pengurangan pengangguran memperkuat daya saing pelaku usaha mikro dan kecil dalam rangka penguatan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis kekuatan dan potensi lokal, peningkatan sarana prasarana perekonomian, membuka investasi dan lapangan kerja serta kesempatan berusaha, peningkatan akses untuk permodalan dan pemasaran, sehingga kondisi perekonomian dan daya beli serta daya saing masyarakat meningkat, tumbuh dan merata.

**Misi ke-3 : Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan**

Misi ini dimaksudkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar perkotaan harus berkembang, merata dan berkelanjutan diseluruh wilayah, menyediakan infrastruktur publik yang representatif, aman, nyaman sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), ramah terhadap lingkungan, anak, disabilitas dan lansia. Infrastruktur yang mampu menunjang terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi terutama pada sentra – sentra industri kecil dan menengah, pusat perdagangan dan jasa, dengan tidak meninggalkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta didukung oleh formulasi dan sesuai dengan penataan ruang yang baik.

**Misi ke-4 :Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia**

Misi ini dimaksudkan bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu ditunjang

oleh upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, terpenuhinya pelayanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui pendekatan keluarga yang kuat, bahagia dan sejahtera terutama dalam urusan pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal.

**Misi ke-5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih**

Misi ini dimaksudkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur, pengelolaan keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik yang didukung oleh sarana bangunan kantor dan prasarana pemerintahan yang representatif, serta pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi.

**3) Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah dan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* dan *impact* program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

**Misi ke-1 : Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal**

Misi ke-1 mempunyai 2 tujuan dan 2 sasaran, yaitu :

T1. Terwujudnya tata nilai kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan religius, dengan sasaran :

- S1. Meningkatnya kerukunan dan karakter masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- T2. Terwujudnya pelestarian kebudayaan daerah, dengan sasaran :
- S2. Meningkatnya apresiasi terhadap kesenian dan kebudayaan daerah.

**Misi ke-2 : Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat**

Misi ke-2 mempunyai 2 tujuan dan 4 sasaran, yaitu :

- T.3. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat, dengan sasaran:
- S3. Meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial serta pemberdayaan masyarakat.
- T.4. Menguatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, dengan sasaran :
- S4. Meningkatnya peranan koperasi, usaha mikro kecil, industri perdagangan dan jasa;
- S5. Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan berusaha;
- S6. Meningkatnya pertanian dan ketahanan pangan daerah.

**Misi ke-3 : Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan**

Misi ke-3 mempunyai 1 tujuan dan 3 sasaran, yaitu :

- T5. Tersedianya infrastruktur dasar perkotaan yang berkualitas, aman, nyaman, inklusif dan berkelanjutan, dengan sasaran :
- S7. Meningkatnya layanan infratraktur jalan yang mantap, aman, nyaman dan inklusif;
- S8. Meningkatnya kualitas permukiman dan lingkungan yang nyaman dan sehat;
- S9. Meningkatnya pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan sesuai tata ruang wilayah.

**Misi ke-4 : Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia**

Misi ke-4 mempunyai 2 tujuan dan 3 sasaran, yaitu :

- T6. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, dengan sasaran :
  - S10. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan;
  - S11. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
  - S12. Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga;
  - S13. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- T7. Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan pengendalian penduduk, dengan sasaran :
  - S14. Meningkatnya pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender.

**Misi ke-5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih**

Misi ke-5 mempunyai 1 tujuan dan 2 sasaran, yaitu :

- T8. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi, dengan sasaran :
  - S15. Meningkatnya kualitas Pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
  - S16. Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah.

**c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah**

Program pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 ditujukan untuk menjawab isu-isu strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut merupakan daftar program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah :



**Tabel 1.19.**  
**Program Pembangunan Daerah dalam RPJMD dengan Program Operasional pada Perangkat Daerah**

No.	Program Pembangunan Daerah	Program Perangkat Daerah
1	Program Maghrib Mengaji	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2	Program Tasik Berkarakter	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</li><li>2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</li><li>3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</li><li>4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</li><li>5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</li><li>6. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</li><li>7. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum</li></ol>
3	Program Tasik Berbudaya	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Pengembangan Kebudayaan</li><li>2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional</li><li>3. Program Pembinaan Sejarah</li><li>4. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya</li><li>5. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</li></ol>
4	Program Jaminan dan Perlindungan Sosial Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Pemberdayaan Sosial</li><li>2. Program Rehabilitasi Sosial</li><li>3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</li><li>4. Program Penanganan Bencana</li><li>5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</li><li>6. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li></ol>
5	Program Tasik Bersedekah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</li><li>2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum</li></ol>
6	Program Gema Madani	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
7	Program Peningkatan Pendapatan Keluarga Berbasis Komunitas (P3KK)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Rehabilitasi Sosial</li><li>2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</li><li>3. Program Penyuluhan Pertanian</li><li>4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)</li></ol>



No.	Program Pembangunan Daerah	Program Perangkat Daerah
8	Program Peningkatan Kapasitas Ekonomi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam</li><li>2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</li><li>3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</li><li>4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</li><li>5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</li><li>6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)</li><li>7. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan</li><li>8. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</li><li>9. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</li><li>10. Program Pengembangan Ekspor</li><li>11. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen</li><li>12. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</li><li>13. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</li><li>14. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota</li><li>15. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</li><li>16. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</li><li>17. Program Promosi Penanaman Modal</li><li>18. Program Pelayanan Penanaman Modal</li><li>19. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</li><li>20. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</li><li>21. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</li><li>22. Program Pemasaran Pariwisata</li><li>23. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</li><li>24. Program Perekonomian dan Pembangunan</li></ol>
9	Program Pencetakan Wirausaha baru	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Pengembangan UMKM Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri</li><li>2. Program Penyuluhan Pertanian</li><li>3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</li><li>4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</li><li>5. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</li><li>6. Program Perekonomian dan Pembangunan</li><li>7. Program Pengelolaan Pendidikan</li></ol>



No.	Program Pembangunan Daerah	Program Perangkat Daerah
10	Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</li><li>2. Program Penempatan Tenaga Kerja</li><li>3. Program Hubungan Industrial</li><li>4. Program Pengelolaan Pendidikan</li></ol>
11	Program Peningkatan Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk</li><li>2. Kedaulatan dan Kemandirian Pangan</li><li>3. Program Peningkatan</li><li>4. Diversifikasi dan Ketahanan</li><li>5. Pangan Masyarakat</li><li>6. Program Penanganan Kerawanan</li><li>7. Pangan</li><li>8. Program Pengawasan Keamanan</li><li>9. Pangan</li><li>10. Program Penyediaan dan</li><li>11. Pengembangan Sarana Pertanian</li><li>12. Program Penyediaan dan</li><li>13. Pengembangan Prasarana</li><li>14. Pertanian</li><li>15. Program Pengendalian Kesehatan</li><li>16. Hewan dan Kesehatan</li><li>17. Masyarakat Veteriner</li><li>18. Program Penyuluhan Pertanian</li><li>19. Program Pengelolaan Perikanan</li><li>20. Budidaya</li><li>21. Program Pengolahan dan</li><li>22. Pemasaran Hasil Perikanan</li></ol>
12	Program Pemantapan Infrastruktur Dasar Perkotaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Pengelolaan Sumber</li><li>2. Daya Air (SDA)</li><li>3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</li><li>4. Program Penyelenggaraan Jalan</li><li>5. Program Pengembangan Jasa</li><li>6. Konstruksi</li><li>7. Program Penyelenggaraan</li><li>8. Penataan Ruang</li><li>9. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan (RTBL)</li><li>10. Program Pengembangan Jasa Konstruksi</li><li>11. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</li></ol>



No.	Program Pembangunan Daerah	Program Perangkat Daerah
13	Program Gema Manasik (Gerakan Bersama Menata Kota Tasikmalaya)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</li><li>2. Program Pengembangan Permukiman</li><li>3. Program Pengembangan Perumahan</li><li>4. Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh</li><li>5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</li><li>6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</li><li>7. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</li><li>8. Program Penatagunaan Tanah</li><li>9. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)</li></ol>
14	Program Tasik Resik	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup</li><li>2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</li><li>3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)</li><li>4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</li><li>5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan hidup untuk Masyarakat</li><li>6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</li><li>7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</li><li>8. Program Pengelolaan Persampahan</li></ol>
15	Program Tasik Cerdas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Pengelolaan Pendidikan</li><li>2. Program Pengembangan Kurikulum</li><li>3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li><li>4. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra</li><li>5. Program Pembinaan Perpustakaan</li><li>6. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno</li></ol>
16	Program Tasik Sehat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li><li>2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</li><li>3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman</li><li>4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</li><li>5. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li></ol>
17	Program Tasik Muda Berprestasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</li><li>2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</li></ol>



No.	Program Pembangunan Daerah	Program Perangkat Daerah
18	Program Tasik Siaga (Siap Aman Terjaga)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum</li><li>2. Program Kebakaran</li><li>3. Program Penanggulangan Bencana</li><li>4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</li></ol>
19	Program Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Pengendalian Penduduk</li><li>2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</li><li>3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</li><li>4. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</li><li>5. Program Perlindungan Perempuan</li><li>6. Program Peningkatan Kualitas Keluarga</li><li>7. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</li><li>8. Program Perlindungan Khusus Anak</li></ol>



No.	Program Pembangunan Daerah	Program Perangkat Daerah
20	Program Tasik Layanan Prima (Profesional, Inovatif dan Memuaskan)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Pembangunan/ Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara</li><li>2. Program Pendaftaran Penduduk</li><li>3. Program Pencatatan Sipil</li><li>4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</li><li>5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan</li><li>6. Program Informasi dan Komunikasi/Publik</li><li>7. Program Aplikasi Informatika</li><li>8. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor</li><li>9. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi</li><li>10. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</li><li>11. Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</li><li>12. Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam</li><li>13. Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan</li><li>14. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</li><li>15. Program Pengelolaan Arsip</li><li>16. Program Penyelenggaraan Pengawasan</li><li>17. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</li><li>18. Program Administrasi Umum</li><li>19. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</li><li>20. Program Perekonomian dan Pembangunan</li><li>21. Program Layanan dan Administrasi Keuangan</li><li>22. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</li><li>23. Program Pengelolaan Keuangan Daerah</li><li>24. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</li><li>25. Program Layanan dan Administrasi Keuangan</li><li>26. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</li><li>27. Program Kepegawaian Daerah</li><li>28. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</li><li>29. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</li><li>30. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</li><li>31. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</li></ol>
21	Program Peningkatan Kinerja Keuangan dan Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

#### **d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.**

Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menggunakan 201 program pembangunan daerah yang tertuang di RPJMD Tahun 2017-2022 diturunkan atau didukung dengan kegiatan masing-masing perangkat daerah berdasarkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 10 tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2022 terdiri dari 648 kegiatan. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut merupakan daftar kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan, sebagai berikut:

##### **URUSAN PENDIDIKAN**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Penataan Organisasi
10. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
11. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
12. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
13. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
14. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
15. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
16. Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

##### **URUSAN KESEHATAN**

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Peningkatan Pelayanan BLUD
10. Penataan Organisasi
11. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
12. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
13. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
14. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
15. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
16. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
17. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
18. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
19. Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga
20. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
21. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
22. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan



23. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
24. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
25. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
26. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

### **URUSAN PEKERJAAAN UMUM**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
10. Penataan Organisasi
11. Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (Ws) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
12. Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
13. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota
14. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota
15. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota

16. Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman Di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
17. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
18. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
19. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
20. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
21. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Dan Rencana Rinci Tata Ruang (Rrtr) Kabupaten/Kota
22. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
23. Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
24. Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

#### **URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
9. Penataan Organisasi
10. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

11. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
12. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
13. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
14. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

## **URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

### **I SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
10. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
11. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

### **II BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Penataan Organisasi
10. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
11. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
12. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
13. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

### **URUSAN SOSIAL**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Penataan Organisasi
9. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
10. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
11. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
12. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
13. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
14. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

## 15. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

### DINAS TENAGA KERJA

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan

### SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

### Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada

### SKPD

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/Material



- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pengadaan Mebel
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
  - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
  - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
  - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
  - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
  - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
  - Job Fair/Bursa Kerja
- Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

- Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
- Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
- Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
- Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
- Penataan Organisasi
- Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

#### DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah





- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
- Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
- Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
- Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
- Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
- Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
- Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
- Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
- Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
- Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
- Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
- Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
- Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
- Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
- Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
- Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
- Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
- Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
- Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
- Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
- Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
- Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman

- Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
- Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
- Pengembangan Prasarana Pertanian
- Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
- Pembangunan Prasarana Pertanian
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya
- Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
- Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
- Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
- Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
- Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
- Pembangunan Prasarana Pertanian
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan
- Penataan Organisasi
- Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
- Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

- Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

#### DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

#### Realisasi Kinerja SKPD

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

#### Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada

#### SKPD

- Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah

- Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
- Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
- Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
- Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
- Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
- Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Sampah
- Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
- Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
- Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
- Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
- Penataan Organisasi
- Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
- Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

#### DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
- Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
- Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
- Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
- Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
- Fasilitasi Pendaftaran Penduduk
- Pelayanan Pencatatan Sipil
- Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
- Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan



- Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan
- Penataan Organisasi
- Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
- Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
- Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
- Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan
- Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pepaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk



- Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal
- Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
- Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
- Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
- Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
- Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
- Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
- Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
- Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
- Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
- Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
- Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
- Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
- Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan
- Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
- Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
- Pembinaan Terpadu Kampung KB

- Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- Penataan Organisasi
- Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

#### DINAS PERHUBUNGAN

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- #### SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
  - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah



- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

- Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

- Pengadaan Mebel
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Mebel

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
- Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
- Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
- Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
- Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
- Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
- Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
- Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
- Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C
- Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
- Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
- Penataan Organisasi
- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

#### DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD





- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Pelayanan Informasi Publik
- Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
- Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
- Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
- Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
- Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Penataan Organisasi
- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

#### DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
  - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Penyediaan Bahan/Material
  - Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pengadaan Mebel
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
- Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

- Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
- Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
- Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
- Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
- Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
- Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
- Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
- Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil
- Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

- Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Penerbitan Tanda Daftar Gudang
- Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
- Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri
- Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik
- Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
- Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)
- Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)
- Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
- Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
- Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
- Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
- Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
- Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
- Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota



- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
- Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
- Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
- Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
  - Pameran Dagang Nasional
  - Pameran Dagang Lokal
  - Peningkatan Citra Produk Ekspor
  - Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
- Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
  - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
  - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
  - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
  - Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
  - Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
- Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
  - Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang
  - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan



- Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
- Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
- Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
- Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Inform
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
- Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
- Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas
- Penataan Organisasi
- Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

- Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

#### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
- Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
- Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Penataan Organisasi
- Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

#### DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pengadaan Mebel
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Mebel
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



- Penysadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
- Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
- Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
- Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota
- Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
- Pengembangan Organisasi Keolahragaan
- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
- Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi
- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
- Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
- Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
- Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
- Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah
- Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
- Pelindungan Cagar Budaya
- Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
- Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
- Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
- Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
- Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
- Penataan Organisasi
- Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi



- Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

#### DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
- Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
- Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
- Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
- Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
- Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
- Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
- Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota

- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
- Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
- Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
- Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
- Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
- Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
- Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
- Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN
- Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
- Penataan Organisasi
- Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

#### SEKRETARIAT DAERAH

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
- Penataan Organisasi
- Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
- Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

- Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
  - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
  - Fasilitasi Keprotokolan
  - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
  - Pendokumentasian Tugas Pimpinan
  - Administrasi Tata Pemerintahan
  - Penataan Administrasi Pemerintahan
  - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
  - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
  - Fasilitasi Kerjasama Daerah
  - Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
  - Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
  - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
  - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
  - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
  - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
  - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
    - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
    - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
    - Fasilitasi Bantuan Hukum
    - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
    - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
    - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
    - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
    - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
    - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
    - Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan

- Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
- Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
- Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

#### SEKRETARIAT DPRD

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

#### Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada

#### SKPD

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Pemulangan Pegawai yang Pensiun
- Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

#### Daerah

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

#### Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Penataan Organisasi
- Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan

#### Tata Laksana

- Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
- Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan

#### Daerah

- Pembahasan Rancangan Perda



- Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
- Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik
- Pembahasan Kebijakan Anggaran
- Pembahasan KUA dan PPAS
- Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- Pembahasan APBD
- Pembahasan APBD Perubahan
- Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
- Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
- Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
- Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
- Pengawasan Penggunaan Anggaran
- Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
- Peningkatan Kapasitas DPRD
- Bimbingan Teknis DPRD
- Publikasi dan Dokumentasi Dewan
- Penyusunan Program Kerja DPRD
- Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
- Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
- Pelaksanaan Reses
- Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
- Penyusunan Kode Etik DPRD
- Pengawasan Kode Etik DPRD
- Fasilitasi Tugas DPRD
- Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
- Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

- Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
- Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
- Layanan Administrasi DPRD
- Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

#### INSPEKTORAT

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

#### Realisasi Kinerja SKPD

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

#### Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada

#### SKPD

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Penyelenggaraan Pengawasan Internal
- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
- Reviu Laporan Kinerja
- Reviu Laporan Keuangan
- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
- Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
- Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
- Pendampingan dan Asistensi
- Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
- Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

#### BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

- Penataan Organisasi
- Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD



- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
- Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
- Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
- Pelaksanaan Konsultasi Publik
- Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
- Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
- Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
- Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
- Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
- Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
- Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
- Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
- Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial
- Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan
- Pengembangan Inovasi dan Teknologi
- Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
- Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif
- Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

#### BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
- Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
- Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
- Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
- Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

- Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
- Penatausahaan Pembiayaan Daerah
- Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
- Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
- Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
- Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
- Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
- Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
- Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

- Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
- Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi
- Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
- Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Penyusunan Standar Harga
- Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- Penatausahaan Barang Milik Daerah
- Inventarisasi Barang Milik Daerah
- Pengamanan Barang Milik Daerah
- Penilaian Barang Milik Daerah
- Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

#### BADAN PENDAPATAN DAERAH

- Penataan Organisasi
- Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
- Perencanaan pengelolaan pajak daerah
- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
- Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- Penagihan Pajak Daerah
- Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
- Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- Penagihan Pajak Daerah

- Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- Penagihan Pajak Daerah
- Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- Penagihan Pajak Daerah
- Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- Penagihan Pajak Daerah

#### BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

- Penataan Organisasi
- Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya



- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
- Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN





- Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
- Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
- Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
- Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
- Mutasi dan Promosi ASN
- Pengelolaan Mutasi ASN
- Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
- Pengelolaan Promosi ASN
- Pengembangan Kompetensi ASN
- Pengelolaan Assessment Center
- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
- Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
- Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
- Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
- Pembinaan Disiplin ASN
- Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
- Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
- Pengembangan Kompetensi Teknis
- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
- Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
- Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabata

## KECAMATAN CIHIDEUNG

- Penataan Organisasi
- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan



- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

KECAMATAN CIPEDES

- Penataan Organisasi
- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan



- Penyediaan Bahan/Material
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
- Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah



- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan



- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

#### KECAMATAN TAWANG

- Penataan Organisasi
- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

- Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pengadaan Mebel
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
  - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
  - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
  - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
  - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

- Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan



- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

#### KECAMATAN INDIHIANG

- Penataan Organisasi
- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya





- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
- Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan



- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan



- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

#### KECAMATAN KAWALU

- Penataan Organisasi
- Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD



- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara
- Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
- Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan



- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan



- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

#### **KECAMATAN CIBEUREUM**

- Penataan Organisasi

- Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional



- Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan



- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal



- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan



- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

#### **KECAMATAN TAMANSARI**

- Penataan Organisasi



- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal



- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan



- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

#### **KECAMATAN MANGKUBUMI**

- Penataan Organisasi
- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah





- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan



- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan



- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan



- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

#### **KECAMATAN BUNGURSARI**

- Penataan Organisasi



- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Mebel

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah



- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan





- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan



- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

### **KECAMATAN PURBARATU**

- Penataan Organisasi
- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan



- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan



- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

#### **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

- Penataan Organisasi
- Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
- Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan
- Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
- Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan
- Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

### **1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada hakekatnya merupakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban

sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan yang menyangkut masyarakat sebagai pelayanan publik tidak luput dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa diper-tanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Pencapaian kinerja pelayanan publik sering kali terkendala akibat adanya variasi dalam penyelenggaraan atau proses pelayanan. Salah satu upaya untuk mengurangi variasi proses tersebut adalah dengan melakukan standarisasi. Salah satu standar pelayanan yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah wajib memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan berpedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, pada Pasal 298 berbunyi bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan SPM. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimaksudkan untuk menjamin hak masyarakat menerima pelayanan dasar dengan mutu tertentu, menjadi salah satu dasar penentuan kebutuhan pembiayaan daerah dan menentukan anggaran berbasis kinerja serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Hal ini kemudian dijabarkan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan acuan bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan SPM dan menjadi pokok-pokok acuan bagi pemerintah daerah dalam penerapan SPM. Kebijakan pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga Negara telah ditetapkan dan selalu dilakukan monitoring secara berkelanjutan berupa penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Hal ini sangat bersinergi dengan kebijakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah yang antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

SPM diterapkan pada urusan wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, Daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja. Salah satu bentuk upaya yang nyata dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang excellent, Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun Standar Pelayanan Minimum (SPM) sesuai dengan urusan wajib yang menjadi tanggung jawabnya dan mewajibkan pemerintah daerah di Indonesia untuk menerapkannya sesuai dengan kondisi potensi dan permasalahan setempat.

Seperti halnya dengan Instansi Pemerintah di Pusat dan di daerah lainnya, Pemerintah Kota Kota Tasikmalaya juga telah berusaha untuk melaksanakan kebijakan mengenai penetapan dan penerapan SPM secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. Terdapat

beberapa peraturan perundangan yang melandasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota.
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagai wujud gambaran orientasi dan komitmen daerah terhadap optimalisasi pencapaian target-target SPM, secara tegas Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Wajib Pemerintah Kota Tasikmalaya yang merupakan implementasi dari PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pencapaian target-target Standar Pelayanan Minimal diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program yang dibuat. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran, sedangkan program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2022 yang sejalan dengan penerapan dan pencapaian SPM adalah Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perluasan pemenuhan pelayanan dasar. Upaya-upaya yang ditempuh dan harus diperkuat mencakup penurunan angka kemiskinan, pengangguran dan peningkatan penciptaan lapangan kerja. Disamping itu peningkatan akses pelayanan pendidikan, kesehatan dan jaminan kesejahteraan sosial.



# BAB II

## CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN DAERAH

- **CAPAIAN KINERJA MAKRO**
- **CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN  
URUSAN PEMERINTAHAN**
- **AKUNTABILITAS KINERJA  
PEMERINTAHAN DAERAH**

## BAB II

### CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### 2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Laporan Kinerja Makro Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 dan Tahun 2022 serta laju kinerja dapat dilihat dalam tabel 2.1. sebagai berikut :

**Tabel 2.1.**  
**Capaian Indikator Kinerja Kunci Makro Tahun 2022**

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2022	LAJU KINERJA 2022 (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	73,31	73,83	0,709
2	Angka Kemiskinan	13,13	12,72	-3,123
3	Angka Pengangguran	7,66	6,62	-13,577
4	Pertumbuhan Ekonomi	3,57	5,01	40,336
5	PDRB Per-Kapita Harga belaku	31,56	34,05	6,25
6	Ketimpangan Pendapatan	0,414	0,405	-2,174

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya, 2022

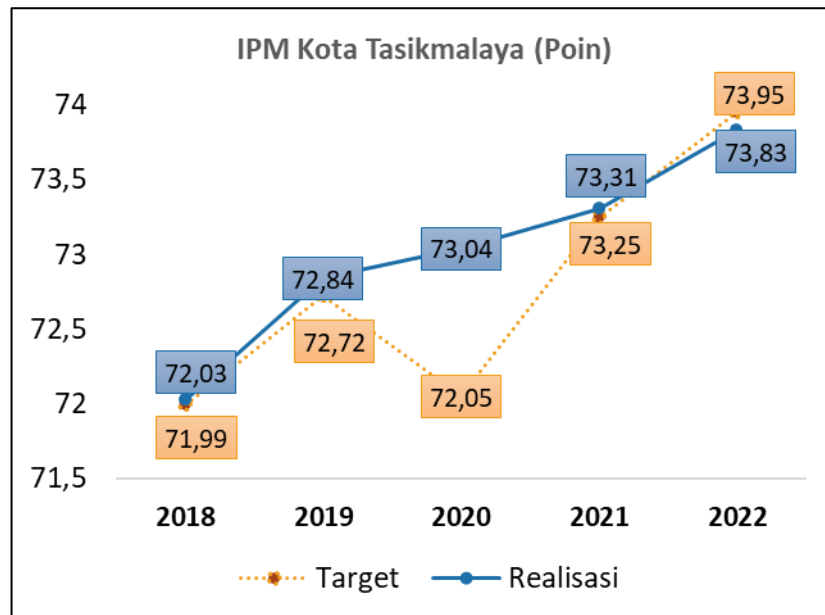
##### 2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu Umur panjang dan hidup sehat, Pengetahuan dan Standar hidup layak.



Capaian IPM Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar berikut:

**Grafik 2.1.**  
**Capaian IPM Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2022**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya, 2022

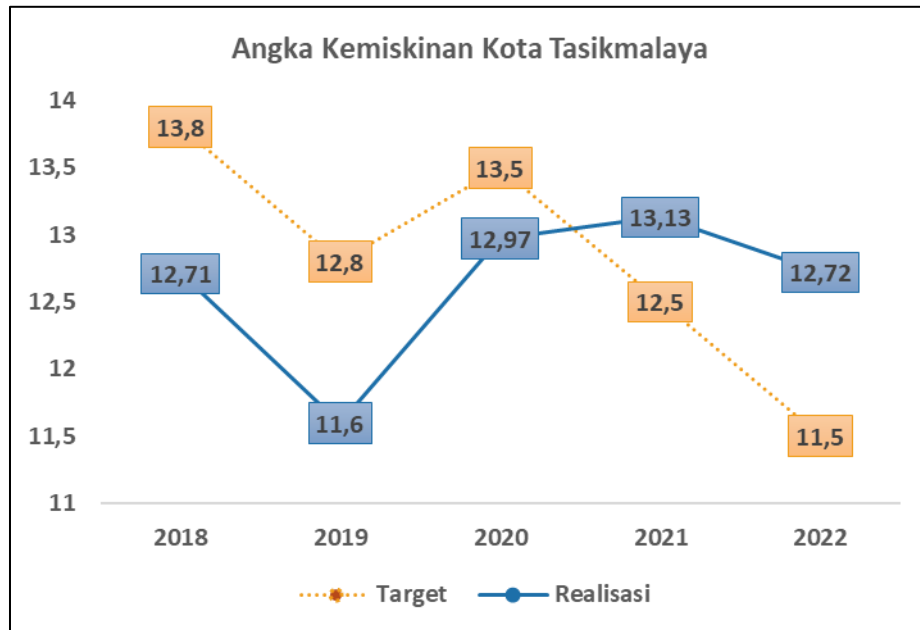
Capaian IPM tahun 2022 mengalami kenaikan dibanding tahun 2021 yaitu 73,31 poin pada tahun 2021 meningkat menjadi 73,83 poin pada tahun 2022.

### 2.1.2 Angka Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (2.100 kilo kalori) dan bukan makanan. Konsep yang dipakai oleh pemerintah (BPS) dan juga beberapa negara lain dalam menentukan kemiskinan adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Penduduk dikatakan miskin jika penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan adalah rupiah yang diperlukan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum yang mencakup pemenuhan kebutuhan minimum akan makanan (2.100 kkal/kapita/hari) dan bukan makanan.

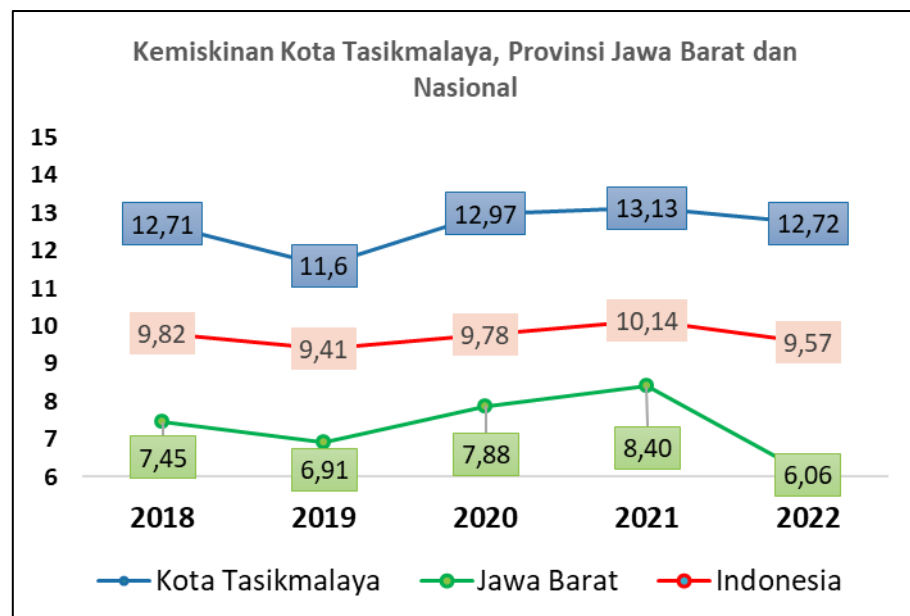
Capaian Angka Kemiskinan Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 2.2.**  
**Capaian Angka Kemiskinan Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2022**



Dari Grafik di atas dapat dilihat bahwa kemiskinan di Kota Tasikmalaya masih berada pada angka yang masih tinggi yaitu 12,72% pada tahun 2019 meskipun mengalami penurunan menjadi 11,6%. Capaian ini masih di atas kemiskinan nasional dan provinsi Jawa Barat sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut :

**Gambar 2.3.**  
**Angka Kemiskinan Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2022**

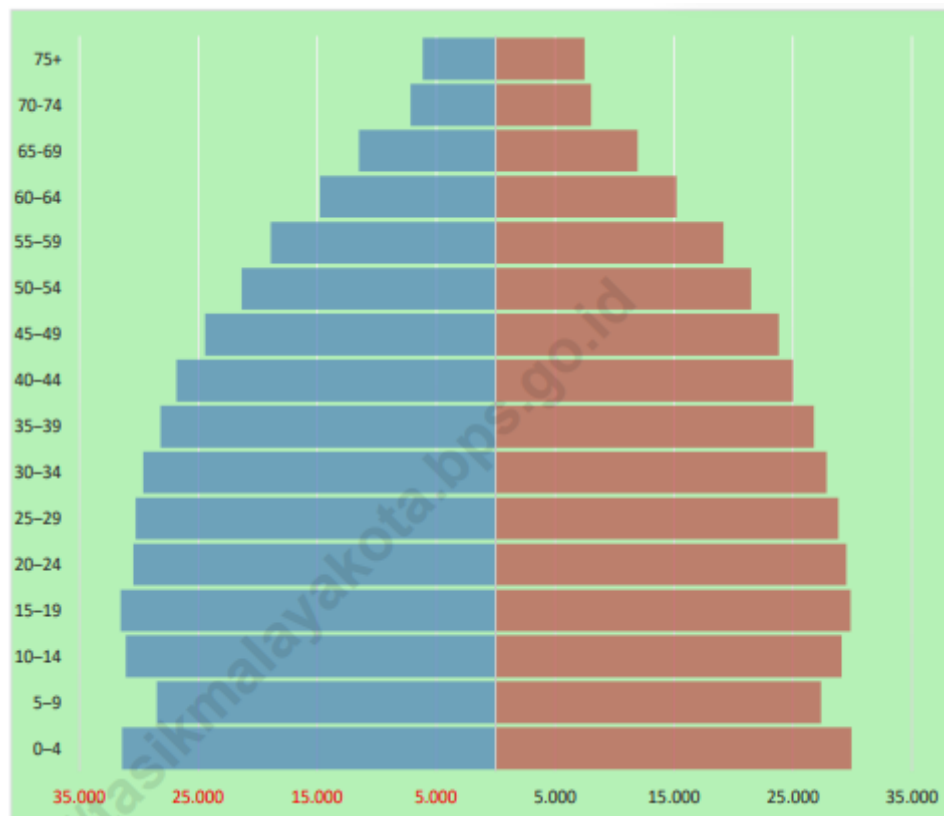


### 2.1.3 Angka Pengangguran

Berdasarkan proyeksi interim hasil Sensus Penduduk BPS tahun 2020, jumlah penduduk Kota Tasikmalaya tahun 2022 sebanyak 733.467 jiwa dengan laju pertumbuhan 1,32 persen dibanding penduduk tahun 2021. Kecamatan Cihideung merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terbesar yaitu 13.521 jiwa/km<sup>2</sup> dan Kecamatan Tamansari merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu 2.166 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan kepadatan penduduk Kota Tasikmalaya adalah 4.005 jiwa/km<sup>2</sup>.

Jumlah angkatan kerja Kota Tasikmalaya tahun 2022 sebanyak 347.063 orang dengan tingkat pengangguran sebesar 6,62 persen. Sementara itu jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya sebanyak 4.652 orang dengan jumlah yang ditempatkan sebanyak 1.250 orang.

**Gambar 2...**  
**Piramida Penduduk Kota Tasikmalaya, 2022**



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya

#### 2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

PDRB Kota Tasikmalaya Tahun 2022 atas dasar harga berlaku sebesar 24.974,68 miliar rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 sebesar 16.781,04 miliar rupiah. sebesar 16.781,04 miliar rupiah. Jika dilihat pada tiap lapangan usaha, penyumbang terbesar ada pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, diikuti lapangan usaha konstruksi dan industri pengolahan. Masing-masing memberikan sumbangan sebesar 21,69 persen, 15,92 persen dan 13,82 persen.

Tahun 2022 laju pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya mengalami pertumbuhan sebesar 5,01 persen. Jasa perusahaan adalah lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 15,01 persen. Sedangkan lapangan usaha pertambangan dan penggalian mengalami laju pertumbuhan paling rendah sebesar 1,60 persen. Adapun beberapa lapangan usaha mengalami perlambatan ekonomi seperti jasa keuangan dan asuransi finansial sebesar 0,85 persen, lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 0,02 persen serta lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 0,04 persen.

#### 2.1.5 Pendapatan Per kapita (PDRB Perkapita)

Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat kenaikan pendapatan per kapita daerah yang bersangkutan. Terdapat 2 (dua) metode penghitungan :

- PDRB Per Kapita Nominal (berdasarkan harga berlaku) yang tidak mempertimbangkan tingkat inflasi atau kenaikan harga;
- PDRB Per Kapita Riil (berdasarkan angka konstan) yang dihitung berdasarkan harga tetap sebagai acuan.

**Tabel 2.2**  
**PDRB per Kapita Harga Berlaku (Juta Rupiah/tahun) Kota Tasikmalaya**  
**Tahun 2020-2022**

No	TAHUN	SATUAN (Juta Rupiah)
1	2020	32,51
2	2021	31,56
3	2022	34,05

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa nilai PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rp/Tahun) mengalami kenaikan dibanding tahun 2020, walaupun pada tahun 2021 sempat mengalami penurunan hingga tahun 2022 PDRB Per Kapita ADHB Kota Tasikmalaya adalah 34,05 (Juta Rp/Tahun).

### **2.1.6 Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)**

Ketimpangan pendapatan merupakan tolok ukur dari distribusi pendapatan masyarakat dalam suatu daerah atau wilayah pada periode tertentu. Semakin tinggi ketimpangan pendapatan berarti distribusi pendapatan di masyarakat semakin tidak merata. Untuk memberikan gambaran tentang tingkat pemerataan maupun ketimpangan pendapatan Kota Tasikmalaya digunakan Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini), Indeks gini digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan pengeluaran sebagai proksi dari pendapatan penduduk. Di Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 indeks gini mencapai 0,405 sedikit lebih rendah dibanding tahun 2021 sebesar 0,414. Penurunan indeks ini mengindikasikan adanya perbaikan pengeluaran penduduk di Kota Tasikmalaya.

## **2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

### **a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran**

Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran atau *Output* Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 berdasarkan urusan wajib dan pilihan dapat dilihat dalam tabel 2.3. sebagai berikut :

**Tabel 2.3.**  
**Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran**

No IKK	Urusan	IKK Output	Nilai
1	Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	236
2	Pendidikan	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1215
3	Pendidikan	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0
4	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	1058
5	Pendidikan	Jumlah pendidik pada PAUD	1058
6	Pendidikan	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	605
7	Pendidikan	Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pem	266
1	Pendidikan	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	214
2	Pendidikan	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	6214
3	Pendidikan	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	970
4	Pendidikan	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0
5	Pendidikan	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0
6	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	3378
7	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	2120
8	Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	3378
9	Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	2120
10	Pendidikan	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	275
11	Pendidikan	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	355
12	Pendidikan	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	193
13	Pendidikan	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	308

No IKK	Urusan	IKK Output	Nilai
14	Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	3016
15	Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1694
16	Pendidikan	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	234
17	Pendidikan	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	85
18	Pendidikan	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	193
19	Pendidikan	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	308
1	Pendidikan	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	19
2	Pendidikan	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	3255
3	Pendidikan	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0
4	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	412
5	Pendidikan	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	412
6	Pendidikan	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	87
7	Pendidikan	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	234
8	Pendidikan	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	18
1	Kesehatan	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	14
1	Kesehatan	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	14
1	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1100388
2	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	154
1	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	33537
2	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	154



No IKK	Urusan	IKK Output	Nilai
1	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	69120
2	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	242
1	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	440679
2	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	333
1	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	960168
2	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	311
1	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	160
2	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	220
1	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	230727
2	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	220
1	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	160
2	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	132
1	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	160
2	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	132
1	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2647
2	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	22
1	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	547446
2	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	176
1	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	76519
2	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	198
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	5632
2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	36892
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	0
4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	0
5	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	0





No IKK	Urusan	IKK Output	Nilai
6	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0
7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	0
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	37,15
2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	50,58
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	23,42
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	0
2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	0
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	0
4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	105563
5	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	5758
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	111384
2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	3033
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	3033
4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	3033
5	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	3033
6	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	3033
7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	56,82
8	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	1,68



No IKK	Urusan	IKK Output	Nilai
9	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	3,21
10	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	9,38
11	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	3,21
12	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	1,68
13	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	3,21
14	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	1,68
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	0
2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	354
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	0
4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	0
5	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	0
6	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	0
7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	0
8	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	17
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	450742
2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan yang dibangun	1080
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jembatan yang dibangun	13,6
4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	0
5	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0



No IKK	Urusan	IKK Output	Nilai
6	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	5084
7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jembatan yang direhabilitasi	1,2
8	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan yang dipelihara	11497
9	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jembatan yang dipelihara	0
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	2
2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	803
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	803
4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	0
5	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	0
6	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	0
7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	0
8	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	0
9	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	0
10	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang memb	0
11	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	0
12	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	0

No IKK	Urusan	IKK Output	Nilai
13	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	0
14	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0
15	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0
16	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0
17	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0
18	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	0
19	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0
20	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	0
21	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	0
22	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0
23	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0
24	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0
25	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0
1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	10367
2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	0



No IKK	Urusan	IKK Output	Nilai
3	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	0
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0
5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0
6	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0
7	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0
8	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0
9	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0
1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0
2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0
3	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0
5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0
6	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0
1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	276,17



No IKK	Urusan	IKK Output	Nilai
2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	780
3	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	2,13
1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah di kab/kota	241717
2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit PK RTLH	780
3	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah tidak layak huni	12507
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah yang tidak dihuni	0
5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Rasio rumah dan KK	12504
6	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah pembangunan baru	0
1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	65
2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	65
3	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	13413
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	13413
5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	65
6	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	13413



No IKK	Urusan	IKK Output	Nilai
7	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0
8	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah pengembang yang terregistrasi	0
9	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0
1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	4817
2	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	1863
3	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	39
4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	4
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	39
6	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Tersedianya sarana prasarana minimal	869
1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	0
2	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	80
1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	0
2	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	0
3	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	65



No IKK	Urusan	IKK Output	Nilai
4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	32
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	0,74
6	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	0,74
1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100
2	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100
3	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100
4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100
1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	305
2	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	0
3	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	1
4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	0
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	1
6	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	14
7	Ketentraman, Ketertiban Umum	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan	13





No IKK	Urusan	IKK Output	Nilai
	dan Perlindungan Masyarakat	Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	
8	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	14
1	Sosial	Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki	144
2	Sosial	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	1566
3	Sosial	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	0
4	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	1561
5	Sosial	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	0
6	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	200
7	Sosial	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	0
8	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	9
9	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	83
10	Sosial	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	0
11	Sosial	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	4
12	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	0
13	Sosial	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0
14	Sosial	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	0
15	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	52
16	Sosial	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	120
17	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	16
18	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang	115

No IKK	Urusan	IKK Output	Nilai
		mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	
19	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	164
20	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	164
21	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	136
1	Sosial	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	1290
2	Sosial	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	90
3	Sosial	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0
4	Sosial	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	0
5	Sosial	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	0
6	Sosial	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	0
1	Tenaga Kerja	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	0
2	Tenaga Kerja	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	0
3	Tenaga Kerja	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	0
1	Tenaga Kerja	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	0
2	Tenaga Kerja	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	100
3	Tenaga Kerja	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	10,77
4	Tenaga Kerja	Persentase LPK yang terakreditasi	29
5	Tenaga Kerja	Persentase LPK yang memiliki perizinan	97
6	Tenaga Kerja	Jumlah penganggur yang dilatih	2934
7	Tenaga Kerja	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100
8	Tenaga Kerja	Persentase penyerapan lulusan	22,8
9	Tenaga Kerja	Lulusan bersertifikat kompetensi	289
10	Tenaga Kerja	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	188
11	Tenaga Kerja	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	4
1	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	72,94
2	Tenaga Kerja	Data tingkat produktivitas total	0
1	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	72,94



No IKK	Urusan	IKK Output	Nilai
2	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	49
3	Tenaga Kerja	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	61
4	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	72,94
5	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	86,5
6	Tenaga Kerja	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	1,91
7	Tenaga Kerja	Jumlah mogok kerja	1
8	Tenaga Kerja	Jumlah penutupan perusahaan	0
9	Tenaga Kerja	Jumlah perselisihan kepentingan	0
10	Tenaga Kerja	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0
11	Tenaga Kerja	Jumlah perselisihan PHK	15
12	Tenaga Kerja	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	904
13	Tenaga Kerja	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	15
14	Tenaga Kerja	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	1
15	Tenaga Kerja	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	73,3
1	Tenaga Kerja	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	259
2	Tenaga Kerja	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	4652
3	Tenaga Kerja	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	38
4	Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	0
5	Tenaga Kerja	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	3
6	Tenaga Kerja	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	1
7	Tenaga Kerja	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.	1
8	Tenaga Kerja	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	1250
9	Tenaga Kerja	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	50
10	Tenaga Kerja	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	89
11	Tenaga Kerja	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	0



No IKK	Urusan	IKK Output	Nilai
12	Tenaga Kerja	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0
13	Tenaga Kerja	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0
14	Tenaga Kerja	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	0
1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	0
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	0
1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	0
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	0
3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	0
4	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	0
5	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	0
1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	0
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	0
3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	0
4	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	0
5	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	0
6	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	0
7	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	0
1	Pangan	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	0

No IKK	Urusan	IKK Output	Nilai
2	Pangan	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	0
3	Pangan	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	0
4	Pangan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	0
5	Pangan	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	0
6	Pangan	Tertanganinya kerawanan pangan	0
7	Pangan	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	0
8	Pangan	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	0
1	Pertanahan	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	1
2	Pertanahan	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	0
3	Pertanahan	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.	0
4	Pertanahan	Dokumen Izin membuka tanah	0
5	Pertanahan	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	0
1a	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks kualitas air (IKA)	35,33
1b	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU)	82,26
1c	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks tutupan hutan (ITH)	24,39
1	Lingkungan Hidup	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	78,04
1	Lingkungan Hidup	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	116
2	Lingkungan Hidup	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	4,31
3	Lingkungan Hidup	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota	0
4	Lingkungan Hidup	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0
5	Lingkungan Hidup	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani. Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan	100

No IKK	Urusan	IKK Output	Nilai
1	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penerbitan akta perkawinan	266756
2	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penerbitan akta perceraian	10919
3	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penerbitan akta kematian	27764
4	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyajian data kependudukan	3
1	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0
2	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0
3	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	0
4	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0
1	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	0
2	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	0
3	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	0
4	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	0
5	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	0
1	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	0
2	Pengendalian penduduk dan	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	0

No IKK	Urusan	IKK Output	Nilai
	keluarga berencana		
3	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	0
4	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	0
1	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	0
2	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	0
1	Perhubungan	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	66,67
2	Perhubungan	Terlaksananya pelayanan uji berkala	77,5
3	Perhubungan	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	100
4	Perhubungan	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	0
1	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100
2	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100
3	Komunikasi dan Informatika	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	5
1	Komunikasi dan Informatika	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	100
2	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	94,44
3	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100
4	Komunikasi dan Informatika	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	48,71

No IKK	Urusan	IKK Output	Nilai
5	Komunikasi dan Informatika	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	5,12
6	Komunikasi dan Informatika	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	0
7	Komunikasi dan Informatika	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	25,64
8	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100
9	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	13,89
10	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100
11	Komunikasi dan Informatika	Persentase data yang dapat berbagi pakai	100
12	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	100
13	Komunikasi dan Informatika	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	0
14	Komunikasi dan Informatika	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	1
1	Komunikasi dan Informatika	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	100
2	Komunikasi dan Informatika	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100
3	Komunikasi dan Informatika	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100
1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100
2	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantuan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0
3	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	32,79
4	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	40



No IKK	Urusan	IKK Output	Nilai
5	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	24,92
6	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	29,51
7	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0
8	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	0,65
9	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	64,59
10	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,65
11	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0
12	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100
13	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0
1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	4,7
2	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	0
3	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0
4	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	2,2
5	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	15,69
6	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	29,82
7	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	0
1	Penanaman Modal	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	0

No IKK	Urusan	IKK Output	Nilai
2	Penanaman Modal	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	0
3	Penanaman Modal	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0
4	Penanaman Modal	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	0
5	Penanaman Modal	Kegiatan pameran penanaman modal	0
6	Penanaman Modal	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	0
7	Penanaman Modal	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	0
8	Penanaman Modal	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	0
9	Penanaman Modal	Laporan realisasi penanaman modal	0
10	Penanaman Modal	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	0
11	Penanaman Modal	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	0
12	Penanaman Modal	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	0
1	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	0
2	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0
1	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda	0
2	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0
1	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	0
2	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	0
1	Statistik	Tersedianya buku profil daerah	0
2	Statistik	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	35
3	Statistik	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	36
4	Statistik	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	26
5	Statistik	Jumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	26
6	Statistik	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	83,33
7	Statistik	Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	83,33
1	Persandian	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	0
2	Persandian	Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi	4,69

No IKK	Urusan	IKK Output	Nilai
		persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	
3	Persandian	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	45,31
4	Persandian	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	0
1	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	0
2	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	0
3	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, mdan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	0
4	Kebudayaan	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	0
5	Kebudayaan	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	0
6	Kebudayaan	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran	0
7	Kebudayaan	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0
8	Kebudayaan	Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	0
9	Kebudayaan	Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	0
10	Kebudayaan	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0
11	Kebudayaan	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	0
12	Kebudayaan	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	0
13	Kebudayaan	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	0
14	Kebudayaan	Pembentukan tim ahli cagar budata provinsi	0
15	Kebudayaan	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budya	0
16	Kebudayaan	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	0
17	Kebudayaan	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota	0
18	Kebudayaan	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	0
19	Kebudayaan	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0



No IKK	Urusan	IKK Output	Nilai
1	Perpustakaan	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	0,46357
2	Perpustakaan	Persentase keterampilan memanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	3,2
3	Perpustakaan	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	2325
4	Perpustakaan	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	14,9
5	Perpustakaan	Jumlah pemasyarakatangemarmembaca di masyarakat	1341
1	Perpustakaan	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	1
2	Perpustakaan	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0
3	Perpustakaan	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	0
1	Kearsipan	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100
2	Kearsipan	persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100
3	Kearsipan	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100
4	Kearsipan	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	100
1	Kearsipan	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	0
2	Kearsipan	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0
3	Kearsipan	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	0
4	Kearsipan	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	0
5	Kearsipan	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	0
6	Kearsipan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	0
1	Kelautan dan Perikanan	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	0
2	Kelautan dan Perikanan	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	0
3	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	0
4	Kelautan dan Perikanan	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	0

No IKK	Urusan	IKK Output	Nilai
5	Kelautan dan Perikanan	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	0
1	Pariwisata	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	0
2	Pariwisata	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	0
3	Pariwisata	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	0
4	Pariwisata	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	0
5	Pariwisata	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	0
6	Pariwisata	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	0
7	Pariwisata	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	0
8	Pariwisata	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	0
9	Pariwisata	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	0
10	Pariwisata	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	0
1	Pertanian	Sarana pertanian yang diberikan	0
2	Pertanian	Prasarana pertanian yang digunakan	0
3	Pertanian	Penerbitan izin usaha pertanian	0
4	Pertanian	Persentase prasarana yang digunakan	0
5	Pertanian	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	0
1	Pertanian	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	0
1	Kehutanan	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	0
2	Kehutanan	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	0
3	Kehutanan	Pemulihan ekosistem pada Tahura	0
4	Kehutanan	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	0
1	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	0
1a	Perdagangan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat perbelanjaan	100
1b	Perdagangan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Toko swalayan	100
2	Perdagangan	Persentase penerbitan TDG	100
3	Perdagangan	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	0
4	Perdagangan	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	0
5	Perdagangan	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	0



No IKK	Urusan	IKK Output	Nilai
1	Perdagangan	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	0
2	Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100
3	Perdagangan	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	13,8
1	Perdagangan	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	0
1	Perdagangan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	100
2	Perdagangan	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	0
1	Perindustrian	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	0
1	Perindustrian	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	100
1	Perindustrian	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	100
2	Perindustrian	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	0
1	Perindustrian	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasanindustri di kab/kota	0,78
1	Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	0
2	Transmigrasi	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0
3	Transmigrasi	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	0

**b. Indikator Kinerja Kunci Hasil**

Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil atau *Outcome* Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 berdasarkan urusan wajib dan pilihan dapat dilihat dalam tabel 2.4. sebagai berikut :

**Tabel 2.4.**  
**Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Wajib dan Pilihan**  
**Tahun 2022**

NO IKK	URUSAN	IKK OUTCOME	CAPAIAN	SUMBER DATA	KET
1.a.1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	85,9297917	Dinas Pendidikan	
1.a.2		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	105,709111	Dinas Pendidikan	
1.a.3		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	118,0976299	Dinas Pendidikan	
1.a.4		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	0,9500088	Dinas Pendidikan	
1.b.1	Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	2,1159887	Dinas Kesehatan	
1.b.2		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	64,2857143	Dinas Kesehatan	
1.b.3		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	Dinas Kesehatan	
1.b.4		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	99,8555044	Dinas Kesehatan	
1.b.5		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	98,700361	Dinas Kesehatan	
1.b.6		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	91,8416923	Dinas Kesehatan	
1.b.7		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	97,7007233	Dinas Kesehatan	
1.b.8		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	37,4757544	Dinas Kesehatan	

NO IKK	URUSAN	IKK OUTCOME	CAPAIAN	SUMBER DATA	KET
1.b.9		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	31,9832529	Dinas Kesehatan	
1.b.10		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	75,5927773	Dinas Kesehatan	
1.b.11		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	76,451845	Dinas Kesehatan	
1.b.12		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	93,5770751	Dinas Kesehatan	
1.b.13		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	99,738767	Dinas Kesehatan	
1.b.14		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	83,7766105	Dinas Kesehatan	
1.c.1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	0	Dinas PUTR	SUKET
1.c.2		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0	Dinas PUTR	SUKET
1.c.3		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	37,0497427	Dinas PUTR	
1.c.4		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	56,8116071	Dinas PUTR	
1.c.5		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	61,7084714	Dinas PUTR	
1.c.6		Rasio kepatuhan IMB kab/kota	100	Dinas PUTR	





NO IKK	URUSAN	IKK OUTCOME	CAPAIAN	SUMBER DATA	KET
1.c.7		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	89,2763488	Dinas PUTR	
1.c.8.1		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	20,7977208	Dinas PUTR	
1.c.8.2		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	0	Dinas PUTR	
1.d.1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	0	Dinas Perwaskim	Suket
1.d.2		Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0	Dinas Perwaskim	Suket
1.d.3		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	100	Dinas Perwaskim	
1.d.4		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	6,3680903	Dinas Perwaskim	
1.d.5		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	33,6064342	Dinas Perwaskim	
1.e.1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	Satpol PP	
1.e.2		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	84,7826087	Satpol PP	
1.e.3		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	80,0000689	BPBD	
1.e.4		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	65,0000482	BPBD	
1.e.5		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	BPBD	
1.e.6		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	BPBD	
1.e.7		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15	BPBD	
1.f.1	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi	3,3670034	Dinsos	

NO IKK	URUSAN	IKK OUTCOME	CAPAIAN	SUMBER DATA	KET
		kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)			
1.f.2		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	Dinsos	
2.a.1	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	0	Dinas Tenaga Kerja	Suket
2.a.2		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0	Dinas Tenaga Kerja	
2.a.3		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	5177751,243	Dinas Tenaga Kerja	
2.a.4		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	43,158284	Dinas Tenaga Kerja	
2.a.5		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	26,8701634	Dinas Tenaga Kerja	
2.g.1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0,1564802	DPPKBP3A	
2.g.2		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100	DPPKBP3A	
2.g.3		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	6,61239	DPPKBP3A	
2.h.1	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	71,1517961	DKP3	
2.i.1	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	Dinas PUTR	
2.i.2		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	25,7350725	Dinas PUTR	
2.i.3		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	100	Dinas PUTR	



NO IKK	URUSAN	IKK OUTCOME	CAPAIAN	SUMBER DATA	KET
2.i.4		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0	Dinas PUTR	SUKET
2.i.5		Tersedianya tanah untuk masyarakat	0	Dinas PUTR	SUKET
2.i.6		Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	0	Dinas PUTR	SUKET
2.j.1	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	51,94	Dinas LH	
2.j.2		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	78,0497248	Dinas LH	
2.j.3		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	96,6666667	Dinas LH	
2.k.1.1	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	99,2549935	Disdukcapil	
2.k.1.2		Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	39,8635407	Disdukcapil	
2.k.1.3		Kepemilikan akta kelahiran	96,0616811	Disdukcapil	
2.k.1.4		Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	61,1111111	Disdukcapil	
2.l.1	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	0	Setda	Suket
2.l.2		Persentase peningkatan status desa mandiri	0	Setda	Suket
2.m.1	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,01	DPPKBP3A	
2.m.2		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	72,9779986	DPPKBP3A	
2.m.3		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	12,9459384	DPPKBP3A	
2.n.1	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	0,9078	Dishub	
2.n.2		Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,37	Dishub	
2.o.1	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang	100	Dinas Kominfo	



NO IKK	URUSAN	IKK OUTCOME	CAPAIAN	SUMBER DATA	KET
		disediakan oleh Dinas Kominfo			
2.o.2		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	75	Dinas Kominfo	
2.o.3		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	78,687246	Dinas Kominfo	
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	33,442623	Dinas KUMKM Perindag	
2.p.2		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	100	Dinas KUMKM Perindag	
2.q	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	284,351778	DPMPTSP	
2.r.1	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	37,0395168	Disporabudpar	
2.r.2		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	76,9914853	Disporabudpar	
2.r.3		Peningkatan prestasi olahraga	122	Disporabudpar	
2.s.1	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	Dinas Kominfo	
2.s.2		Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	Dinas Kominfo	
2.t	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	45,7364341	Dinas Kominfo	
2.u	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	40	Disporabudpar	
2.v.1	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	50,47	Dispusipda	
2.v.2		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	18,16	Dispusipda	
2.w.1	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	100	Dispusipda	
2.w.2		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara	0	Dispusipda	Suket

NO IKK	URUSAN	IKK OUTCOME	CAPAIAN	SUMBER DATA	KET
		untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat			
3.a	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	100,0435644	DKP3	
3.b.1	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	11316,66667	Disporabudpar	
3.b.2		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	32,7845596	Disporabudpar	
3.b.3		Tingkat hunian akomodasi	85,8353851	Disporabudpar	
3.b.4		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	5,767161	Disporabudpar	
3.b.5		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	10,8515157	Disporabudpar	
3.c.1	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun/Produktivitas pertanian per tahun	621,3098506	DKP3	
3.c.2		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular/Persentase kasus zoonosis kab/ kota	0	DKP3	
3.d	Kehutanan		0	DKP3	Suket
3.e	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	0	DPMPSTSP	Suket
3.f.1	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100	Dinas KUMKM Perindag	
3.f.2		Persentase kinerja realisasi pupuk	32,4098634	DKP3	
3.f.3		Persentase alat &ndash; alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100	Dinas KUMKM Perindag	
3.g.1	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	43,1762463	Dinas KUMKM Perindag	
3.g.2		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan	92	Dinas KUMKM Perindag	

NO IKK	URUSAN	IKK OUTCOME	CAPAIAN	SUMBER DATA	KET
		industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP			
3.g.3		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	Dinas KUMKM Perindag	
3.g.4		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	Dinas KUMKM Perindag	Suket
3.g.5		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	0	Dinas KUMKM Perindag	Suket
3.g.6		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	3	Dinas KUMKM Perindag	
3.h	Transmigrasi		0	Dinas Tenaga Kerja	Suket

### c. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil atau *Outcome* Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 berdasarkan fungsi penunjang urusan pemerintahan dapat dilihat dalam tabel 2.5. sebagai berikut :

**Tabel 2.5.**  
**Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2022**

NO. IKK	URUSAN	IKK OUTCOME	CAPAIAN	SUMBER DATA	KET
4.a.1	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	15,7199074	BPKAD	
4.a.2		Rasio PAD	17,9433537	BPKAD	
4.a.3		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	Inspektorat	



NO. IKK	URUSAN	IKK OUTCOME	CAPAIAN	SUMBER DATA	KET
4.a.4		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	2	Inspektorat	
4.a.5		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures )	75,1919963	BPKAD	
4.a.6		Opini Laporan Keuangan	6 kali WTP	BPKAD	
4.b.1	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	Setda	Surat Keterangan
4.b.2		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	73,6926038	Setda	
4.b.3		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	53,7741386	BPKAD	
4.b.4		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	1,8173537	Setda	
4.c.1	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	285,007496 3	BKPSDM	
4.c.2		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	13,6292835	BKPSDM	
4.c.3		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	37,4285714	BKPSDM	
4.d.1	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	63,166835	BPKAD	
4.d.2		Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	27,9433664	BPKAD	
4.d.3		Manajemen Aset	4	BPKAD	
4.d.4		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	1,1189912	BPKAD	

NO. IKK	URUSAN	IKK OUTCOME	CAPAIAN	SUMBER DATA	KET
4.e.1	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	95,4552615	Dinas Kominfo	
4.e.2	Transparansi dan Partisipasi Publik	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	100	Dinas Kominfo	

### 2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, dan selanjutnya perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Evaluasi AKIP diawali dengan perumusan tujuan evaluasi, kemudian dilanjutkan dengan penentuan ruang lingkup evaluasi, perancangan desain evaluasi, menentukan mekanisme pelaksanaan evaluasi, diakhiri dengan pelaporan dan pengomunikasian hasil evaluasi. Kerangka logis evaluasi AKIP secara umum, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah



untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP, evaluasi ini dapat meliputi pengungkapan dan penyajian informasi kinerja dalam dokumen Laporan Kinerja, dokumen Rencana Strategis, dokumen Perjanjian Kinerja, dengan melakukan telaah misalnya, keselarasan antar komponen dalam perencanaan strategis, logika pelaksanaan program, dan logika strategi pemecahan masalah yang direncanakan/diusulkan, serta keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja

### **Kerangka Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah, pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran, namun metode pengukuran capaian kinerja dapat dilakukan dengan dua rumus, yaitu sebagai berikut :

Untuk sasaran yang mempunyai hubungan positif dimana semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus ;

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Sasaran}} \times 100\%$$

Untuk sasaran yang mempunyai hubungan negative dimana semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

$$\text{Atau : } \% \text{ Capaian} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja, dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab – sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase Predikat Kode Warna	Kriteria
< 100%	Tidak Tercapai
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target
> 100%	Melebihi Target

Penilaian capaian kinerja tersebut, ditandai dengan skala pengukuran ordinal evaluasi kinerja yang dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Melebihi Target Untuk capaian kinerja diatas 100,00% (>100,00%) ;
2. Tercapai / Sesuai Target Untuk capaian kinerja 100,00% (=100,00%) .
3. Tidak Tercapai Untuk capaian kinerja dibawah 100,00% (<100,00%).

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja dengan pendekatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

**Tabel. 2.6.**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran**

Predikat	Nilai Angka	Interpretasi
AA	> 100	<b>Sangat Memuaskan,</b>
AA	> 90 - 100	Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja, Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (reform). Pengukuran Kinerja telah dilakukan sampai ke level individu
A	> 80 – 90	<b>Memuaskan,</b> Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	> 70 – 80	<b>Sangat Baik,</b> Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator
B	> 60 – 70	<b>Baik,</b> Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja
CC	> 50 – 60	<b>Cukup (Memadai),</b> Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja..
C	> 30 – 50	<b>Kurang,</b> Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0 – 30	<b>Sangat Kurang,</b> Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen

Predikat	Nilai Angka	Interpretasi
		kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Sumber : Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

### A. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kota Tasikmalaya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Keputusan Walikota Nomor : 050/Kep.971-Bappelitbangda/2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 -2022. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kota Tasikmalaya tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

**Tabel 2.7.**  
**Target Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Ket
1	Jumlah isu/ potensi konflik SARA (kasus) yang ditangani	Kasus	0	IS
2	Persentase kelompok seni budaya aktif	%	80,00	IS
3	Angka kemiskinan	%	11,50	IT
4	Persentase Penanganan PMKS	%	89,51	IS
5	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial	%	100	IS
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5	IT
7	PDRB ADH Berlaku	Triliyun Rupiah	23,61	IT
8	PDRB Perkapita ADH Berlaku	Juta Rupiah	31,04	IT
9	Inflasi daerah	%	2	IT
10	Indeks gini	point	0,39	IT



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Ket
11	Indek daya beli	point	59,63	IS
12	Nilai investasi daerah	Milyar Rupiah	700,00	IS
13	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	642.000	IS
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,02	IS
15	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	66,75	IS
16	Skor Pola Pangan Harapan/PPH Konsumsi	point	92	IS
17	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	%	97	IS
18	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	100	IS
19	Persentase KK/RT yang berakses SPALD	%	61,59	IS
20	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat	%	100	IS
21	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	point	74,40	IS
22	Indek Pembangunan Manusia	Point	73,95	IT
23	Indeks Pendidikan	point	68,5	IS
24	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	%	100	IS
25	Indek Kesehatan	point	81,65	IS
26	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	%	100,00	IS
27	Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga	%	14	IS
28	Angka Kriminalitas	point	2,5	IS
29	Persentase Penanganan Bencana Daerah	%	100	IS
30	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	%	100	IS
31	Persentase Keluarga Sejahtera	%	87	IT
32	Laju Pertumbuhan Penduduk	point	0,2	IS
33	Indeks Pemberdayaan Gender	Point	62,96	IT
34	Indeks Pembangunan Gender	point	91,54	IT
35	Indeks Kepuasan Masyarakat	kategori	77-88 (Baik)	IS
36	Capaian Predikat Indeks SPBE	Predikat	Sangat Baik (3,00)	IS
37	Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah	opini	WTP	IS
38	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%	3,4	IS
39	Hasil Evaluasi SAKIP	kategori	81 -90 (A)	IS
40	Hasil evaluasi LPPD	Kategori	3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi)	IS
41	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	IS

Sumber : Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, BPS Kota Tasikmalaya

## B. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Secara umum Kota Tasikmalaya telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPMJD 2017 - 2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kota Tasikmalaya Tahun 2017 - 2022 sebanyak 16 sasaran. Tahun 2022 adalah tahun ke 5 pelaksanaan Rencana Strategis Kota Tasikmalaya, dari sebanyak 8 Tujuan, 16 sasaran strategis dengan sebanyak 41 indikator kinerja yang ditetapkan, maka pencapaian kinerja sasaran Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.8**  
**Capaian Indikator Kinerja**  
**Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Ket
1	Capaian implementasi tata nilai kehidupan masyarakat yang religius	%	87	87*	100	IT
2	Jumlah isu/ potensi konflik SARA (kasus) yang ditangani	Kasus	0	0	100	IS
3	Persentase budaya daerah yang dilestarikan (%)	%	61	63,77	104,54	IT
4	Persentase kelompok seni budaya aktif (%)	%	80,00	80,92	101,15	IS
5	Angka kemiskinan (%)	%	11,50	12,72	-110,50	IT
6	Persentase Penanganan PMKS (%)	%	89,51	89,51	100	IS
7	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial	%	100	100	100	IS
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	%	5	3,57*	71,40	IT
9	PDRB ADH Berlaku (triliyun rupiah)	Triliyun Rupiah	23,61	22,85*	96,78	IT
10	PDRB Perkapita ADH Berlaku (juta rupiah)	juta Rupiah	31,04	31,56*	101,68	IT
11	Pengeluaran Perkapita (juat rupiah)	juta Rupiah	9,86	10,57	107,20	IT



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Ket
12	Inflasi daerah (%)	%	2	6,65	-463,00	IT
13	Indeks gini (point)	point	0,39	0,405	103,85	IT
14	Indek daya beli (point)	point	59,63	71,85	118,70	IS
15	Pertumbuhan PDRB kategori Industri Pengolahan	%	5,74	1,91*	33,28	IS
16	Pertumbuhan PDRB kategori Perdagangan Besar dan Eceran;	%	6,97	2,97*	42,61	IS
17	Pertumbuhan PDRB kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	5,83	2,39*	40,99	IS
18	Nilai investasi daerah (milyar rupiah)	Milyar Rupiah	700,00	4.777	682%	IS
19	Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	orang	642.000	642.128	100,02	IS
20	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	7,02	6,62	47,02	IS
21	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	%	66,75	65,98	98,85	IS
22	Pertumbuhan PDRB kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	0,10	0,28*	2,80	IS
23	Skor Pola Pangan Harapan/PPH Konsumsi (point)	point	92	91,3	99,24	IS
24	Persentase infrastruktur dasar perkotaan yang berkualitas (%)	%	77,75	71,05*	91,38	IT
25	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (%)	%	97	89,28	92,04	IS
26	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	100	100	100	IS
27	Persentase KK/RT yang berakses SPALD	%	61,59	61,71	100,19	IS
28	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat	%	100	100	100	IS



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Ket
29	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (point)	point	100		0	IS
30	Indek Pembangunan Manusia (point)	Point	73,95	73,83	99,84	IT
31	Indeks Pendidikan (point)	point	68,5	69,18	100,91	IS
32	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	%	100	51,74	51,74	IS
33	Indek Kesehatan (point)	point	81,65	80,97	98,62	IS
34	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	%	100,00	77,18	77,18	IS
35	Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga (%)	%	14	17,59	125,64	IS
36	Angka Kriminalitas (point)	point	2,5	2,94	-41,50	IS
37	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	%	100	100	100	IS
38	Persentase Penanganan Bencana Daerah (%)	%	100	100	100	IS
39	Persentase Keluarga Sejahtera (%)	%	87	80,61	92,66	IT
40	Indeks Pembangunan Gender (point)	point	91,54	91,74*	100,22	IT
41	Indeks Pemberdayaan Gender (point)	point	62,96	59,51*	94,52	IT
42	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	point	0,2	0,81*	-60,80	IS
43	Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (point)	%	2,04	2,01	5,04	IS
44	Indeks Reformasi Birokrasi (kategori)	(kategori)	61-70 (Baik)	60,04 (B)	85,77	IT
45	Indeks Kepuasan Masyarakat (kategori)	kategori	77-88 (Baik)	86,92	97,91	IS



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Ket
46	Capaian Predikat Indeks SPBE	Predikat	Sangat Baik (3,00)	2,62	87,33	IS
47	Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah (opini)	opini	WTP	WTP	100	IS
48	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (%)	%	3,4	12,94	380,59%	IS
49	Hasil Evaluasi SAKIP (kategori)	kategori	81 -90 (A)	71,63 (BB)*	79,59	IS
50	Hasil evaluasi LPPD (kategori)	kategori	3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi)	3,1 - 4,0 * (Sangat Tinggi)	100	IS
51	Tingkat Maturitas SPIP (level)	Level	3	3,081	102,7	IS

Ket : \* \*Angka Sementara, \*\* Angka Sangat Sementara, IT : Indikator Tujuan, IS : Indikator Sasaran  
Sumber : Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, BPS Kota Tasikmalaya

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Perangkat Daerah pada beberapa tabel berikut :

**Tabel 2.9.**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran**  
**Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Capaian
1	Melebihi/Melampaui Target	27 %
2	Sesuai Target	30%
3	Tidak Mencapai Target	46 %

Dari sebanyak 16 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.10**  
**Pencapaian Target Misi**

No	Misi	Jumlah	Tingkat Pencapaian					
		Indikator Sasaran	Melampaui target		Sesuai Target		Tidak Mencapai	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	2	1	50,00	1	50,00	0	0,00
2	Misi 2	12	3	25	2	16,66	7	58,33
3	Misi 3	5	1	20,00	1	20	3	60,00
4	Misi 4	9	1	11,11	2	33,33	6	66,66
5	Misi 5	7	2	28,57	2	28,57	3	42,85
<b>Jumlah</b>		<b>36</b>	<b>11</b>	<b>27</b>	<b>9</b>	<b>30</b>	<b>16</b>	<b>46</b>

### C. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun 2021

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

1. Realisasi kinerja dengan kinerja yang direncanakan.
2. Realisasi kinerja dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
3. Realisasi kinerja dengan target akhir renstra.
4. Realisasi kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
5. Realisasi kinerja dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2022 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator Tujuan sebanyak 8 tujuan 15 Indikator, dan sasaran sebanyak 16 sasaran dan sebanyak 41 indikator kinerja dari 5 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kota Tasikmalaya tahun 2017 - 2022, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :



**Tabel 2.11**  
**CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM DAERAH**  
**RPJMD KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017-2022**

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	TARGET AKHIR RPJMD	2021		2022		Persentase Capaian	KET
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
<b>Misi 1: Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal</b>								
T1 : Terwujudnya tata nilai kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan religius	Capaian implementasi tata nilai kehidupan masyarakat yang religius (%)	87,00	87	87	87	87	100	Sekretariat Daerah
S1 : Meningkatnya kerukunan dan karakter masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Jumlah isu/ potensi konflik SARA (kasus) yang ditangani	0,00	0	0	0	0	100	Badan Kesbangpol
T2 : Terwujudnya pelestarian kebudayaan daerah	Persentase budaya daerah yang dilestarikan (%)	61,00	57	57,97	61	63,77	104,54	Dinas Porabudpar
S2 : Meningkatnya apresiasi terhadap kesenian dan kebudayaan daerah	Persentase kelompok seni budaya aktif (%)	80,00	75,00	75,14	80,00	80,92	101,15	Dinas Porabudpar
<b>Misi 2: Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat</b>								
T3 : Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Angka Kemiskinan (%)	11,50	12,50	13,13	11,50	12,72	-110,50	BPS
S3 : Meningkatnya perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Penanganan PMKS (%)	89,51	85,75	87,64	89,51	89,51	100	Dinsos



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	TARGET AKHIR RPJMD	2021		2022		Persentase Capaian	KET
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial	100,00	100	100	100	100	100	Dinsos
T4 : Menguatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,00	4,5	3,57	5	5.01	71,40	BPS Kota Tasikmalaya
	PDRB a.d.h Berlaku (triliyun rupiah)	23,61	22,98	22,85	23,61	24.97	96,78	BPS Kota Tasikmalaya
	PDRB Perkapita a.d.h Berlaku (juta rupiah)	31,04	30,77	31,56	31,04	34,0	101,68	BPS Kota Tasikmalaya
	Pengeluaran Perkapita (juta rupiah)	9,86	8,57	10,21	9,86	10,58	107,20	BPS Kota Tasikmalaya
	Inflasi daerah (%)	2,00	2,25	1,17	2	6,65	-463,00	BPS Kota Tasikmalaya
	Indeks Gini (point)	0,39	0,40	0,41	0,39	0,405	103,85	BPS Kota Tasikmalaya
S4 : Meningkatnya peranan koperasi, usaha mikro kecil, industri perdagangan dan jasa	Indeks Daya Beli (point)	59,63	57,58	70,78	59,63	71,85	120,49	BPS Kota Tasikmalaya
	Pertumbuhan PDRB kategori Industri Pengolahan (%)	5,74	4,38	1,91	5,74	13,82	33,28	BPS Kota Tasikmalaya
	Pertumbuhan PDRB kategori Perdagangan Besar dan Eceran (%)	6,97	4,68	2,97	6,97	2,97*	42,61	BPS Kota Tasikmalaya
	Pertumbuhan PDRB kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	5,83	4,61	2,39	5,83	5,77	40,99	BPS Kota Tasikmalaya



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	TARGET AKHIR RPJMD	2021		2022		Persentase Capaian	KET
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
	Nilai investasi daerah (milyar rupiah)	700,00	250,00	1.630,00	700,00	4.777	682%	DPMPTSP
	Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	3109000,00	430.560	483.569	642.000	642.128	100,02	Dinas Porabudpar
S5 : Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan berusaha	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,02	7,72	7,66	7,02	6,62	47,02	Dinas Tenaga Kerja
	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	66,75	66,5	67,75	66,75	65,98	98,85	
S6 : Meningkatnya pertanian dan ketahanan pangan daerah	Pertumbuhan PDRB kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	0,10	0,07	0,28	0,10	0,28*	280	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
	Skor Pola Pangan Harapan/PPH Konsumsi (point)	92,00	91	91,3	92	91,3	99,24	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
<b>Misi 3: Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan</b>								
T5 : Tersedianya infrastruktur dasar yang berkualitas, aman, nyaman, inklusif dan berkelanjutan	Persentase infrastruktur dasar perkotaan yang berkualitas (%)	77,75	76,83	71,05	77,75	71,05*	91,38	Dinas PUTR, Dinas PRKP dan Dishub
S7 : Meningkatnya layanan infratraktur dasar perkotaan yang aman, nyaman dan inklusif	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (%)	97,00	80	88,1	97	89,28	92,04	
	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100,00	100	58,71	100	100	100	Dinas Perumahan dan Permukiman



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	TARGET AKHIR RPJMD	2021		2022		Persentase Capaian	KET
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
S8 : Meningkatnya kawasan permukiman dan lingkungan yang nyaman dan sehat	Persentase KK/RT yang berakses SPALD	61,59	61,04	61,20	61,59	61,71	100,19	PUTR
	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat	100,00	100	100	100	100	100	PUTR
S9 : Meningkatnya pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (point)	74,40	74,20	63,85	74,40	49,43	66,44	Dinas LH
<b>Misi 4: Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia</b>								
T6 : Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Indek Pembangunan Manusia (point)	73,95	73,25	73,31	73,95	73,83	99,84	BPS
S10 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan (point)	68,50	68,25	69,12	68,5	69,18	100,99	disdik
	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	100,00	100	58,61	100	51,74	51,74	disdik
S11 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indek Kesehatan (point)	81,65	81,06	80,52	81,65	80,97	99,17	Dinas Kesehatan
	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	100,00	100,00	48,09	100,00	77,18	77,18	Dinas Kesehatan
S12 : Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga	Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga (%)	14,00	13	14	14	17,59	125,64	Dinas Porabudpar
S13 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas (point)	2,50	3,0	4,5	2,5	2,94	-41,50	Satpol PP
	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman,	100,00	100	98,47	100	100	100	Satpol PP dan BPBD



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	TARGET AKHIR RPJMD	2021		2022		Persentase Capaian	KET
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
	Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
	Persentase Penanganan Bencana Daerah (%)	100,00	100	100	100	100	100	BPBD
T7 : Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan pengarusutamaan gender	Persentase Keluarga Sejahtera (%)	87,00	86	63,77	87	80,61	92,66	DPPKBP3A
	Indeks Pembangunan Gender/IPG (point)	91,54	91,52	91,74	91,54	91,74*	100,22	DPPKBP3A
	Indeks Pemberdayaan Gender/IDG (point)	62,96	62,95	59,51	62,96	59,51*	94,52	DPPKBP3A
S14 : Meningkatnya keluarga berencana dan pengendalian penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,20	0,21	0,81	0,2	1,32		DPPKBP3A
	Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (point)	2,04	2,06	2,03	2,04	2,19		DPPKBP3A
<b>Misi 5: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih</b>								
T8 : Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi (kategori)	61-70 (B)	61-70 (Baik)	60,04 (B)	61-70 (Baik)	60,04 (B)	85,77	Sekretariat Daerah
S15. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (kategori)	77-88 (Baik)	77-88 (Baik)	83,32	77-88 (Baik)	86,92	97,91	Sekretariat Daerah
	Capaian Predikat Indeks SPBE	Sangat Baik (3,00)	Baik (2,75)	2,68	Sangat Baik (3,00)	2,62 (Baik)	87,33	Diskominfo



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	TARGET AKHIR RPJMD	2021		2022		Persentase Capaian	KET
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
S16 : Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah (opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	BPKAD
	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (%)	3,4	21,79	41,68	3,4	12,94	380,59%	BPKAD, BAPENDA
	Nilai Evaluasi SAKIP (kategori)	81 -90 (A)	70-80 (BB)	71,63 (BB)	81 -90 (A)	71,63 (BB)*	79,59	Sekretariat Daerah
	Nilai Evaluasi LPPD (kategori)	3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi)	3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi)	3,37	3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi)	3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi)	100	Sekretariat Daerah
	Tingkat Maturitas SPIP (level)	3	2,75	2,83	3	3,081	102,7	Inspektorat/ data 2019



#### D. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Pembangunan Jangka Menengah

Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya Kinerja Pembangunan Kota Tasikmalaya dapat diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan sebagaimana telah ditetapkan di dalam RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022. Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Tahun 2022 di banding realisasi tahun 2022 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.12**  
**Capaian Kinerja Tahun 2022 Dibandingkan Dengan Target**  
**Pembangunan Jangka Menengah**

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Tahun 2022		Capaian	KET
		Target	Realisasi		
<b>Misi 1: Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal</b>					
T1 : Terwujudnya tata nilai kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan religius	Capaian implementasi tata nilai kehidupan masyarakat yang religius (%)	87	87*	100	Sekretariat Daerah
S1 : Meningkatnya kerukunan dan karakter masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Jumlah isu/ potensi konflik SARA (kasus) yang ditangani	0	0	100	Badan Kesbangpol
P1 : Program Magrib Mengaji		90	90	100	Sekretariat Daerah
P2 : Program Tasik Berkarakter	Persentase siswa jenjang pendidikan dasar yang mengikuti pendidikan karakter (%)	100	100	100	Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan
	Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan berwawasan kebangsaan (%)	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Persentase pelaksanaanfasilitasi kegiatan hari besar keagamaan (%)	75	75	100	Sekretariat Daerah
T2 : Terwujudnya pelestarian kebudayaan daerah	Persentase budaya daerah yang dilestarikan (%)	61	63,77	104,54	Dinas Porabudpar
S2 : Meningkatnya apresiasi terhadap kesenian dan kebudayaan daerah	Persentase kelompok seni budaya aktif (%)	80,00	80,92	101,15	Dinas Porabudpar

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Tahun 2022		Capaian	KET
		Target	Realisasi		
P3 : Program Tasik Berbudaya	Cakupan pembinaan seni dan budaya daerah (%)	61	63,77	104,54	Dinas Porabudpar
	Persentase pagelaran kesenian dan kebudayaan daerah tingkat kota (%)	100	100	100	Dinas Porabudpar
<b>Misi 2: Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat</b>					
T3 : Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	Angka Kemiskinan (%)	11,50	12,72	-110,50	BPS
S3 : Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Penanganan PMKS (%)	89,51	87,51	98	Dinsos
	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial	100	100	100	Dinsos
P4 : Program Jaminan dan Perlindungan Sosial Masyarakat	Persentase rumah tangga miskin yang terlayani program jaminan dan perlindungan sosial (%)	100	95,42	95,42	Dinas Sosial
P5 : Program Tasik Bersedekah	Jumlah sedekah yang terkumpul (milyar rupiah)	11,25	9,30	82,67	Sekretariat Daerah
P6 : Program Gema Madani (Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing dan Inovatif)	Jumlah sasaran penerima Program Gema Madani (kelompok/orang)	25.000	27.870	111,48	Sekretariat Daerah
P7 : Program Peningkatan Pendapatan Keluarga Berbasis Komunitas (P3KK)	Jumlah keluarga miskin yang mendapat program P3KK	3150	3.376	107,17	Dinas KUMKM dan Perindag (200),
					Dinas Sosial (100),
					DKP3 (300)
T4 : Menguatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5	3,57*	71,40	BPS Kota Tasikmalaya
	PDRB a.d.h Berlaku (triliun rupiah)	23,61	22,85*	96,78	BPS Kota Tasikmalaya
	PDRB Perkapita a.d.h Berlaku (juta rupiah)	31,04	31,56*	101,68	BPS Kota Tasikmalaya
	Pengeluaran Perkapita (juta rupiah)	9,86	10,57	107,20	BPS Kota Tasikmalaya
	Inflasi daerah (%)	2	6,65	-463,00	BPS Kota Tasikmalaya
	Indeks Gini (point)	0,39	0,405	103,85	BPS Kota Tasikmalaya



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Tahun 2022		Capaian	KET
		Target	Realisasi		
S4 : Meningkatnya peranan koperasi, usaha mikro kecil, industri perdagangan dan jasa	Indeks Daya Beli (point)	59,63	71,85	120,49	BPS Kota Tasikmalaya
	Pertumbuhan PDRB kategori Industri Pengolahan (%)	5,74	1,91*	33,28	BPS Kota Tasikmalaya
	Pertumbuhan PDRB kategori Perdagangan Besar dan Eceran (%)	6,97	2,97*	42,61	BPS Kota Tasikmalaya
	Pertumbuhan PDRB kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	5,83	2,39*	40,99	BPS Kota Tasikmalaya
	Nilai investasi daerah (milyar rupiah)	700,00	4.777	682%	DPMPTSP
	Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	642.000	642.128	100,02	Dinas Porabudpar
P8 : Program Peningkatan Kapasitas Ekonomi Daerah	Persentase Koperasi sehat (%)	20	34,48	172,40	Dinas KUMKM dan Perindag
	Persentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil (%)	5	3,27	65,40	Dinas KUMKM dan Perindag
	Persentase jumlah pelaku usaha perdagangan yang meningkat omsetnya (%)	12	15	125	Dinas KUMKM dan Perindag
	Persentase Industri Kecil Menengah berkualitas (%)	12	10,88	90,67	Dinas KUMKM dan Perindag
	Capaian penerbitan Perizinan Terpadu tepat waktu sesuai SOP (%)	100	100	100	DPMPTSP
S5 : Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan berusaha	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,02	6,62	47,02	Dinas Tenaga Kerja dan BPS Kota Tasikmalaya
	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	66,75	65,98	98,85	BPS Kota Tasikmalaya
P9 : Program Pencetakan Wirausaha Baru	Jumlah Wirausaha Baru (orang)	5.000	4.345	86,90	Dinas KUKM Perindag
					DKP3
					Dinas Tenaga Kerja
					Dinas Pendidikan
					Dinas Porabudpar



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Tahun 2022		Capaian	KET
		Target	Realisasi		
P10 : Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Prosentase Tenaga Kerja yang Kompeten (%)	62	8	12,90	Dinas Tenaga Kerja / data sementara
S6 : Meningkatnya pertanian dan ketahanan pangan daerah	Pertumbuhan PDRB kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	0,10	0,28*	280	BPS Kota Tasikmalaya
	Skor Pola Pangan Harapan/PPH Konsumsi (point)	92	91,3	99,24	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
P11 : Program Peningkatan Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Pertanian (%)	0,1	4,45	4450	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
	Skor Pola Pangan Harapan/PPH Ketersediaan (point)	85	90,8	106,82	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
<b>Misi 3: Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan</b>					
T5 : Tersedianya infrastruktur dasar yang berkualitas, aman, nyaman, inklusif dan berkelanjutan	Persentase infrastruktur dasar perkotaan yang berkualitas (%)	77,75	68,14	87,63	DPUTR, Disperwaski m, Dishub dan DLH
S7 : Meningkatnya layanan infrastruktur dasar perkotaan yang aman, nyaman dan inklusif	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (%)	97	90,76	93,56	DPUTR dan Dishub
	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100	59,26	59,26	DPUTR
P12 : Program Pemantapan Infrastruktur Dasar Perkotaan	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (%)	83	90,76	109,34	DPUTR, dan Dishub
	Rasio Jaringan Irigasi (point)	0,074	0,071	95,94	DPUTR
S8 : Meningkatnya kawasan permukiman dan lingkungan yang nyaman dan sehat	Persentase KK/RT yang berakses SPALD	61,59	61,71	100,19	DPUTR, Disperwaski m dan Dinas Kesehatan



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Tahun 2022		Capaian	KET
		Target	Realisasi		
	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat	100	100	100	Disperwaski m
P13 : Program Gema Manasik (Gerakan Bersama Menata Kota Tasikmalaya)	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani (%)	100	100	100	Disperwaski m
S9 : Meningkatnya pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (point)	74,40	51,94	69,81	DLH
P14 : Program Tasik Resik	Penambahan ruang terbuka hijau (Ha)	13,34	100.000	207,50	DLH
	Indeks Kualitas Air	53,6	35,33	65,91	DLH
	Indeks Kualitas Udara	79,6	82,26	103,34	DLH
	Persentase Penanganan Sampah (%)	83,45	81,77	81,77	DLH
<b>Misi 4: Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia</b>					
T6 : Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Indek Pembangunan Manusia (point)	73,95	73,83	99,84	BPS Kota Tasikmalaya
S10 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan (point)	68,5	69,18	100,99	BPS Kota Tasikmalaya
	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	100	51,74	51,74	Dinas Pendidikan
P15 : Program Tasik Cerdas	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,7	9,53	98,25	BPS Kota Tasikmalaya
	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,54	13,47	99,48	BPS Kota Tasikmalaya
S11 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indek Kesehatan (point)	81,65	80,97	99,17	BPS Kota Tasikmalaya
	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	100,00	77,18	77,18	Dinas Kesehatan
P16 : Program Tasik Sehat	Usia Harapan Hidup (tahun)	73,15	72,63	99,29	BPS Kota Tasikmalaya
	Angka Kematian Ibu (per 100.000)	125,09	180,5	144,30	Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (per 1.000)	5,29	7,67	144,99	Dinas Kesehatan
	Prevalensi Stunting (%)	18,1	12,62	69,72	Dinas Kesehatan
S12 : Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga	Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga (%)	14	17,59	125,64	Dinas Porabudpar



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Tahun 2022		Capaian	KET
		Target	Realisasi		
P17 : Program Tasik Muda Berprestasi	Jumlah prestasi bidang kepemudaan (buah)	3	3	100	Dinas Porabudpar
	Persentase peningkatan nomor cabang olahraga yang meraih medali dalam kompetisi tingkat Jawa Barat (%)	5	3	60	Dinas Porabudpar
S13 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas (point)	2,5	2,94	-41,50	Satpol PP
	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	100	100	100	Satpol PP dan BPBD
	Persentase Penanganan Bencana Daerah (%)	100	100	100	BPBD
P18 : Program Tasik Siaga (Siap, Aman Terjaga)	Persentase penegakan Peraturan Daerah (%)	90	84,78	94,20	Satpol PP
	Persentase penanganan bencana daerah (%)	100	100	100	BPBD
T7 : Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan pengarusutamaan gender	Persentase Keluarga Sejahtera (%)	87	80,61	92,66	DPPKBP3A
	Indeks Pembangunan Gender/IPG (point)	91,54	91,74*	100,22	BPS Kota Tasikmalaya
	Indeks Pemberdayaan Gender/IDG (point)	62,96	59,51*	94,52	BPS Kota Tasikmalaya
S14 : Meningkatnya keluarga berencana dan pengendalian penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,2	0,81*	-60,80	BPS Kota Tasikmalaya
	Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (point)	2,04	2,01	5,04	DPPKBP3A
P19 : Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT yang tertangani (%)	100	100	100	DPPKBP3A
	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (%)	72,7	72,98	100,39	DPPKBP3A
<b>Misi 5: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih</b>					



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Tahun 2022		Capaian	KET
		Target	Realisasi		
T8 : Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi (kategori)	61-70 (Baik)	60,04 (B)*	85,77	Sekretariat Daerah
S15. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi  P20 : Program Tasik Layanan Prima (Profesional, Responsif, Inovatif Memuaskan dan Akuntabel)	Indeks Kepuasan Masyarakat (kategori)	77-88 (Baik)	86,92	97,91	Sekretariat Daerah
	Capaian Predikat Indeks SPBE	Sangat Baik (3,00)	2,62 (Baik)	87,33	Diskominfo
	Cakupan IKM Perangkat Daerah (%)	100	87,10	87,10	Semua Perangkat Daerah
S16 : Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah (opini)	WTP	WTP	100	BPKAD, Bapenda, Inspektorat, Sekretariat Daerah,
	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (%)	3,4	12,94	380,59 %	BPKAD, BAPENDA
	Nilai Evaluasi SAKIP (kategori)	81 -90 (A)	71,63 (BB)*	79,59	Sekretariat Daerah
	Nilai Evaluasi LPPD (kategori)	3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi)	3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi)	100	Sekretariat Daerah
	Tingkat Maturitas SPIP (level)	3	3,081	102,7	Inspektorat
P21 : Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan Aparatur	Cakupan Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (%)	75	71,82	95,76	Semua Perangkat Daerah
	Cakupan nilai maturitas SPIP Perangkat Daerah (%)	70	83,55	119,36	Semua Perangkat Daerah

Sumber data : LKPJ Wali Kota Tasikmalaya Tahun 2022

### E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 21 Program Daerah, 165 Program Perangkat Daerah dan 1817 kegiatan diseluruh Perangkat Daerah, adapun capaiannya telah dijelaskan di setiap sasaran diatas , adapun Program pendukung sekaligus anggaran pendukung dari keseluruhan sasaran adalah sebagai berikut :

NO	PrOGRAM	KEUANGAN		
	PERANGKAT DAERAH	PAGU	REALISASI	
			(Rp.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>31.433.869.330</b>	<b>30.731.496.243</b>	<b>97,77</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.745.515.056	26.052.284.208	97
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	4.022.170.584	4.021.298.478	100
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	666.183.690	657.913.557	99
<b>2</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>71.341.284.280</b>	<b>68.809.643.761</b>	<b>96,45</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	48.603.616.148	47.498.036.034	97,73
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	22.737.668.132	21.311.607.727	93,73
<b>3</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>	<b>15.814.046.043</b>	<b>15.570.245.257</b>	<b>98,46</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.272.703.045	13.109.572.581,00	98,77
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.682.369.100	1.661.397.191	98,75
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	858.973.898	799.275.485	93,05
<b>4</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>	<b>624.303.093.464</b>	<b>599.074.197.785</b>	<b>95,96</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	389.237.801.574	372.896.057.655	95,80
	Program Pengembangan Kurikulum	66.993.226	66.993.150	100
	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	93.850.000	93.835.600	99,98
<b>5</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>	<b>135.323.509.203,00</b>	<b>128.061.796.660,68</b>	<b>94,63</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	126.323.140.843.00	24.061.796.660.68	98.21
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	9.000.368.360.00	4.000.000.000.00	44.44
<b>6</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG</b>	<b>278.697.192.471,00</b>	<b>251.321.256.337,00</b>	<b>90,18</b>
	Program Penunjang UrusanPemerintah Daerah	13.634.374.811	13.446.666.258	98,62





NO	PROGRAM	KEUANGAN		
	PERANGKAT DAERAH	PAGU	REALISASI	
			(Rp.)	(%)
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	51.345.957.946	46.636.757.705	90,83
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10.023.830.014	9.732.769.543	97,10
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	9.585.053.000	9.502.175.643	99,14
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	32.154.680.000	29.203.685.427	90,82
	Program Pengembangan Permukiman	75.441.490.000	75.107.699.156	99,56
	Program Penataan Bangunan Gedung	36.562.760.500	31.786.497.672	86,94
	Program Penyelenggaraan Jalan	48.214.166.200	34.265.302.835	71,07
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	115.000.000	86.555.200	75,27
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.558.539.900	1.495.353.548	95,95
	Program Penatagunaan Tanah	61.340.100	57.793.350	94,22
<b>7</b>	<b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>19.668.232.698,00</b>	<b>19.138.262.634,00</b>	<b>97,31</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.529.747.098	5.390.379.328	97,48
	Program Pengembangan Perumahan	397.870.000	195.278.467	49,08
	Program Kawasan Permukiman	5.725.535.600	5.662.384.063	99,58
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	8.015.080.000	7.890.220.776	98,44
<b>8</b>	<b>DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>	<b>24.857.582.360</b>	<b>23.282.364.281</b>	<b>93,66</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.746.115.764	11.622.184.292	98,94
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	202.100.000	201.686.400	99,80
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	155.000.000	155.000.000	100,00
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	155.163.646	154.822.825	99,78
	Program Pengembangan Umkm	407.250.000	406.055.243	99,71
	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	25.000.000	24.575.070	98,30
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	3.900.097.950	3.852.086.373	98,77
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1.190.000.000	189.626.920	15,94
	Program Pengembangan Ekspor	480.000.000	465.485.722	96,98
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	488.750.000	483.981.097	99,02
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	400.000.000	398.132.405	99,53
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	5.703.105.000	5.323.727.934	93,35%
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	5.000.000	5.000.000	100



NO	PROGRAM	KEUANGAN		
	PERANGKAT DAERAH	PAGU	REALISASI	
			(Rp.)	(%)
9	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	<b>6.198.169.800,00</b>	<b>5.872.624.417,00</b>	<b>94,75</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22.500.000	22.500.000	100,00
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	6.175.669.800	5.850.124.417	94,73
10	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>10.342.821.434,00</b>	<b>10.220.653.366,00</b>	<b>98,82</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.638.664.634	9.517.956.116	98,75
	Program Pendaftaran Penduduk	297.771.200	296.938.265	99,72
	Program Pencatatan Sipil	185.000.000	184.970.600	99,98
	Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan	221.385.600	220.788.385	99,73
11	<b>DINAS SOSIAL</b>	<b>26.414.445.012</b>	<b>26.256.306.904</b>	<b>99,40</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.238.147.505	7.134.809.895	98,57
	Program Pemberdayaan Sosial	2.355.000.000,00	2.338.626.274,00	99,30
	Program Rehabilitasi Sosial	9.596.114.000,00	9.568.671.937,00	99,71
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	6.197.883.407,00	6.188.392.350,00	99,85
	Program Penanganan Bencana	302.806.000,00	302.719.100,00	99,97
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	724.494.100,00	723.087.348,00	99,81
12	<b>DINAS TENAGA KERJA</b>	<b>7.076.324.837</b>	<b>6.900.532.006</b>	<b>97,52</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahandaerah Kabupaten/Kota	5.037.074.837	4.942.608.221	98,12
	"Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.418.000.000	1.354.763.620	95,54
	Program Penempatan Tenaga Kerja	321.250.000	309.651.050	96,39
	Program Hubungan Industrial	300.000.000	293.509.115	97,84
13	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN</b>	<b>41.859.090.718</b>	<b>41.121.245.290</b>	<b>98,24</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	15.016.691.102	14.933.986.352	99,45
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	50.000.000	49.441.250	98,88
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	820.000.000	801.284.095	97,72
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	40.000.000	39.830.500	99,58
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	10.000.000	9.862.100	98,62
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	5.098.400.000	5.018.544.292	98,43
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	300.000.000	292.725.073	97,58
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.383.100.000	1.331.351.194	96,26



NO	PROGRAM	KEUANGAN		
	PERANGKAT DAERAH	PAGU	REALISASI	
			(Rp.)	(%)
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	235.000.000	228.408.444	97,20
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	14.289.015.263	13.851.676.665	96,94
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.385.000.000	2.353.829.640	98,69
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	395.000.000	389.606.104	98,63
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.198.484.353	2.178.721.897	99,10
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	80.000.000	76.544.800	95,68
	Program Penyuluhan Pertanian	488.400.000	476.172.505	97,50
<b>14</b>	<b>DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA</b>	<b>25.838.854.380</b>	<b>25.534.954.053</b>	<b>98,82</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.235.668.380	6.130.255.209	98,31
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2.488.970.000	2.480.829.540	99,67
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	9.507.120.000	9.498.366.868	99,91
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1.137.095.000	1.133.178.922	99,66
	Program Pengembangan Kebudayaan	75.000.000	74.657.400	99,54
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	200.000.000	199.537.750	99,77
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	403.311.421	374.580.297	92,88
	Program Pemasaran Pariwisata	631.337.000	590.366.925	93,51
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	3.395.352.579	3.333.982.450	98,19
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.765.000.000	1.719.198.692	97,41
<b>15</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	<b>7.099.450.797</b>	<b>6.869.837.902</b>	<b>96,77</b>
	Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.412.243.533	6.193.148.772	96,58
	Program Promosi Penanaman Modal	266.436.000	262.192.680	98
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	369.695.000	366.904.750	99,25
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	51.076.264	47.591.700	93,18
<b>16</b>	<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>17.229.769.498</b>	<b>15.150.167.994</b>	<b>87,93</b>
	<i>Program Pengendalian Penduduk</i>	<i>180.305.000</i>	<i>131.232.572</i>	<i>72,78</i>
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.545.432.000	4.199.625.122	92,39
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	5.384.781.000	3.901.193.994	72,45
	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	173.640.000	166.269.900	95,76
	Program Perlindungan Perempuan	70.000.000	69.689.997	99,56



NO	PROGRAM	KEUANGAN		
	PERANGKAT DAERAH	PAGU	REALISASI	
			(Rp.)	(%)
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	852.280.000	841.687.030	98,76
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	243.760.000	239.428.549	98,22
	Program Perlindungan Khusus Anak	150.760.000	150.267.289	99,67
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.628.811.498	5.450.773.541	96,84
<b>17</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>37.018.512.546</b>	<b>36.633.164.497</b>	<b>98,96</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.986.415.596	16.861.492.006	99,26
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	231.000.000	221.220.900	95,77
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	308.630.000	299.674.760	97,10
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	3.670.100.000	3.555.641.256	96,88
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	27.500.000	27.313.040	99,32
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	30.000.000	29.828.250	99,43
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	25.000.000	24.899.236	99,60
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	19.000.000	18.592.220	97,85
	Program Pengelolaan Persampahan	11.014.423.375	10.925.877.110	99,20
	Program Pengelolaan Persampahan (Uptd)	4.706.443.575	4.668.625.719	99,20
<b>18</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH</b>	<b>6.532.867.266</b>	<b>6.432.506.273</b>	<b>98,46</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.083.408.266,00	5.027.362.849,00	98,90
	Program Pembinaan Perpustakaan	1.054.229.000,00	1.037.766.137,00	98,44
	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	24.356.000,00	24.136.350,00	99,10
	Program Pengelolaan Arsip	370.874.000,00	343.240.937,00	92,55
<b>19</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>17.718.072.340</b>	<b>17.609.623.104</b>	<b>99,39</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.068.336.440	5.992.419.368	98,75
	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	986.560.000	980.510.225	99,39
	Program Aplikasi Informatika	10.169.176.000	10.153.288.656	99,84
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	200.000.000	192.984.071	96,49
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	293.999.900	290.420.784	98,78
<b>20</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	<b>13.339.631.794</b>	<b>13.250.318.633</b>	<b>99,33</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.168.863.794	12.094.530.637	99,39
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1.170.768.000	1.155.787.996	98,72
<b>21</b>	<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>26.223.459.520</b>	<b>24.273.967.492</b>	<b>92,57</b>



NO	PROGRAM	KEUANGAN		
	PERANGKAT DAERAH	PAGU	REALISASI	
			(Rp.)	(%)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.971.484.015	19.364.480.057	92,34
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.251.975.505	4.909.487.435	93,48
<b>22</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>14.938.004.685</b>	<b>14.530.189.013</b>	<b>97,27</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.396.204.685	11.088.101.919	97,30
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.415.000.000	1.348.742.156	95,32
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.226.800.000	1.211.632.071	98,76
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	900.000.000	881.712.867	97,97
<b>23</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>16.849.317.342</b>	<b>16.197.441.263</b>	<b>96,13</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.748.607.342	10.379.485.978	96,57
	Program Kepegawaian Daerah	4.396.310.000	4.114.266.659	93,58
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.704.400.000	1.703.688.626	99,96
<b>24</b>	<b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>	<b>29.400.275.428,00</b>	<b>26.603.469.058,00</b>	<b>90,49</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.778.785.009,00	12.524.941.190,00	99,66
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	10.076.374.169,00	7.835.418.412,00	77,76
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	6.545.116.250,00	6.243.109.456,00	95,39
<b>25</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>13.515.884.312,00</b>	<b>11.925.278.284,00</b>	<b>88,23</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,911,612,280	3,761,007,747	96.15
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	426,789,600	388,222,142	90.96
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2,345,371,600	1,450,756,023	61.86
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	6,250,678,166	5,958,155,485	95.32
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	141,164,233	108,310,550	76.73
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	440,268,433	258,826,337	58.79



NO	PROGRAM	KEUANGAN		
	PERANGKAT DAERAH	PAGU	REALISASI	
			(Rp.)	(%)
26	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	<b>16.849.317.342,00</b>	<b>16.197.440.604,00</b>	<b>96,13</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.748.607.342,00	10.379.485.978,00	96,57
	Program Kepegawaian Daerah	4.396.310.000,00	4.114.266.000,00	93,58
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.704.400.000,00	1.703.688.626,00	99,96
27	<b>KECAMATAN CIHIDEUNG</b>	<b>9.784.523.538,00</b>	<b>9.722.039.200,00</b>	<b>99,36</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.849.148.538	6.820.835.833	99,59
	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	79.475.000	79.075.000	99,50
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.761.300.000	2.735.663.692	99,07
	Program Koordinasi Ketentraman Ketertiban Umum	60.600.000	52.464.875	86,58
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	34.000.000	33.999.800	100,00
28	<b>KECAMATAN TAWANG</b>	<b>9.276.475.636,00</b>	<b>9.222.485.231,00</b>	<b>99,42</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.577.435.636,00	6.535.647.052,00	99,36
	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	135.940.000,00	135.498.800,00	99,68
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.506.100.000,00	2.495.844.379,00	99,59
	Program Koordinasi Ketentraman Ketertiban Umum	38.000.000,00	37.995.000,00	99,99
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	19.000.000,00	17.500.000,00	92,11
29	<b>KECAMATAN CIPEDES</b>	<b>9.551.694.791</b>	<b>9.494.595.036</b>	<b>94,08</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.158.204.791	6.131.588.383	99,57
	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	682.617.000	678.301.778	99,37
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.435.460.000	2.412.888.875	99,07
	Program Koordinasi Ketentraman Ketertiban Umum	39.413.000	37.081.000	94,08
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	236.000.000	234.735.000	99,46
30	<b>KECAMATAN INDIHIANG</b>	<b>10.522.254.522,00</b>	<b>10.432.384.706,00</b>	<b>99,15</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.315.550.682	7.264.400.562	99,30
	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	393.878.400	391.134.800	99,30
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.704.740.000,00	2.681.811.494,00	99,15
	Program Koordinasi Ketentraman Ketertiban Umum	53.240.000	46.343.000	87,05
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	54.845.440	48.694.850	88,79
31	<b>KECAMATAN MANGKUBUMI</b>	<b>12.438.868.085,00</b>	<b>12.343.104.847,00</b>	<b>99,23</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.635.900.385	8.597.845.594	99,56



NO	PROGRAM	KEUANGAN		
	PERANGKAT DAERAH	PAGU	REALISASI	
			(Rp.)	(%)
	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	282.353.500	275.492.740	97,57
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3.385.120.000,00	3.345.651.593,00	98,83
	Program Koordinasi Ketentraman Ketertiban Umum	52.500.000	52.387.200	99,79
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	82.994.200	71.727.720	86,42
<b>32</b>	<b>KECAMATAN TAMANSARI</b>	<b>12.224.060.809,00</b>	<b>12.158.300.030,00</b>	<b>99,46</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7,903,880,859	7,878,288,939	99.68
	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	983,746,050	980,084,850	99.63
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3,244,919,950	3,209,740,191	98.92
	Program Koordinasi Ketentraman Ketertiban Umum	46,513,950	46,500,500	99.97
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	45,000,000	43,685,550	97.08
<b>33</b>	<b>KECAMATAN BUNGURSARI</b>	<b>12.503.879.118,00</b>	<b>12.426.496.601,00</b>	<b>99,38</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8,469,489,118	8,424,359,772	99.47
	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	1,001,649,000	994,358,200	99.27
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.915.880.000,00	2.890.965.079,00	99,15
	Program Koordinasi Ketentraman Ketertiban Umum	43,861,000	43,856,750	99.99
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	73,000,000	72,956,800	99.94
<b>34</b>	<b>KECAMATAN CIBEREUM</b>	<b>14.085.002.534,00</b>	<b>14.010.461.157,00</b>	<b>99,47</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.779.596.234,00	9.743.058.145	99,63
	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	799.804.000,00	798.092.265	99,79
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3.380.955.000,00	3.345.577.747,00	98,95
	Program Koordinasi Ketentraman Ketertiban Umum	70.643.000,00	70.099.800	99,23
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	54.004.300,00	53.633.200	99,31
<b>35</b>	<b>KECAMATAN PURBARATU</b>	<b>10.188.123.936,00</b>	<b>10.130.306.627,00</b>	<b>99,43</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.201.008.525,00	7.175.148.559,00	99,64
	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	269.554.511,00	254.660.000,00	94,47
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.602.061.900,00	2.588.669.068,00	99,49
	Program Koordinasi Ketentraman Ketertiban Umum	43.484.000,00	43.244.000,00	99,45
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	72.015.000,00	68.585.000,00	95,24
<b>36</b>	<b>KECAMATAN KAWALU</b>	<b>14.090.716.464</b>	<b>13.994.200.896</b>	<b>99,32</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.672.731.764	9.637.794.713	99,64%

NO	PROGRAM	KEUANGAN		
	PERANGKAT DAERAH	PAGU	REALISASI	
			(Rp.)	(%)
	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	443.450.500	437.736.240	98,71%
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3.870.950.000	3.816.705.593	98,60%
	Program Koordinasi Ketentraman Ketertiban Umum	17.492.000	17.306.000	98,94%
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	86.092.200	84.658.350	98,33%

Sumber data : BPKAD Kota Tasikmalaya Tahun 2022

## F. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \left[ \frac{\text{Realisasi Biaya} - \text{Target Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai, Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - \left[ \frac{\text{Realisasi Biaya} - \text{Target Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

Pada tahun 2022 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 1.571.503.357.443,00 sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. 1.650.548.678.333,00 Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 95,21 %, dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2022 secara umum terdapat efisiensi pada realisasi anggaran yang dilaksanakan meskipun tidak signifikan, namun bila dilihat pada level kegiatan nampak adanya efisiensi penggunaan sumber daya pada beberapa kegiatan hampir di seluruh Perangkat Daerah, upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dalam mencapai target pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan multipihak





dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan, penggunaan tenaga ahli dari perguruan tinggi sebagai pemateri, tim penilai, pemberi masukan, dan kerjasama dengan pihak swasta melalui CSR untuk melaksanakan kegiatan, adapun total anggaran untuk pendukung seluruh sasaran yang dilaksanakan Perangkat Daerah dalam menunjang sasaran Perangkat Daerah.



# BAB III

●

## CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN URUSAN TUGAS PEMBANTUAN

### **BAB III**

## **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dijelaskan bahwa tugas pembantuan merupakan penugasan sebagian urusan dari pemerintah kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa, dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintahan desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa. Secara lebih lanjut, tugas pembantuan juga dapat diartikan sebagai tugas pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintahan pusat atau pemerintah yang lebih tinggi, dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya. Maksud diadakan asas tugas pembantuan dalam pembangunan di daerah bertujuan agar keterbatasan jangkauan aparatur pemerintah pusat atau provinsi dapat ditanggulangi melalui kewenangan aparatur daerah kabupaten/kota.

Adanya tugas pembantuan juga difungsikan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Terkait pelaksanaan tugas pembantuan pemerintah pusat melalui kementerian teknis memberikan pendanaan kepada pemerintah daerah melalui dinas/instansi teknis di daerah untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah yang didasarkan oleh usulan dari dinas/instansi teknis daerah. Penugasan oleh pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan asas tugas pembantuan ditetapkan dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian ditetapkan setelah berkoordinasi dengan menteri. Sedangkan penugasan oleh daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota dan kepada desa berdasarkan asas tugas pembantuan ditetapkan dengan peraturan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggaran untuk melaksanakan tugas pembantuan disediakan oleh yang menugasi. Pertimbangan yang mendasari adanya tugas pembantuan ini adalah pelaksanaan tugas tersebut lebih efektif dan efisien apabila dilaksanakan oleh pemerintah daerah sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum.

### **3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah sebanyak dua kali dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 pada pasal 19 ayat (4) menyebutkan bahwa penugasan oleh pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan asas tugas pembantuan ditetapkan dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah non-kementerian ditetapkan setelah berkoordinasi dengan menteri. Selama tahun 2022 tidak ada peraturan menteri/kepala lembaga yang menetapkan tugas pembantuan sehingga tahun 2022 tidak ada tugas pembantuan pusat yang dilaksanakan oleh Kota Tasikmalaya. Berkaitan dengan hal tersebut maka tidak ada target kinerja dan realisasi yang dapat dilampirkan.

### **3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah sebanyak dua kali dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 pada pasal 20 ayat (2) menyebutkan bahwa penugasan oleh daerah provinsi kepada daerah kabupaten/ kota dan kepada desa berdasarkan asas tugas pembantuan ditetapkan dengan peraturan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selama tahun 2022 tidak ada peraturan gubernur yang menetapkan tugas pembantuan sehingga tahun 2022 tidak ada tugas pembantuan daerah provinsi yang dilaksanakan oleh Kota Tasikmalaya. Berkaitan dengan hal tersebut maka tidak ada target kinerja dan realisasi yang dapat dilampirkan.

### **3.3. Hambatan / Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian**

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas pembantuan baik dari pusat maupun provinsi masih belum ditemukan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan, baik dari aspek administrasi, keuangan maupun teknis kegiatan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya karena memang tidak ada tugas pembantuan selama tahun 2022.

### **3.4. Saran dan Tindak Lanjut**

Pada bagian ini akan berisi terkait masukan dan saran serta langkah tindak lanjut untuk penyelesaian permasalahan sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan tugas pembantuan ke depan. Terkait dengan masukan dan saran terkait tugas pembantuan adalah agar dapat segera disahkan terkait dengan rancangan peraturan pemerintah tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang telah disusun oleh Kementerian Dalam Negeri. Kedepannya, setelah ada penetapan peraturan pemerintah tersebut yang berkaitan dengan tugas pembantuan maka Pemerintah Kota Tasikmalaya akan berupaya melakukan tindak lanjut perencanaan dan pelaksanaan tugas pembantuan dengan baik.



# BAB IV

•  
**PENERAPAN DAN PENCAPAIAN  
SPM**

## **BAB IV**

### **PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)**

Setelah dijelaskan terkait dasar pertimbangan penerapan standar pelayanan minimal, dasar penerapan standar pelayanan minimal, kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan gambaran orientasi dan komitmen yang ditetapkan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran di bab I (satu). Pada bagian ini akan dijabarkan terkait penerapan dan hasil capaian standar pelayanan minimal Kota Tasikmalaya Tahun 2022, sebagai berikut :

#### **4.1 Urusan Pendidikan**

Laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal Urusan Pendidikan memuat :

##### **4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Jenis pelayanan dasar SPM terkait urusan pendidikan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya antara lain sebagai berikut :

**Tabel 4. 1**  
**Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan**

<b>No.</b>	<b>Jenis Pelayanan Dasar</b>	<b>Indikator Pencapaian</b>	<b>Batas Waktu Capaian</b>
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	Setiap Tahun
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Setiap Tahun
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5- 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Setiap Tahun

*Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 100 Tahun 2018.*

#### 4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, target pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh urusan pendidikan yang diampu oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 ditetapkan target sebagai berikut :

**Tabel 4. 2**  
**Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Pencapaian (%)	APBD Tahun 2022 (Rp)
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100	1.080.836.082,-
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	410.586.666,-
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5- 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	275.864.800,-

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2022

#### 4.1.3 Realisasi

Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal oleh urusan pendidikan yang diampu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. 3**  
**Realisasi Standar Pelayanan Minimal Urusan**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target Pencapaian (%)	Capaian Kinerja (%)
1.	Pendidikan Dasar	100	95.04
2.	Pendidikan Kesetaraan	100	68.03
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	100	90.51

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2022



#### 4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang disiapkan guna mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal terkait urusan pendidikan yang diampu oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 yaitu :

**Tabel 4. 4**  
**Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)
1.	Pendidikan Dasar	1.080.836.082,-	1.019.036.950	94,28
2.	Pendidikan Kesetaraan	410.586.666,-	396.035.172	96,46
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	275.864.800,-	251.502.942	91,17
<b>TOTAL</b>		<b>1.767.287.548</b>	<b>1.666.575.064</b>	<b>94,30</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2022

#### 4.1.5 Dukungan Personil

Dukungan personil dalam pemberian Standar Pelayanan Minimal terkait urusan pendidikan yang diampu oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 melibatkan sumber daya manusia yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya sebanyak 2,553 orang dengan rincian jumlah struktural sebanyak 17 orang, jabatan fungsional umum sebanyak 234 orang, dan jabatan fungsional tertentu sebanyak 2,303 orang.

**Tabel 4. 5**  
**Rekapitulasi Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pendidikan Berdasarkan Jenis Jabatan**

JENIS JABATAN									
II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	V.a	Struktural	JFU	JFT	JUMLAH
1	1	4	9	1	1	17	234	2,303	<b>2,553</b>

Sumber: BKPSDM Kota Tasikmalaya, 2022

**Tabel 4. 6**  
**Jumlah Tenaga Pendidikan Tahun 2022**

NO	Jenjang	Jumlah Seluruh Guru			Jumlah Total Guru Memiliki Kualifikasi Minimal S1/DIV dan Sertifikat Pendidik		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	TK	6	443	449	2	264	266
2	SD/MI	853	2.248	3.101	432	1.090	1.522
3	SMP/MTs	700	1.057	1.757	355	1.101	1.456
4	Kesetaraan	67	68	135	4	3	7

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2022

#### 4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan SPM Urusan Pendidikan Kota Tasikmalaya Tahun 2022 antara lain :

**Tabel 4. 7**  
**Jumlah Tenaga Pendidikan Tahun 2022**

NO	KENDALA	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Kesulitan dalam menentukan sasaran	Sumber Daya Manusia kurang memahami Teknis pelaksanaan SPM	Sosialisasi tentang aturan pelaksanaan SPM;
2	Kurang Optimalnya pelayanan Terhadap peserta didik	Kekurangan tenaga kependidikan	Penambahan Tenaga pendidik dan melakukan Pemetaan Guru dan Penugasan Guru Non PNS untuk memenuhi kekurangan Guru yang didanai dari bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai petunjuk teknis yang telah di tetapkan

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2022

#### 4.2 Urusan Kesehatan

##### 4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar terkait urusan kesehatan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya antara lain sebagai berikut:

**Tabel 4.8.**  
**Jenis Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Batas waktu capaian
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Setiap tahun
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Setiap tahun
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Setiap tahun
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Setiap tahun
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Setiap tahun
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Setiap tahun
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	yang mendapatkan layanan kesehatan	Setiap tahun

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Batas waktu capaian
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Setiap tahun
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Setiap tahun
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Setiap tahun
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Setiap tahun
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	Setiap Tahun

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 100 Tahun 2018.

#### 4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal urusan kesehatan yang diampu oleh Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 ditetapkan target sebagai berikut

**Tabel 4.9.**  
**Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Pencapaian (%)	APBD Tahun 2022 (Rp)
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100	200.160.000
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100	338.558.840
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100	93.600.000
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100	179.232.160
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100	108.400.000

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Pencapaian (%)	APBD Tahun 2022 (Rp)
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100	132.400.000
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100	119.480.000
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	81.200.000
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100	81.200.000
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100	216.000.000
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100	132.000.000
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	339.200.000

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, 2022

#### 4.2.3 Realisasi

Realisasi Standar Pelayanan Minimal oleh urusan kesehatan yang diampu oleh Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.10.**  
**Realisasi Standar Pelayanan Minimal Urusan**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target Pencapaian (%)	Capaian Kinerja (%)
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	99,87
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	98,79
4.	Pelayanan kesehatan balita	100	90,34
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	97,70

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target Pencapaian (%)	Capaian Kinerja (%)
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	37,51
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	30,36
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100	74,76
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100	74,91
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100	91,26
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100	96,55
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100	82,22

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, 2022

#### 4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang disiapkan guna mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal terkait urusan kesehatan yang diampu oleh Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.11**  
**Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	200.160.000	191.338.000	96
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	338.558.840	237.380.950	70
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	93.600.000	88.276.500	94
4.	Pelayanan kesehatan balita	179.232.160	172.182.920	96
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	108.400.000	98.695.559	91
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	132.400.000	132.028.965	100
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	119.480.000	107.886.500	90
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	81.200.000	80.121.250	99
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	81.200.000	79.910.000	98
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	216.000.000	212.139.500	98
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	132.000.000	130.868.750	99

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	339.200.000	337.037.915	99
<b>TOTAL</b>		<b>2.021.431.000</b>	<b>1.867.866.809</b>	<b>92</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, 2022

#### 4.2.5 Dukungan Personil

Dukungan personil dalam pemberian Standar Pelayanan Minimal terkait urusan kesehatan yang diampu oleh Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 melibatkan sebanyak 1.472 orang. Adapun rekapitulasi personil pada Dinas Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.12**  
**Dukungan Personil Urusan Kesehatan Berdasarkan Jenis Jabatan**

NAMA PERANGKAT DAERAH	JENIS JABATAN								
	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	Struktural	JFU	JFT	JUMLAH
Dinas Kesehatan	1	1	4	4	24	34	169	657	<b>860</b>
RSUD dr. Soekardjo	1	3	7			11	81	520	<b>612</b>
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>45</b>	<b>250</b>	<b>1.177</b>	<b>1.472</b>

Sumber: BKPSDM Kota Tasikmalaya, 2022

#### 4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa capaian SPM kesehatan kota Tasikmalaya tahun 2022 secara umum masih belum mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan relatif menurun terutama sejak terjadi pandemi Covid-19. Meskipun tahun 2022 mengalami sedikit peningkatan, hal ini seiring dengan semakin kondusifnya situasi, sehingga membuka peluang untuk melakukan pelayanan kesehatan dengan cara kontak langsung.

Uraian tentang kendala, permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam upaya pencapaian SPM kesehatan Kota Tasikmalaya tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.13.**  
**Permasalahan dan Solusi**

NO	JENIS LAYANAN	KENDALA	MASALAH	SOLUSI
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan program secara kuantitas sudah terpenuhi, namun secara kualitas	Kurangnya pelatihan dan kegiatan monitoring akibat kurangnya anggaran; sarpras masih terbatas	Pembinaan dan monitoring, bekerja sama dengan IBI; advokasi anggaran
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Masih ada persalinan diluar fasilitas kesehatan	Belum seluruh Puskesmas dapat melayani persalinan	Penguatan Kapasitas Puskesmas PONED; Peningkatan kualitas home care
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Masih ada bayi baru lahir yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar selama usia	Masih ada bayi yang lahir diluar faskes	Penguatan Program SHK; Kunjungan dr. Spesialis Anak ke PKM; Supervisi ke PKM
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Masih ada balita yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelayanan kesehatan balita	Penguatan MTBS; Penguatan SDIDTK; Kunjungan Ke Posyandu
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Belum semua sekolah terpenuhi sarpras pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	Kurangnya anggaran untuk UKS KIT, Form Penjarangan, Buku Raport Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Usia pendidikan dasar Melalui PKPR Peningkatan kemitraan dengan LS, TOMA, TOGA, LSM, ORMAS, Swasta, dll
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Capaian masih dibawah 50% atau belum tuntas	Kader Posbindu PTM belum semua mendapatkan pelatihan; Sarana dan prasarana Posbindu PTM masih kurang; masih terbatasnya Ketersedian KIT Posbindu PTM dan bahan habis pakai (BMHP); kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan usia	Pembinaan kader Posbindu; advokasi anggaran untuk penyediaan sarpras Posbindu; Sosialisasi Posbindu

NO	JENIS LAYANAN	KENDALA	MASALAH	SOLUSI
			produktif	
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Capaian masih dibawah 50% atau belum tuntas	Kunjungan/kontak Lansia dengan Tenaga Kesehatan hanya bila lansia sakit; Sarana/prasarana Penunjang Pelayanan Pemeriksaan Lab (Gula darah dan kolesterol ), Buku kesehatan lansia, Lansia Kit, intrimen P3G masih kurang sehingga tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Pengembangan Puskesmas yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Santun Lansia; Peningkatan Pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan Kegiatan Posyandu Terintegrasi; Peningkatan Pelayanan Home Care yang terintegrasi dalam Perkesmas; Peningkatan kemitraan dengan LS, TOMA, TOGA, LSM, ORMAS, Swasta, dll
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Capaian belum 100%	Kurangnya pemanfaatan Posbindu oleh masyarakat; kurangnya dukungan anggaran untuk penyediaan sarpras	Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap pelayanan deteksi dini melalui kegiatan Posbindu PTM; Adokasi pengajuan anggaran untuk penyediaan sarpras; Mengoptimalkan pelaksanaan deteksi dini (skrining) di Puskesmas baik dalam maupun luar gedung
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Capaian belum 100%	Kurangnya pemanfaatan Posbindu oleh masyarakat; kurangnya dukungan anggaran untuk penyediaan sarpras	Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap pelayanan deteksi dini melalui kegiatan Posbindu PTM; Adokasi pengajuan anggaran untuk penyediaan sarpras; Mengoptimalkan pelaksanaan deteksi dini (skrining) di Puskesmas baik dalam maupun luar gedung



NO	JENIS LAYANAN	KENDALA	MASALAH	SOLUSI
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Capaian belum 100%	Sebagian Penderita ODGJ tidak memiliki identitas kependudukan dan jaminan kesehatan; Tidak tersedianya tempat rawat inap untuk penderita ODGJ di RSUD	Kordinasi dengan Dinas Kependudukan dan catatan sipil, Dinas Sosial dan BPJS; Pelayanan rawat inap dirujuk ke RS Marzuki Mahdi
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Capaian belum 100%	Belum maksimalnya jejaring eksternal (DPPM) Kota Tasikmalaya; kurangnya kesadaran masyarakat tentang Tuberkulosis	Pembinaan terhadap DPPM
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Capaian belum 100%	Masih ada kelompok beresiko yang enggan dites HIV	Melaksanakan tes HIV secara pro aktif

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, 2022

### 4.3 Urusan Pekerjaan Umum

#### 4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar terkait urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya antara lain sebagai berikut :

**Tabel 4.14**  
**Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Setiap tahun
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Setiap tahun

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 100 Tahun 2018.

#### 4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, target pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh urusan pekerjaan umum yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 ditetapkan target sebagai berikut :

**Tabel 4.15**  
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Pencapaian (%)	APBD Tahun 2022 (Rp)
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air Minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari	100	10.023.830.014
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	6,595,046,400

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, 2022

#### 4.3.3 Realisasi

Realisasi Standar Pelayanan Minimal oleh urusan pekerjaan umum yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 16**  
Realisasi Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target Pencapaian (%)	Capaian Kinerja (%)
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air Minum sehari-hari	100	100
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	100	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, 2022

#### 4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk memenuhi penerapan Standar Pelayanan Minimal terkait urusan pekerjaan umum yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. 17**  
**Realisasi Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air Minum sehari-hari	10.023.830.014	9.732.769.543	97,10
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	6,595,046,400	6,406,269,290	97.14

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, 2022

#### 4.3.5 Dukungan Personil

Dukungan personil untuk pelaksanaan SPM bidang Urusan Pekerjaan Umum di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya. Adapun total jumlah PNS pada Dinas tersebut yang mengurus SPM Bidang Pekerjaan Umum yaitu sebanyak 89 orang, yang terdiri dari 10 orang struktural, 65 orang jabatan fungsional umum dan 14 orang jabatan fungsional tertentu, sebagai berikut :

**Tabel 4.18**  
**Rekapitulasi Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas PUTR Berdasarkan Jenis Jabatan**

JENIS JABATAN								
II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	Struktural	JFU	JFT	JUMLAH
1	1	5	2	1	10	65	14	89

Sumber: BKPSDM Kota Tasikmalaya, 2022

#### 4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Pemerintah Kota Tasikmalaya terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya mengalami beberapa kendala dan permasalahan juga dari hal tersebut dicarikan solusi dalam pelaksanaannya. Adapun kendala, permasalahan dan solusi dari pelaksanaan pemenuhan SPM dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 4.19**  
**Permasalahan dan Solusi**

NO	KENDALA	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Pembangunan Infrastruktur Air Minum dan Air Limbah belum menjadi isu utama di Kota Tasikmalaya	Usulan pembangunan infrastruktur Air Minum dan Air Limbah dari masyarakat relatif sedikit	Advokasi pentingnya layanan Air Minum dan Air Limbah kepada masyarakat dan pengambil kebijakan
		Anggaran pembangunan infrastruktur Air Minum dan Air Limbah rendah	Menggali sumber - sumber pembiayaan lain diluar anggaran pemerintah
2	Keterbatasan Lahan untuk pembangunan Infrastruktur Air Minum dan Air Limbah	Terbatasnya Lahan untuk pembangunan Infrastruktur Air Minum dan Air Limbah khususnya di kawasan padat perkotaan	Pemerintah melakukan pembebasan lahan untuk membangun Infrastruktur Air Minum dan Air Limbah skala perkotaan
3	Belum adanya lembaga operator pengelola penyediaan air minum	Kota Tasikmalaya belum memiliki lembaga operator pengelola air minum (PDAM/ UPTD SPAM)	Lembaga operator pengelola air minum (PDAM/ UPTD SPAM)

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, 2022

#### 4.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

##### 4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar terkait urusan perumahan rakyat yang diberikan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang antara lain sebagai berikut :

**Tabel 4.20**  
**Jenis Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Setiap Tahun
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/ kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Setiap Tahun

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 100 Tahun 2018

#### 4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yang diampu oleh Dinas Perumahan dan kawasan permukiman Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 ditetapkan target sebagai berikut :

**Tabel 4.21**  
**Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Pencapaian (%)	APBD Tahun 2022 (Rp)
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	197.970.000
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/ kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100	200.000.000

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya, 2022

#### 4.4.3 Realisasi

Realisasi Standar Pelayanan Minimal oleh urusan perumahan rakyat yang diampu oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.22**  
**Realisasi Standar Pelayanan Minimal Urusan**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target Pencapaian (%)	Capaian Kinerja (%)
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	100	100
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	100	20

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya, 2022

#### 4.4.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Standar Pelayanan Minimal terkait urusan perumahan rakyat yang diampu oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.23**  
**Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	197.970.000	195.278.467	98,64
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	200.000.000	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>397.970.000</b>	<b>195.278.467</b>	<b>49,07</b>

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya, 2022

#### 4.4.5 Dukungan Personil

Perangkat daerah pelaksana Standar Pelayanan Minimal terkait urusan perumahan rakyat yang diampu oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya pada tahun 2022. Adapun total jumlah PNS pada Dinas tersebut yang mengurus SPM Bidang Perumahan Rakyat yaitu sebanyak 28 orang, yang terdiri dari 6 orang struktural, 17 orang jabatan fungsional umum dan 5 orang jabatan fungsional tertentu, sebagai berikut :

**Tabel 4.24**  
**Rekapitulasi Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas PRKP Berdasarkan Jenis Jabatan**

JENIS JABATAN							
II.b	III.a	III.b	IV.a	Struktural	JFU	JFT	JUMLAH
1	1	2	2	6	17	5	<b>28</b>

Sumber: BKPSDM Kota Tasikmalaya, 2022

#### 4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Pemerintah Kota Tasikmalaya terutama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengalami beberapa kendala dan permasalahan juga dari hal tersebut dicarikan solusi dalam

pelaksanaannya. Adapun kendala, permasalahan dan solusi dari pelaksanaan pemenuhan SPM dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 4.25**  
**Permasalahan dan Solusi**

No	Kendala	Permasalahan	Solusi
1	Kegiatan yang mendukung SPM belum menjadi Prioritas	Minimnya anggaran untuk memenuhi kegiatan SPM, baik kegiatan inti maupun kegiatan pendukung	Melakukan sinergitas antar Pemangku kebijakan terkait SPM sehingga dapat Mengimplementasikan kegiatan SPM dengan optimal

#### **4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

##### **4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar terkait urusan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

**Tabel 4.26**  
**Jenis Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Batas waktu capaian
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	Setiap tahun
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Setiap tahun
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Setiap tahun
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Setiap tahun
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Setiap tahun

*Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 100 Tahun 2018*

#### 4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub

Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 ditetapkan target sebagai berikut :

**Tabel 4.27**  
**Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**  
**Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Pencapaian (%)	APBD Tahun 2022 (Rp)
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	100	91.740.000
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	51.331.000
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	673.851.300
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	1.279.702.800
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	772.025.000

Sumber: Satpol PP dan BPBD Kota Tasikmalaya, 2022



#### 4.5.3 Realisasi

Realisasi Standar Pelayanan Minimal oleh urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.28**  
**Realisasi Standar Pelayanan Minimal Urusan**  
**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target Pencapaian (%)	Capaian Kinerja (%)
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	100	86.87
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	100	65.00
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	67.27
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	97.33
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	96.53

Sumber: Satpol PP dan BPBD Kota Tasikmalaya, 2022

#### 4.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Standar Pelayanan Minimal terkait urusan perumahan rakyat yang diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.29**  
**Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	91.740.000	91.739.900	99,99
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	51.331.000	51.028.300	99,41
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	673.851.300	654.018.474	97,06
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1.279.702.800	1.223.499.157	95,61
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	772.025.000	758.830.400	98,29
<b>TOTAL</b>		<b>2.868.650.100</b>	<b>2.779.116.231</b>	<b>96,88</b>

Sumber: Satpol PP dan BPBD Kota Tasikmalaya, 2022

#### 4.5.5 Dukungan Personil

Perangkat daerah pelaksana Standar Pelayanan Minimal terkait urusan perumahan rakyat yang diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya pada tahun 2022. Adapun total jumlah PNS pada Dinas tersebut yang mengurus SPM Bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yaitu sebanyak 133 orang, yang terdiri dari 19 orang struktural, 111 orang jabatan fungsional umum dan 3 orang jabatan fungsional tertentu, sebagai berikut :

**Tabel 4.30.**  
**Rekapitulasi Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)**  
**Berdasarkan Jenis Jabatan**

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	JENIS JABATAN							JUMLAH
		II.b	III.a	III.b	IV.a	Struktural	JFU	JFT	
1	Satuan Polisi Pamong Praja	1	1	3	9	14	72		86
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1		3	1	5	39	3	47
	<b>JUMLAH</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>111</b>	<b>3</b>	<b>133</b>

Sumber: BKPSDM Kota Tasikmalaya, 2022

#### 4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengalami beberapa kendala dan permasalahan juga dari hal tersebut dicarikan solusi dalam pelaksanaannya. Adapun kendala, permasalahan dan solusi dari pelaksanaan pemenuhan SPM dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 4.31.**  
**KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI URUSAN KETENTRAMAN,**  
**KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN**  
**(SATPOL PP KOTA TASIKMALAYA)**

No	Kendala	Permasalahan	Solusi
1	Sarana dan Prasarana Sat Pol PP belum sesuai dengan standar Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan	Belum memiliki gedung kantor yang definitive sampai dengan akhir tahun 2022 masih bestatus kontrak Kendaraan operasional dan perlengkapan operasional dalam kondisi belum lengkap serta dalam kondisi	Pengadaan gedung baru atau memanfaatkan gedung pemerintah Aset Pemerintah Kota. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan Sarana Prasarana sesuai

No	Kendala	Permasalahan	Solusi
	Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja	rusak ringan, sedang dan berat	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja
2	Terhambatnya penyelesaian penegakan Perda	Kurangnya tenaga PPNS	Pengadaan anggota PPNS
3	Belum Bisa melaksanakan Layanan dampak ganti rugi akibat penegakan perda/ perkada	Belum ada Juklak Juknis (standar biaya) terkait layanan dampak ganti rugi akibat penegakan perda/ perkada	Menyusun Juklak dan Juknis Layanan dalam rangka Dampak Penegakan perda/perkada dan mengusulkan standar biaya kepada Walikota

Sumber: Satpol PP Kota Tasikmalaya, 2022

**Tabel 4.32.**  
**KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN (BPBD KOTA TASIKMALAYA)**

No	Kendala	Permasalahan	Solusi
1.	Terkait permasalahan internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang mencakup kelembagaan, ketatalaksanaan, maupun sumber daya manusia	<ol style="list-style-type: none"><li>Belum terakomodirnya program dan kegiatan yang menunjang pada pencapaian SPM dalam RPJMD dan Renja 2022.</li><li>Ruangan yang terbatas yang menghambat optimalnya pelaksanaan tupoksi dengan status gedung yang masih sewa;</li><li>Jumlah personil Satgas PB BPBD yang terbatas, dan masih sangat kurang dalam pelaksanaan tugas dilapangan terutama pada saat penanganan bencana yang luas dan masif;</li><li>Kurangnya SDM pelaksana administrasi, khususnya SDM</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Segera dilakukan revisi RPJMD dan Penyesuaian Renja pada Tahun 2020 sehingga Program dan Kegiatan untuk pencapaian SPM dapat terlaksana;</li><li>Pemenuhan kebutuhan gedung kantor dengan jumlah ruangan yang memadai dan representative pada Tahun 2021 akan lebih dioptimalkan setelah penepatan gedung baru dilaksanakan;</li><li>Optimalisasi dan Peningkatan Kapasitas dan Jumlah Anggota Satgas PB BPBD kota Tasikmalaya dalam Penanganan</li></ol>

No	Kendala	Permasalahan	Solusi
		<p>perencana dan pelaksana teknologi informasi, sehingga kurang terjalin koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan dari maupun antar Seksi dan Sekretariat, yang mengakibatkan belum terintegrasikannya target penerapan dan pencapaian SPM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;</p> <p>e. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai Dalam optimalisasi pelaksanaan tupoksi, diantaranya sarana kendaraan operasional, kelengkapan peralatan Satgas, sarana prasarana penanganan bencana dan sarana penunjang fungsi administrasi dan perkantoran, khususnya kelengkapan penunjang teknologi informasi.</p>	<p>Bencana;</p> <p>d. Perlu adanya peningkatan kapasitas sarana prasarana penunjang dalam penanggulangan bencana;</p> <p>e. Pemenuhan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tasikmalaya;</p> <p>f. Peningkatan koordinasi lintas OPD yang tergabung dalam TIM Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana BPBD Kota Tasikmalaya dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana di daerah.</p>
2.	Terkait Permasalahan factual di Masyarakat	<p>a. Belum terbangunnya kesadaran masyarakat secara menyeluruh terhadap ancaman bencana disekitar tempat tinggalnya.</p> <p>b. Kurangnya kepedulian masyarakat dalam penanggulangan bencana;</p> <p>c. Belum tertibnya masyarakat dalam membuang sampah.</p> <p>d. Belum terintegrasinya pelaksanaan penanggulangan bencana dengan OPD terkait lainnya</p>	

Sumber : BPBD Kota Tasikmalaya, 2022

## 4.6 Urusan Sosial

### 4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar. Penerapan Standar Minimal bidang pelayanan dasar terkait urusan sosial yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya antara lain sebagai berikut:

**Tabel 4.33**  
**Jenis Pelayanan Dasar Urusan Sosial**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Batas waktu capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Setiap Tahun
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Setiap
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Setiap Tahun
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Setiap Tahun
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Setiap Tahun

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 100 Tahun 2018

### 4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada penerapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh urusan sosial yang diampu oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 ditetapkan target sebagai berikut :

**Tabel 4.34**  
**Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Pencapaian (%)	APBD Tahun 2022 (Rp)
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti sosial	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti sosial	100	
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti sosial	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti sosial	100	
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti sosial	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti sosial	100	
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti sosial	100	
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	

Sumber: Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, 2022

#### 4.6.3 Realisasi

Realisasi Standar Pelayanan Minimal oleh urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang diampu oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.35**  
**Realisasi Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target Pencapaian (%)	Capaian Kinerja (%)
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	100	96.00
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	100	98.67
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	100	98.67
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100	98.67
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	100	78.88

Sumber: Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, 2022

#### 4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Standar Pelayanan Minimal terkait urusan perumahan rakyat yang diampu oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.36**  
**Realisasi Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	80.000.000	79.956.500
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	285.000.000	284.980.000
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	60.000.000	59.978.500
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	60.000.000	59.978.500
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	704.806.000	704.710.270

Sumber: Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, 2022

#### 4.6.5 Dukungan Personil

Perangkat daerah pelaksana Standar Pelayanan Minimal terkait urusan perumahan rakyat yang diampu oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya pada tahun 2022. Adapun total jumlah PNS pada Dinas tersebut yang mengelola SPM Bidang Sosial yaitu sebanyak 28 orang, yang terdiri dari 6 orang struktural, 16 orang jabatan fungsional umum dan 6 orang jabatan fungsional tertentu, sebagai berikut :

**Tabel 4.37**  
**Rekapitulasi Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)**  
**Berdasarkan Jenis Jabatan**

JENIS JABATAN							
II.b	III.a	III.b	IV.a	Struktural	JFU	JFT	JUMLAH
1	1	3	1	6	16	6	28

Sumber: BKPSDM Kota Tasikmalaya, 2022

#### 4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Dinas Sosial Kota Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengalami beberapa kendala dan permasalahan juga dari hal tersebut dicarikan solusi dalam pelaksanaannya. Adapun kendala, permasalahan dan solusi dari pelaksanaan pemenuhan SPM dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 4.38.**  
**KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI URUSAN SOSIAL**

No	Kendala	Permasalahan	Solusi
1	Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan SPM urusan sosial belum maksimal	Masih banyaknya masyarakat, khususnya penyandang disabilitas yang kesulitan dalam mengakses sarana dan prasarana diantaranya: <ul style="list-style-type: none"><li>• Sarana dan prasarana yang belum ramah disabilitas</li><li>• Kendaraan operasional yang rusak</li></ul>	Memperbaiki sarana dan prasarana (ruang pelayanan, kendaraan operasional dan aksesibilitas) untuk memaksimalkan pelayanan SPM urusan sosial <ul style="list-style-type: none"><li>• Memperbaiki sarana dan prasarana agar ramah disabilitas</li><li>• Memperbaiki kendaraan operasional yang rusak</li></ul>
2	Kurang memadainya kualitas dan kuantitas SDM	<ul style="list-style-type: none"><li>• Masyarakat belum terlayani dengan optimal dikarenakan SDM yang belum mendapatkan pelatihan</li><li>• Pelayanan SPM urusan sosial melalui banyak proses sehingga waktu penanganan yang dibutuhkan relatif lama</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengikutsertakan SDM dalam pelatihan yang berkaitan dengan pelayanan urusan sosial untuk memperbaiki kualitas SDM agar dapat melayani masyarakat dengan optimal.</li><li>• Memperbaiki regulasi, agar proses pelayanan SPM lebih efektif</li></ul>
3	Tidak semua PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) masuk ke dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sedangkan penerima layanan SPM harus masuk kedalam DTKS	PPKS yang masuk kriteria penerima layanan SPM tidak dapat menerima bantuan dikarenakan tidak masuk kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"><li>• PPKS yang masuk kedalam kriteria penerima layanan SPM didaftarkan agar masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial</li></ul>
4	Kurangnya informasi yang masyarakat terima terkait dengan layanan SPM urusan sosial	<ul style="list-style-type: none"><li>• Informasi program layanan SPM urusan sosial belum tersampaikan sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui jenis pelayanan apa saja yang tersedia.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memaksimalkan penggunaan media informasi seperti spanduk, pamflet, website, facebook, instagram dan whatsapp agar penyebaran informasi mengenai program layanan SPM urusan sosial dapat tersampaikan dengan optimal.</li></ul>



No	Kendala	Permasalahan	Solusi
5	Adanya perubahan kode rekening untuk barang yang akan disalurkan kepada korban bencana yaitu kode rekening Belanja Bahan-Bahan Baku yang harus diubah menjadi kode rekening Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat.	Untuk kode rekening yang sudah diubah tidak bisa langsung direalisasikan karena harus menunggu perubahan anggaran kas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menunggu perubahan anggaran kas</li> </ul>

#### 4.7 Program Dan Kegiatan

Penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 6 (enam) urusan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.38.**  
**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

NO	URUSAN PERANGKAT DAERAH	KEUANGAN		
		PAGU	REALISASI	
			(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5
	<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>	<b>1.372.434.547.701,00</b>	<b>1.300.725.882.758,00</b>	<b>94,78</b>
<b>1</b>	<b>Urusan Pendidikan</b>	<b>624.303.093.464,00</b>	<b>602.137.276.499,00</b>	<b>96,45</b>
	Dinas Pendidikan	624.303.093.464,00	602.137.276.499,00	96,45
<b>2</b>	<b>Urusan Kesehatan</b>	<b>401.225.297.153,00</b>	<b>380.020.900.501,00</b>	<b>94,72</b>
	Dinas Kesehatan	401.225.297.153,00	380.020.900.501,00	94,72
<b>3</b>	<b>Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</b>	<b>278.635.852.371</b>	<b>251.263.462.987</b>	<b>90,18</b>
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	278.635.852.371	251.263.462.987	90,18
<b>4</b>	<b>Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman</b>	<b>19.668.232.698</b>	<b>19.138.262.634</b>	<b>97,31</b>
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	19.668.232.698	19.138.262.634	97,31
<b>5</b>	<b>Urusan Ketentraman, Ketertiban umum, dan Pelindungan Masyarakat</b>	<b>22.187.627.003</b>	<b>21.879.534.633</b>	<b>98,61</b>
	Satuan Polisi Pamong Praja	13.339.631.794	13.250.318.633	99,33
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.847.995.209	8.629.216.000	97,53
<b>6</b>	<b>Urusan Sosial</b>	<b>26.414.445.012</b>	<b>26.286.445.504</b>	<b>99,52</b>
	Dinas Sosial	26.414.445.012	26.286.445.504	99,52

Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, 2022.

Uraian lebih rinci mengenai penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan Dasar adalah sebagai berikut :

### 1. Urusan Pendidikan

Alokasi anggaran urusan pendidikan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 624.303.093.464,00 dan realisasi sebesar Rp. 602.137.276.499,00 atau sebesar 96,45 persen, dengan jumlah program dan kegiatan urusan pendidikan tahun 2022 adalah 5 program, 15 kegiatan. Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dengan rincian program sebagai berikut:

**Tabel 4.39**  
**Target dan Realisasi Urusan Pendidikan**

NO.	Program/Kegiatan	Anggaran		
		Target (Pagu) (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
	<b>URUSAN PENDIDIKAN</b>	<b>624.303.093.464</b>	<b>602.137.276.499</b>	<b>96,45</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>389.237.801.574</b>	<b>372.891.678.993</b>	<b>95,8</b>
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	449.626.324	440.031.250	97,87
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	378.775.217.365	363.561.996.330	95,98
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	196.495.000	191.964.300	97,69
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	347.200.000	341.254.136	98,29
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.805.900	7.718.500	98,88
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.640.510.529	7.652.864.520	88,57
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	453.273.000	337.145.249	74,38
8	Penataan Organisasi	10.000.000	10.000.000	100
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>234.531.728.185</b>	<b>228.713.868.756</b>	<b>97,52</b>
9	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	127.786.060.659	126.466.427.974	98,97
10	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	91.011.790.197	87.489.985.274	96,13
11	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	11.124.562.018	10.363.113.016	93,16

NO.	Program/Kegiatan	Anggaran		
		Target (Pagu)	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5
12	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4.609.315.311	4.394.342.492	95,34
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	<b>66.993.226</b>	<b>66.993.150</b>	<b>100</b>
13	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	66.993.226	66.993.150	100
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>372.720.479</b>	<b>370.900.000</b>	<b>99,51</b>
14	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	372.720.479	370.900.000	99,51
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA</b>	<b>93.850.000</b>	<b>93.835.600</b>	<b>99,98</b>
15	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	93.850.000	93.835.600	99,98

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2022

## 2. Urusan Kesehatan

Alokasi anggaran untuk Urusan Kesehatan Tahun 2022 adalah sebesar Rp.401.225.297.153,00 dan realisasi sebesar Rp.380.020.600.501,00 atau 94,72 persen dengan jumlah program 5 program dan 26 kegiatan. Urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan rincian program sebagai berikut :

**Tabel 4.40**  
**Target dan Realisasi Urusan Kesehatan**

No	Program / Kegiatan	ANGGARAN		
		Target (Pagu) (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
	<b>URUSAN KESEHATAN</b>	<b>401.225.297.153</b>	<b>380.020.900.501</b>	<b>94,72</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>307.078.528.205</b>	<b>297.240.018.849</b>	<b>96,8</b>
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	398.297.300	381.841.950	89
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	132.201.809.312	131.356.783.270	99,36
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	81.200.475	72.334.282	89,08
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	69.823.650	68.996.100	98,81



No	Program / Kegiatan	ANGGARAN		
		Target (Pagu) (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	446.950.000	446.461.049	99,89
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	439.851.256	438.081.652	99,6
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	619.835.300	583.680.589	94,17
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.239.835.800	5.214.969.795	99,53
9	Peningkatan Pelayanan BLUD	167.522.460.112	158.618.805.162	94,69
10	Penataan Organisasi	58.465.000	58.065.000	99,32
<b>II</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>87.821.407.939</b>	<b>76.496.142.338</b>	<b>87,1</b>
11	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	12.349.586.965	11.930.255.920	96,6
12	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	74.578.168.894	63.760.565.304	85,49
13	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	396.374.080	312.834.000	78,92
14	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	497.278.000	492.487.114	99,04
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>4.345.569.463</b>	<b>4.342.363.746</b>	<b>99,93</b>
15	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	29.992.000	29.700.000	99,03
16	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	4.185.541.463	4.185.541.463	100
17	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	130.036.000	127.122.283	97,76
<b>IV</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>336.300.000</b>	<b>321.926.718</b>	<b>95,73</b>
18	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	78.811.000	71.812.500	91,12

No	Program / Kegiatan	ANGGARAN		
		Target (Pagu) (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
19	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga	34.980.000	34.267.200	97,96
20	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	71.849.000	70.886.000	98,66
21	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	33.050.000	32.346.018	97,87
22	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	71.267.000	67.822.000	95,17
<b>V</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>1.643.491.546</b>	<b>1.620.448.850</b>	<b>98,6</b>
24	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	162.797.546	162.797.450	100
25	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32.066.000	32.066.000	100
26	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.448.628.000	1.425.585.400	98,41

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, 2022

### 3. Urusan Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 278.635.852.371,00 dan realisasi sebesar Rp. 251.263.462.987,00 atau 90,18 persen. Anggaran tersebut untuk melaksanakan 10 program 24 kegiatan dan 74 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 4.41**  
**Target dan Realisasi Urusan Pekerjaan Umum**

No	Program / Kegiatan	Anggaran		
		Target (Pagu)	Realisasi	
		(Rp.)	(Rp.)	%
1	2	3	4	5
	<b>Urusan Pekerjaan Umum</b>	<b>278.635.852.371</b>	<b>251.263.462.987</b>	<b>90,18</b>
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>13.634.374.811</b>	<b>13.446.666.258</b>	<b>98,62</b>
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	427.591.130	422.771.897	98,87
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.585.804.320	10.569.840.526	99,85
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	55.340.000	55.081.620	99,53
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	5.680.000	5.680.000	100
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	44.450.000	44.264.580	99,58
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	777.351.861	730.827.300	94,01
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	196.433.800	191.964.496	97,72
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	808.249.200	762.492.276	94,34
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	656.789.500	587.627.563	89,47
10	Penataan Organisasi	76.685.000	76.116.000	99,26
36	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	15.000.000	15.000.000	100
37	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	11.685.000	11.680.000	99,96
38	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	50.000.000	49.436.000	98,87
<b>II</b>	<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</b>	<b>51.345.957.946</b>	<b>46.636.757.705</b>	<b>90,83</b>
11	Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (Ws) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	23.168.693.000	20.704.999.000	89,37

No	Program / Kegiatan	Anggaran		
		Target (Pagu)	Realisasi	
		(Rp.)	(Rp.)	%
1	2	3	4	5
12	Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	28.177.264.946	25.931.758.705	92,03
<b>III</b>	<b>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</b>	<b>10.023.830.014</b>	<b>9.732.769.543</b>	<b>97,1</b>
13	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota	10.023.830.014	9.732.769.543	97,1
<b>IV</b>	<b>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah</b>	<b>9.585.053.000</b>	<b>9.502.175.643</b>	<b>99,14</b>
14	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.585.053.000	9.502.175.643	99,14
<b>V</b>	<b>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase</b>	<b>32.154.680.000</b>	<b>29.203.685.427</b>	<b>90,82</b>
15	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	32.154.680.000	29.203.685.427	90,82
<b>VI</b>	<b>Program Pengembangan Permukiman</b>	<b>75.441.490.000</b>	<b>75.107.699.156</b>	<b>99,56</b>
16	Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman Di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	75.441.490.000	75.107.699.156	99,56
<b>VII</b>	<b>Program Penataan Bangunan Gedung</b>	<b>36.562.760.500</b>	<b>31.786.497.672</b>	<b>86,94</b>
17	Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	36.562.760.500	31.786.497.672	86,94
<b>VIII</b>	<b>Program Penyelenggaraan Jalan</b>	<b>48.214.166.200</b>	<b>34.265.302.835</b>	<b>71,07</b>
18	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	48.214.166.200	34.265.302.835	71,07

No	Program / Kegiatan	Anggaran		
		Target (Pagu)	Realisasi	
		(Rp.)	(Rp.)	%
1	2	3	4	5
<b>IX</b>	<b>Program Pengembangan Jasa Konstruksi</b>	<b>115.000.000</b>	<b>86.555.200</b>	<b>75,27</b>
19	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	100.000.000	80.389.800	80,39
20	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	6.165.400	41,1
<b>X</b>	<b>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>	<b>1.558.539.900</b>	<b>1.495.353.548</b>	<b>95,95</b>
21	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Dan Rencana Rinci Tata Ruang (Rrtr) Kabupaten/Kota	158.458.000	151.675.101	95,72
22	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	728.403.000	727.825.116	99,92
23	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	314.494.000	303.378.431	96,47
24	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	357.184.900	312.474.900	87,48

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2022

#### 4. Urusan Perumahan Rakyat

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diselenggarakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.19.668.232.698,00 dan realisasi sebesar Rp.19.138.262.634,00 atau 97,31 persen. Urusan ini dilaksanakan melalui 4 program, 14 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 4.42**  
**Target dan Realisasi Urusan Perumahan Rakyat**

No.	Program/Kegiatan	Anggaran		
		Target (Pagu)	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5
	<b>URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>19.668.232.698</b>	<b>19.138.262.634</b>	<b>97,31</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.529.747.098</b>	<b>5.390.379.328</b>	<b>97,48</b>



No.	Program/Kegiatan	Anggaran		
		Target (Pagu)	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	135.575.050	120.180.426	88,64
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.902.117.998	3.868.072.351	99,13
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	29.365.400	23.735.600	80,83
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.776.400	39.187.000	96,1
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	584.106.400	563.144.855	96,41
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.887.150	158.343.400	99,66
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	338.643.300	304.831.346	90,02
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	267.465.000	245.663.950	91,85
9	Penataan Organisasi	72.810.400	67.220.400	92,32
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>397.870.000</b>	<b>195.278.467</b>	<b>49,08</b>
10	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	197.870.000	195.278.467	98,69
11	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	200.000.000	-	-
<b>III</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>5.725.535.600</b>	<b>5.662.384.063</b>	<b>99,58</b>
12	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	634.826.700	593.014.663	99,52
13	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	5.090.708.900	5.069.369.400	99,59
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>8.015.080.000</b>	<b>7.890.220.776</b>	<b>98,44</b>
14	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	8.015.080.000	7.890.220.776	98,44

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2023.

## 5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya. Alokasi anggaran dan jumlah program dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.42**  
**Target dan Realisasi Urusan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat**

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	KEUANGAN		
		PAGU	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(Rp.)	(%)
	<b>URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>22.187.627.003</b>	<b>21.879.534.633</b>	<b>98,61</b>
a	Satuan Polisi Pamong Praja	13.339.631.794	13.250.318.633	99,33
b	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.847.995.209	8.629.216.000	97,53

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2022

### 1) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya

Pagu anggaran Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebesar 13.339.631.794,00 dengan realisasi sebesar Rp. 13.250.318.633,00 atau 99,33 persen. Alokasi anggaran tersebut untuk membiayai program sebanyak 2 program dan 11 kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 4.43**  
**Target dan Realisasi Urusan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat (pada Satuan Polisi Pamong Praja)**

No.	Program / Kegiatan	ANGGARAN		
		Target (Pagu)	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5
	<b>URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>13,339,631,794</b>	<b>13,250,318,633</b>	<b>99.33</b>
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>12,168,863,794</b>	<b>12,094,530,637</b>	<b>99.39</b>
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69,308,900	66,741,920	96.30
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,760,001,794	7,746,505,212	99.83
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	28,000,000	25,376,773	90.63
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	192,200,000	192,200,000	100.00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	685,317,300	671,523,415	97.99
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43,009,000	41,018,999	95.37

No.	Program / Kegiatan	ANGGARAN		
		Target (Pagu)	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,978,308,300	2,952,085,049	99.12
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	412,718,500	399,079,269	96.70
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>1,170,768,000</b>	<b>1,155,787,996</b>	<b>98.72</b>
9	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	731,802,000	729,203,000	99.64
10	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	408,966,000	397,585,996	97.22

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2022

## 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya

Pagu anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah sebesar Rp. 8.847.995.209,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.629.216.000,00 atau 97,53 persen. Alokasi anggaran tersebut untuk membiayai program sebanyak 3 program dan 13 kegiatan dengan uraian program sebagai berikut :

**Tabel 4.43**  
**Target dan Realisasi Urusan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat (pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah)**

No.	Program / Kegiatan	Anggaran		
		Target(Pagu)	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5
	<b>URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>8.847.995.209</b>	<b>8.629.216.000</b>	<b>97,53</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.071.085.109</b>	<b>5.936.239.669</b>	<b>97,78</b>
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.290.000	63.881.500	94,32
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.455.305.209	4.416.779.057	86,66
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24.218.000	22.556.370	69,77
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.191.100	20.672.303	73,99
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	306.385.400	293.547.598	97,12
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	324.219.000	318.591.099	98,67

No.	Program / Kegiatan	Anggaran		
		Target(Pagu)	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	323.204.000	279.428.902	76,21
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	535.272.400	512.852.940	96,81
9	Penataan Organisasi	8.000.000	7.929.900	99,12
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>2.004.885.100</b>	<b>1.934.145.931</b>	<b>95,72</b>
10	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	51.331.000	51.028.300	99,66
11	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	673.851.300	659.618.474	98,08
12	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.279.702.800	1.223.499.157	89,43
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>772.025.000</b>	<b>758.830.400</b>	<b>98,29</b>
13	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	772.025.000	758.830.400	98,29

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2022.

## 6. Urusan Sosial

Alokasi anggaran Dinas Sosial sebesar Rp. 26.414.445.012,00 dan realisasi sebesar Rp 26.286.445.504,00 atau 99,52 persen. Adapun jumlah program dan kegiatan urusan sosial tahun 2022 adalah 6 program dan 15 kegiatan. Urusan dilaksanakan oleh Dinas Sosial melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 4.44.**  
**Pagu Dan Realisasi Anggaran Urusan Sosial**

No.	Program / Kegiatan	Anggaran		
		Target (Pagu)	Realisasi	
1	2	3	4	5
	<b>URUSAN SOSIAL</b>	<b>26.414.445.012</b>	<b>26.286.445.504</b>	<b>99,52</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>7.238.147.505</b>	<b>7.145.678.495</b>	<b>98,72</b>
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.000.000	53.341.650	93,37
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.566.168.605	3.529.956.636	91,8
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	40.000.000	26.228.150	84,67



No.	Program / Kegiatan	Anggaran		
		Target (Pagu)	Realisasi	
1	2	3	4	5
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	758.143.000	757.132.463	99,53
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	101.576.500	100.397.900	98,84
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.248.664.500	1.215.625.500	93,87
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.033.005.900	1.027.789.196	99
8	Penataan Organisasi	435.589.000	435.207.000	99,91
<b>II</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>2.355.000.000</b>	<b>2.338.626.274</b>	<b>99,3</b>
9	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	2.355.000.000	2.338.626.274	98,09
<b>III</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>9.596.114.000</b>	<b>9.578.941.937</b>	<b>99,82</b>
10	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	937.000.000	936.884.670	99,98
11	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	8.659.114.000	8.642.057.267	99,24
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>6.197.883.407</b>	<b>6.197.392.350</b>	<b>99,99</b>
12	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	6.197.883.407	6.197.392.350	99,96
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>302.806.000</b>	<b>302.719.100</b>	<b>99,97</b>
13	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	252.806.000	252.719.100	99,97
14	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	100
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>724.494.100</b>	<b>723.087.348</b>	<b>99,81</b>
15	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	724.494.100	723.087.348	99,55

Sumber : Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, 2022.



# BAB V

# PENUTUP

## **BAB V PENUTUP**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2022 bermakna penting dan strategis bagi penyelenggaraan pembangunan Kota Tasikmalaya yang berkelanjutan, dan menjadi media komunikasi pertanggung jawaban kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Tasikmalaya kepada masyarakat.

Tantangan dan permasalahan yang terjadi selama kurun waktu tahun 2021, merupakan bagian dari proses pembangunan yang perlu terus untuk diselesaikan. Oleh karena itu, kami akan terus berupaya mengoptimalkan berbagai sumber daya dan potensi yang kita miliki, sehingga diharapkan pada masa mendatang perwujudan visi dan misi Kota Tasikmalaya dapat tercapai sesuai yang kita harapkan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tasikmalaya dalam rangka mewujudkan Kota Tasikmalaya yang religius, maju dan madani.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat seluruh unsur Pimpinan DPRD Kota Tasikmalaya beserta anggotanya, yang telah mendukung dan bersinergi dengan kami dalam berbagai proses pembangunan, sehingga proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan tertib, aman dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ucapan terima kasih, kami sampaikan juga kepada seluruh ASN Kota Tasikmalaya yang telah mendedikasikan tenaga dan pikirannya dalam berbagai aspek pembangunan, demi kemajuan Kota Tasikmalaya dan seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya, juga kepada seluruh pihak yang telah ikut mendukung serta berpartisipasi baik secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembangunan ini.

Selanjutnya, tak lupa kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dalam pelaksanaan pemerintahan dan proses pembangunan selama tahun 2022 kritik, saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi bersama demi perbaikan pelaksanaan pemerintahan dan proses pembangunan di masa depan.

